

Simon Sumanjoyo Hutagalung

BUKU AJAR

PARTISIPASI
dan PEMBERDAYAAN
di SEKTOR PUBLIK



**BUKU AJAR
PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN
DI SEKTOR PUBLIK**

Penulis : Simon Sumanjoyo Hutagalung

ISBN :

Copyright © Februari 2022

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: xii + 144

Isi merupakan tanggung jawab penulis.
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi

Penata isi : Hasan Al Mumtaza

Cetakan 1, Februari 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

PRAKATA

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ajar ini memuat sejumlah tinjauan konseptual dan juga analisis yang dilakukan oleh penulis. Buku ini dimaksudkan dapat dibaca dan digunakan oleh pembaca, dosen, guru dan peminat kajian kelembagaan pemerintah, pemberdayaan dan partisipasi publik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan dosen pada FISIP Universitas Lampung, khususnya pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila, atas kerjasama dan sumbangsih pemikirannya sehingga mampu berkontribusi terhadap finalisasi buku ini.

Semoga buku ajar ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam bidang pengembangan kajian Ilmu Administrasi Negara. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penulisan buku ini. Saran dan kritik yang membangun selalu kami nantikan demi kesempurnaan buku ini.

Bandar Lampung, Februari 2022

Penulis

Ttd

Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.P.A

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi

BAB I

PARTISIPASI DAN PEMERINTAHAN..... 1

PENDAHULUAN	1
Deskripsi Singkat.....	1
Relevansi Isi Bab	2
Indikator	2
PENYAJIAN	2
Tinjauan Historis Pemerintahan Daerah	2
Tinjauan Partisipasi dan Pemerintahan	4
Rangkuman	6
PENUTUP.....	6
Tugas/Tes formatif.....	6
RUJUKAN.....	6

BAB II

TINJAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT..... 9

PENDAHULUAN	9
Deskripsi Singkat.....	9
Relevansi Isi Bab	9
Indikator	9

PENYAJIAN	9
Konsep Partisipasi Masyarakat	9
Bentuk (Tahap) Partisipasi	10
Pendekatan Partisipasi Masyarakat.....	12
Tingkatan Partisipasi.....	13
Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	15
Tinjauan tentang Model Pembangunan Partisipatif.....	17
Rangkuman	18
PENUTUP.....	18
Tugas/Tes formatif.....	18
RUJUKAN.....	18

BAB III

TINJAUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT..... 19

PENDAHULUAN	19
Deskripsi Singkat,	19
Relevansi Isi Bab	19
Indikator.	19
PENYAJIAN.....	19
Pengertian Pemberdayaan.....	19
Tujuan dan Proses Pemberdayaan.....	21
Strategi Pemberdayaan.....	23
Langkah-langkah Pemberdayaan	26
Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat.....	27
Konsep Masyarakat	30
Rangkuman	31
PENUTUP.....	31
Tugas/Tes formatif.....	31
RUJUKAN.....	31

BAB IV

TINJAUAN TENTANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT	33
PENDAHULUAN	33
Deskripsi Singkat	33
Relevansi Isi Bab	33
Indikator.	33
PENYAJIAN	33
Pengertian Pembangunan	33
Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat.....	34
Perencanaan Pembangunan Pespektif dan Tahunan	35
Tinjauan Pembangunan Daerah.....	36
Pembangunan Desa.....	38
Peranan Masyarakat dan Program Pembangunan.....	38
Pengertian Masyarakat Desa.....	39
Partisipasi Masyarakat Desa.....	41
Pembangunan Partisipatif dan Non Partisipatif.....	42
Rangkuman	44
PENUTUP.....	45
Tugas/Tes formatif	45
RUJUKAN.....	45

BAB V

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PARTISIPASI	47
PENDAHULUAN	47
Deskripsi Singkat	47
Relevansi Isi Bab	47
Indikator	47
PENYAJIAN	47
Implementasi Program PNPM Perkotaan: Studi Kasus 1	47
Faktor yang menjadi Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.....	55

Implementasi Program Gema Sewu Bersenyum Manis: Studi Kasus 2	59
Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Dalam Program Gema Sewu	72
Rangkuman	79
PENUTUP.....	79
Tugas/Tes formatif	79
RUJUKAN.....	79

BAB VI

PARTISIPASI BERBASIS PERILAKU BAGI PROGRAM

PARTISIPASI MASYARAKAT	81
PENDAHULUAN	81
Deskripsi Singkat.....	81
Relevansi Isi Bab	81
Indikator	81
PENYAJIAN	82
Pengertian Perilaku menurut beberapa ahli	82
Desain Model Partisipasi Masyarakat Berbasis Perilaku.....	86
Rangkuman	88
PENUTUP.....	88
Tugas/Tes Formatif.....	88
RUJUKAN.....	89

BAB VII

TINJAUAN COMMUNITY DAN SELF ENGGAMENT

TINJAUAN COMMUNITY DAN SELF ENGGAMENT	91
PENDAHULUAN	91
Deskripsi Singkat.....	91
Relevansi Isi Bab	91
Indikator	91
PENYAJIAN	91
Tinjauan Konsep Community Engagement Dalam Program Partisipasi	91
Prinsip-Prinsip Dalam Community Engagement.....	98

Tinjauan Konsep Self Engagement.....	105
Rangkuman	118
PENUTUP.....	118
Tugas/Soal Formatif.....	118
RUJUKAN.....	119
BAB VII	
PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS.....	121
PENDAHULUAN	121
Deskripsi Singkat.....	121
Relevansi Isi Bab	121
Indikator.	121
PENYAJIAN.....	121
Membangun Partisipasi dan Akuntabilitas Secara Bersamaan.....	121
Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	124
Penguatan Gagasan Akuntabilitas Sosial.....	126
Rangkuman	131
PENUTUP.....	132
Tes Formatif/ Latihan.....	132
RUJUKAN.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
GLOSSARY.....	139
INDEX.....	141
PROFIL PENULIS.....	143

DAFTAR TABEL

Table 1.	Tahap pelaksanaan Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff.	12
Table 2.	Tingkatan Partisipasi menurut Peter Oakley Tingkatan Deskripsi	14
Table 3.	Bentuk-Bentuk Praktis Akuntabilitas Sosial.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Teori Perilaku (Skinner, 1990)	82
Gambar 2.	Model Pengelolaan Program Berbasis Perilaku Masyarakat	86
Gambar 3.	Model Ekologi Sosial (CDC, 2007)	93
Gambar 4.	Model Konseptual CBPR (Wallerstein, 2010).....	97
Gambar 5.	Kerangka Relasi Akuntabilitas dan Partisipasi (Akuntabilitas Sosial)	128

BAB I

PARTISIPASI DAN PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Deskripsi singkat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan memang diperlukan karena keberhasilan suatu pemerintahan khususnya pemerintahan di daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Dalam mewujudkan pemerintahan di Daerah khususnya pelaksanaan suatu kebijakan, partisipasi masyarakat daerah yang dilakukan atas kemauan sendiri lebih dibutuhkan daripada partisipasi masyarakat yang dipaksakan, karena hal ini merupakan awal dan kemauan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan berkompetensi dalam pemerintahan, yang akan memberikan perubahan positif bagi masyarakat tersebut, perubahan dalam setiap pemerintahan sangat diperlukan karena pemerintahan itu sendiri tidak lain adalah suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus, secara sadar dan berencana untuk menuju keadaan yang lebih baik dan pemerataan pemerintahan hanya dapat berkelanjutan apabila bersumber dan partisipasi yang semakin merata dalam kehidupan. Bab ini menjelaskan dan menguraikan perihal latar belakang perkembangan partisipasi masyarakat pada pemerintahan di Indonesia, kemudian juga menjelaskan keterkaitan antara perkembangan implementasi konsep partisipasi dalam perkembangan pemerintahan selama ini.

Relevansi isi bab

Bab ini memiliki relevansi dengan pemahaman tentang peran pemerintah yang secara ideal dijalankan secara rutin, selain itu juga memiliki keterkaitannya dengan tinjauan tentang pemberdayaan masyarakat.

Indikator

Setelah mempelajari bab ini maka dapat diketahui:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang aspek penting dalam perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia,
2. Mahasiswa dapat menjelaskan kembali tiga point penting tentang urgensi partisipasi dalam penyelenggaraan peran pemerintah.

PENYAJIAN

Tinjauan Historis Pemerintahan Daerah

Bagian ini menguraikan tentang perjalanan historis pemerintah daerah dan perannya. Setelah membaca bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang aspek penting dalam perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia Pada masa lalu pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih banyak melaksanakan program yang sentralistik serta diterapkan secara seragam khususnya di daerah-daerah, dengan sering mengesampingkan nilai-nilai budaya dan pranata sosial yang berkembang di masyarakat, dengan kata lain upaya pemerintahan diwamai dengan pendekatan *top down* (dan atas ke bawah), dan sejumlah kasus yang terjadi dengan pola pelaksanaan seperti itu, menunjukkan bahwa penekanan alokasi dana dan program yang sentralistik telah menunjukkan mentalitas ketergantungan, memperlemah prakarsa, serta mengurangi kreatifitas dan daya inovasi masyarakatnya.

Pada saat ini, pemerintahan daerah sebagai bagian yang integral dan pemerintahan Republik Indonesia tidak lepas dan prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, dengan memberikan pelayanan yang prima dan memberdayakan masyarakat adalah suatu aspek yang sangat fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya, dan ikut berperan aktif dalam setiap proses pemerintahan

daerah, hal ini juga terkait dengan paradigma baru pemerintahan, yang tidak lagi dominant, namun bersifat sebagai fasilitator, dalam proses pemerintahan, pemerintah daerah diberi kewenangan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan potensi sumberdaya, serta kemampuan dan keunikan yang ada di daerah.

Dengan kata lain, pemerintahan daerah di masa kini dan masa yang akan datang hendaknya bercirikan karakteristik sosial budaya, dan ekonomi lokal. Dalam kaitannya dengan pemerintahan yang memperhatikan karakteristik potensi sosial budaya dan ekonomi lokal, didalam kehidupan masyarakat terdapat nilai-nilai dan pranata sosial yang khas, yang dapat diberdayakan dalam proses pemerintahan, pemanfaatan norma-norma kebersamaan, persaudaraan, dan kegotong-royongan, dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan warga masyarakat yang mandiri (Rodliyah, 2013), yang berciri:

1. Mempunyai semangat pembangunan yang tinggi.
2. Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahannya sendiri.
3. Mempunyai kemampuan menyusun rencana untuk memecahkan berbagai permasalahannya.
4. Melaksanakan rencana yang telah disusun secara efisien dan efektif dengan bertumpu pada sumberdaya yang ada, dan mampu menjaga kelangsungan proses pemerintahan yang dilakukan.

Pemerataan pemerintahan hanya akan berkelanjutan apabila bersumber dan partisipasi masyarakat yang semakin meluas dan semakin merata dalam kehidupan ekonomi, partisipasi masyarakat yang semakin meluas dan merata hanya dapat muncul dalam iklim yang memberi peluang luas untuk bangkitnya prakarsa, kreatifitas, dan karya yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat lebih lanjut lagi dikemukakan bahwa partisipasi itu adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pemerintahan secara suka rela dan atas kemauan sendiri.

Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan (moril dan materil) masyarakat di daerah yang bersangkutan memang terdapat kaitan yang sangat erat sekali, kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut, hal ini karena partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Tinjauan Partisipasi dan Pemerintahan

Bagian ini menguraikan tentang beberapa point penting perihal urgensi partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah membaca bagian ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kembali beberapa point penting tentang urgensi partisipasi dalam penyelenggaraan peran pemerintah. Tujuan pemerintahan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, setiap orang atau kelompok dalam masyarakat perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif kenyataan yang sering terjadi bahwa pemerintahan di daerah yang kurang berasal dan masyarakat setempat, sehingga ada rangkaian kegiatan pemerintahan tidak dilakukan oleh masyarakat setempat dan hal ini akan berakibat pada kegiatan pemerintahan itu kurang bernilai konstruktif bagi masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, upaya penumbuhan gairah serta kemandirian masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pemerintahan sangat perlu untuk ditingkatkan mengingat masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di Daerah secara swadaya, upaya-upaya penumbuhan gairah serta kemandirian masyarakat tersebut antara lain dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam musyawarah daerah dengan memberikan ide-ide, saran-saran, maupun dalam bentuk kegiatan nyata seperti bantuan tenaga, materi maupun bantuan lainnya demi kemajuan pemerintahan daerah secara mandiri. Keswadayaan tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan (Samosir, 2017), yang mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menjadikan masyarakat berkemampuan untuk mengembangkan perencanaan;
2. Mendorong masyarakat berkemampuan mengidentifikasi masalah yang ada disekitarnya secara bersama-sama dan;
3. Mendorong masyarakat berkemampuan mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan bersama.

Untuk itu dalam pelaksanaan pemerintahan harus mendasarkan

kepada pendekatan bahwa pemerintahan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dengan bantuan pemerintah dan masyarakat secara seimbang, dalam hubungan ini pemerintahan daerah mengutamakan kepada prinsip perimbangan kewajiban serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberikan bimbingan, pengawasan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam pemerintahan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pemerintahan.

Pemerintahan tidaklah berlangsung dengan mudah jika tidak didukung oleh masyarakat, berbagai faktor sosial seperti tingkat pendidikan, ekonomi, budaya masyarakat, dan rasa kesadaran juga memberi pengaruh pada perkembangan pemerintahan, cepatnya laju pemerintahan daerah adalah pencerminan dan kegiatan, kesadaran untuk terus berkembang serta inisiatif dan masyarakat daerah tersebut, pemerintahan sebagai suatu perubahan bukan hanya mencakup perubahan dalam bidang ekonomi saja namun berkaitan pula dengan perubahan sikap dan tindakan dan masyarakat daerah secara nyata, karena itu upaya penumbuhan gairah serta kemandirian masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah secara swadaya, agar kegiatan ini dapat terlaksana dibutuhkan partisipasi dan masyarakat baik berupa, tenaga, waktu dan dana maupun sumbangan pemikiran.

Agar pemerintahan dapat terlaksana dengan baik memang dibutuhkan waktu, tenaga dan dana yang tidak sedikit dan masyarakat, selain itu juga diperlukan persamaan pandangan dan persepsi dan masyarakat mengenai pemerintahan, hal ini diperlukan mengingat kemampuan dan pengeluaran masyarakat daerah yang berbeda-beda. Hal ini juga sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi yang diberikan. Selain kesadaran dan masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi. Melalui partisipasi masyarakat akan mendapatkan tempat yang lebih dihargai dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sementara, pemerintah juga akan memperoleh kepercayaan publik dengan adanya penyediaan media dan mekanisme partisipasi bagi masyarakat. Hubungan yang timbal balik ini akan memperkuat jalannya berbagai kebijakan publik, bahkan mampu mendorong keberhasilan kebijakan tersebut karena masyarakat memiliki modal sosial yang terakumulasi melalui pelembagaan partisipasi oleh pemerintah tersebut. Argumen tersebut yang mendorong berkembangnya program partisipasi sejenis dimasa mendatang.

Rangkuman

Pemerintahan daerah di masa kini dan masa yang akan datang hendaknya bercirikan karakteristik sosial budaya, dan ekonomi lokal. Dalam kaitannya dengan pemerintahan yang memperhatikan karakteristik potensi sosial budaya dan ekonomi lokal, didalam kehidupan masyarakat terdapat nilai-nilai dan pranata sosial yang khas, yang dapat diberdayakan dalam proses pemerintahan, pemanfaatan norma-norma kebersamaan, persaudaraan, dan kegotong-royongan, dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan warga masyarakat yang mandiri. upaya penumbuhan gairah serta kemandirian masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pemerintahan sangat perlu untuk ditingkatkan mengingat masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di Daerah secara swadaya, upaya-upaya penumbuhan gairah serta kemandirian masyarakat tersebut antara lain dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam musyawarah daerah dengan memberikan ide-ide, saran-saran, maupun dalam bentuk kegiatan nyata seperti bantuan tenaga, materi maupun bantuan lainnya demi kemajuan pemerintahan daerah secara mandiri.

PENUTUP

Tugas/Tes formatif.

Diharapkan mahasiswa setelah membaca materi penyajian dapat menjawab soal latihan sebagai berikut:

1. Jelaskan karakteristik apa saja yang hendak diwujudkan oleh pemerintah daerah di masa kini dan mendatang?
2. Jelaskan apa tujuan dari penguatan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan program partisipasi?

RUJUKAN

1. Samosir, L. R. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi).
2. Rodliyah, S. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di sekolah. Indonesia: Pustaka Pelajar.
3. Hak rakyat mengontrol negara: membangun model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. (2006).

Indonesia: Diterbitkan atas kerjasama Malang Corruption Watch
[dengan] Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Jakarta.

BAB II

Tinjauan Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat

Bab ini menjelaskan konsep, tahap, pendekatan dan tingkatan partisipasi dan menguraikan faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat.

Relevansi Isi Bab

Bab ini memiliki relevansi dengan pemahaman tentang proses pemberdayaan masyarakat dan konsep motivasi personal dalam bermasyarakat.

Indikator.

Setelah mempelajari bab ini maka dapat diketahui:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, tahap, pendekatan dan tingkatan partisipasi masyarakat,
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang faktor penghambat partisipasi masyarakat.

PENYAJIAN

Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2011:50), Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung

jawab atas segala keterlibatan. Menurut Tjokroamidjojo dalam Ndraha (1990:14), partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat pembangunan.

Notoatmodjo dalam Budiardjo (2004:28) mengungkapkan bahwa di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya dan ide. Dalam hal ini berwujud 4M, yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan). Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 51), partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasikan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan mendukung pencapaian tujuan melalui proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program dan mengevaluasikan program.

Bentuk (Tahap) Partisipasi

Partisipasi menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011: 58), bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Menurut Ndraha (1990:103-104) bentuk partisipasi meliputi:

1. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial
2. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Yadav dalam Theresia (2014: 198-199) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui di bukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa

tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Sedangkan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 62) secara singkat dijelaskan pada tabel dibawah ini;

Table 1. Tahap pelaksanaan Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff

Tahap	Deskripsi
Pengambilan Keputusan	Penentuan Alternatif dengan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama
Pelaksanaan	Penggerakan sumber daya dan dana dalam suatu pelaksanaan program dan merupakan penentu keberhasilan program.
Pengambilan Manfaat	Partisipasi berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bias dicapai
Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Tahap ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

(Sumber: Dwiningrum, 2011: 63)

Cohen dan Uphoff menyatakan ilmuwan dan politikus lebih memberikan perhatian pada jenis partisipasi pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi. Sementara para administrator cenderung memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam rangka memperbaiki *wellbeing* masyarakat. Hal tersebut memerhatikan adanya latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda menimbulkan konsep partisipasi yang berbeda pula.

Pendekatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Club du Saheldan Mikkelsen dalam Budiardjo (2004:31), beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan,

teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertical.

2. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.
3. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
4. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

Tingkatan Partisipasi

Tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan perlu diketahui oleh agen pemberdayaan. Oleh karena itu indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. Mengukur partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriero dalam Anwas (2014: 98) secara kualitatif mencakup;

1. suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi.
2. dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat.
3. peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen proyek.
4. keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan.
5. peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi.
6. meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain.
7. pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat.
8. meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat, dan organisasi lainnya, dan mulai mempengaruhi kebijakan.

Sementara Wilcox dalam Theresia (2014: 202) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan partisipasi, yaitu:

1. Memberikan Informasi (*Information*).
2. Konsultasi (*Consultation*). Yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan Keputusan Bersama (*Deciding together*). Dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak Bersama (*Acting together*). Dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan (*Supporting independent community interest*). Dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Secara khusus lagi Peter Oakley dalam Dwiningrum (2011: 65), mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan yang dijelaskan dengan table berikut;

Table 2. Tingkatan Partisipasi menurut Peter Oakley Tingkatan Deskripsi

Tingkatan	Deskripsi
Manipulation	Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi. Cenderung berbentuk indoktrinasi.
Consultation	Stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
Consensus Building	Pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahannya adalah individu-individu atau kelompok yang masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.

Tingkatan	Deskripsi
<i>Decision Making</i>	Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
<i>Risk-taking</i>	Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan risiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.
<i>Partnership</i>	Memelukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.
<i>Self management</i>	Puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

(Sumber: Dwiningrum, 2011)

Indikator-indikator partisipasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengukur partisipasi masyarakat yang efektif dalam kegiatan pemberdayaan. Agen pemberdayaan dapat menentukan sejumlah indikator atau seluruh indikator tersebut berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada. Agen pemberdayaan juga dapat menentukan jumlah indikator minimum atau indikator prioritas, indikator yang merepresentasikan proses partisipasi, serta sesuai dengan tujuan dari kegiatan pemberdayaan tersebut.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Dwiningrum (2011: 57) menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain:

1. Sifat malas, apatis, masa bodo, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.
2. Aspek-aspek tipologis
3. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
4. Demografis (jumlah penduduk)
5. Ekonomi (desa miskin/tertinggal)

Sementara Solekhan (2012: 135) mengatakan ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

1. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna spasial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum Musrenbangdes menjadi tidak kapabel untuk mewedahi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

2. Melemahnya Modal Sosial

Menurut Bardhan dalam Solekhan (2012:139), modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Soetrisno dalam Theresia (2014:211) mengidentifikasi beberapa masalah kaitannya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - a. Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatur) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat

- pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.
- b. Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
2. Masalah kedua adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

Tinjauan tentang Model Pembangunan Partisipatif

Menurut Sumodiningrat (2007: 225), mengatakan model pembangunan partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal dalam wadah pembangunan yang dimiliki, dengan menekankan upaya pengembangan kapasitas masyarakat untuk memberdayakan masyarakat. Pembangunan partisipatif merupakan sebuah konsep yang sudah dipakai sejak awal dekade 1980-an, pemerintah mengadopsi skema pembangunan dari bawah (*bottom-up planning*), yang berangkat dari partisipasi masyarakat tingkat kelurahan, kemudian dibawah tingkatan kecamatan dan akhirnya bermuara pada sistem pembangunan nasional.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat proses penggodakan (konversi), ikut memantau implementasi dan aktif melakukan evaluasi. Perlibatan masyarakat tersebut diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri atas kelompok politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan (Nurcholis, 2009:11). Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan partisipatif dalam menanggulangi kemiskinan mensyaratkan pelibatan masyarakat miskin pada umumnya dan keluarga miskin secara khusus. Dalam hal ini keluarga miskin diberikan kesempatan lebih besar untuk terlibat secara aktif baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan.

Rangkuman

Ilmuan dan politikus lebih memberikan perhatian pada jenis partisipasi pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi kebijakan. Sementara para administrator cenderung memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam rangka memperbaiki *wellbeing* masyarakat. Pembangunan Partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

PENUTUP

Tugas/Tes formatif.

Mahasiswa diharapkan dapat menjawab pertanyaan latihan berikut:

1. Sebutkan dan jelaskan beberapa pendapat tentang konsep partisipasi?
2. Sebutkan tahap dan tingkatan partisipasi?
3. Sebutkan faktor penghambat partisipasi masyarakat?
4. Jelaskan kembali tentang pembangunan partisipatif?

RUJUKAN

1. Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar.
2. Ndraha, T. (1990). *Partisipasi Masyarakat. Pembangunan Masyarakat*.
3. Budiardjo, M. (2004). *Dasar-dasar Ilmu Politik Hukum*. Gramedia, Jakarta.
4. Anwas, M. (2014). *Oos. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

BAB III

Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat,

Bab ini menjelaskan pengertian dan konsep pemberdayaan masyarakat, tahap, pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat.

Relevansi Isi Bab

Bab ini memiliki relevansi dengan penjelasan tentang partisipasi masyarakat, dinamika kelompok dan pengorganisasian masyarakat. Dari bab ini mahasiswa dapat memahami keterkaitan beberapa konsep tersebut dan implementasinya dalam penyelenggaraan program partisipasi.

Indikator.

Setelah mempelajari bab ini maka dapat diketahui:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, tahap, pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat,
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang dimensi dan indikator pemberdayaan masyarakat.

PENYAJIAN

Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal kata “*Power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dengan keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan

berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Istilah Pemberdayaan merupakan istilah asing “*Empowerment*”. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dalam dua istilah ini dalam batas- batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu- individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Menurut Freira dalam Hubley yang dikutip oleh Notoatmodjo (2005:262) mengatakan, bahwa: “Pemberdayaan adalah suatu proses dinamis yang dimulai dari di mana masyarakat belajar langsung dari tindakan” Pemberdayaan masyarakat biasanya dilakukan dengan pendekatan pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat berisi tentang bagaimana masyarakat mengembangkan kemampuannya serta bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan”.

Menurut Prijono dan Pranaka dalam Sulistiyani (2004: 77) mengatakan pemberdayaan mengandung dua makna yaitu: (1) memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau berdaya. (2) memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Suharto (2009:59) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sedangkan menurut Slamet dalam Anwas (2014: 49) menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.

Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Sen dalam Sumodiningrat (2007: 28) menyatakan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin. Konsep ini menjadi sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin karena orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan dan objek pasif penerima pelayanan belaka melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasikan untuk perbaikan hidupnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual.

Prijono dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007: 17-18), menjelaskan bahwa istilah pemberdayaan seringkali diartikan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi individu. Selain itu pemberdayaan juga merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlibat dalam perjuangan tersebut. Sedangkan Kartasmita dalam Setiana (2005: 6) mengatakan bahwa pada dasarnya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dari beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk dapat membangun manusia atau masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabat yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih baik, yang mengajak masyarakat untuk bergerak dan ikut berdaya saing dalam menjadikan pribadi dan lingkungannya menjadi lebih berpotensi.

Tujuan dan Proses Pemberdayaan

Menurut Ife yang dikutip oleh Suharto (2006:58): "Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung". Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial,

yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tujuan seringkali di gunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Dari pengertian menurut para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah membantu seseorang dalam memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan hambatan sosial dalam pengambilan tindakan.

Menurut Raeburn yang dikutip oleh Notoatmodjo (2005:268) mengatakan bahwa: “Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses dan sebagai hasil. Sebagai hasil, pemberdayaan masyarakat adalah suatu perubahan yang signifikan dalam aspek sosial politik yang dialami oleh individu dan masyarakat, yang seringkali berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, bahkan seringkali lebih dari tujuh tahun”.

Sebagai suatu proses, pemberdayaan masyarakat menurut Jackson, Labonte, dan Rissel yang dikutip oleh Notoatmodjo (2005:268) mengatakan bahwa “Pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa komponen, yaitu pemberdayaan personal, pengembangan kelompok kecil, pengorganisasian masyarakat, Kemitraan, dan Aksi sosial dan politik”.

Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan kemampuannya, di antaranya melalui pendayagunaan potensi lingkungan. Menurut Suyono dalam Notoatmodjo (2005:255), Paling tidak ada tiga syarat dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Kesadaran, kejelasan serta pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan.
2. Pemahaman yang baik tentang keinginan berbagai pihak termasuk masyarakat tentang hal-hal apa, di mana, dan siapa yang akan diberdayakan.
3. Adanya kemauan dan keterampilan kelompok sasaran untuk menempuh proses pemberdayaan”.

Dari pengertian menurut para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sebagai suatu proses pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan dalam menjalankan suatu tindakan pada program tertentu untuk menuju hasil yang ingin di capai.

Strategi Pemberdayaan

Menurut Parsons et.al dalam Suharto (2005:66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam *setting* pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.

Pendekatan dalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas di capai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P menurut Suharto, yaitu:

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat dan kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah

dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Menurut Dubois dan Miley dalam Suharto (2005:68) memberikan beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Membangun relasi pertolongan yang:
 - Merefleksikan respon empati
 - Menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri
 - Menghargai perbedaan dan keunikan individu
 - Menekankan kerjasama klien (*client partnerships*)
2. Membangun komunikasi yang:
 - Menghormati martabat dan harga diri klien
 - Mempertimbangkan keragaman individu
 - Berfokus pada klien
 - Menjaga kerahasiaan klien
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang:
 - Memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah
 - Menghargai hak-hak klien
 - Merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar
 - Melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui:
 - Ketaatan terhadap kode etik profesi
 - Keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan
 - Penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik
 - Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Pelaksanaan pendekatan di atas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis seperti Solomon, Rappaport, Pinderhughes, Swift, Swift dan Levin, Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt

dalam Suharto (2005:68-69) terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerja sosial, di antaranya:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan, cara, dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Dari pengertian menurut para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan memiliki berbagai macam cara dan jalan dalam melakukan proses pemberdayaan. Pendekatan dalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan mempengaruhi hasil dari proses pemberdayaan.

Langkah-langkah Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat mempunyai cakupan yang luas, meliputi jenjang tsasaran yang diberdayakan (*level of objects*), kegiatan internal maupun eksternal masyarakat atau komunitas yang berbentuk kemitraan (*patnership*) dan jejaring (*networking*) serta dukungan dari atas berbentuk kebijakan politik yang mendukung kelestarian pemberdayaan. Untuk itu maka pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Merancang Keseluruhan Program

Merancang keseluruhan program, termasuk di dalamnya kerangka waktu kegiatan, ukuran program, serta memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Perancangan program dilakukan menggunakan pendekatan partisipatoris, di mana tantara agen perubahan baik pemerintah maupun LSM serta masyarakat bersama-sama menyusun perencanaan. Perencanaan partisipatoris (*participatory planning*) ini dapat mengurangi terjadinya konflik yang memungkinkan muncul antara dua pihak tersebut selama program berlangsung dan setelah program dievaluasi.

2. Menetapkan Tujuan

Tujuan promosi kesehatan biasanya dikembangkan pada tahap perencanaan dan biasanya berpusat pada mencegah penyakit, mengurangi kesakitan dan kematian dan manajemen gaya hidup melalui upaya perubahan perilaku yang secara spesifik berkaitan dengan kesehatan. Adapun tujuan pemberdayaan biasanya berpusat pada bagaimana masyarakat dapat mengontrol keputusatnnya yang berpengaruh pada kesehatan dan kehidupan bermasyarakatnya.

3. Memilih Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang terdiri dari lima pendekatan, yaitu: pemberdayaan, pengembangan kelompok kecil, pengembangan dan penguatan jaringan antarorganisasi, dan tindakan politik. Sedangkan strategi pemberdayaan meliputi: pendidikan masyarakat, fasilitas kegiatan yang berasal dari masyarakat, mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat sebagai prasyarat pokok tumbuhnya tanggungjawab sebagai

anggota masyarakat (*community responsibility*), fasilitasi upaya mengembangkan jejaring antarmasyarakat, serta advokasi kepada pengambilan keputusan (*decision maker*).

4. Implementasi strategi dan manajemen

Implementasi strategi serta manajemen program pemberdayaan dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta *stakeholder*, menumbuhkan kemampuan pengenalan masalah, mengembangkan kepemimpinan lokal, membangun keberdayaan struktur organisasi, meningkatkan mobilisasi sumber daya, memperkuat kemampuan *stakeholder* untuk “bertanya mengapa?”, meningkatkan kontrol *stakeholder* atas manajemen program, dan membuat hubungan yang sepadan dengan pihak luar.

5. Evaluasi program

Pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung lambat dan lama, bahkan dapat dikatakan tidak pernah berhenti dengan sempurna. Sering terjadi hal-hal tertentu yang menjadi bagian dari pemberdayaan baru tercapai beberapa tahun sesudah kegiatan selesai. Oleh karenanya akan lebih tepat jika evaluasi diarahkan pada proses pemberdayaan, daripada hasilnya. Hal-hal yang dapat di evaluasi dalam pemberdayaan, di antaranya:

- a. Jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan,
- b. Jumlah kegiatan yang bersifat pendekatan dari bawah,
- c. Jumlah pelaku kegiatan yang merasa melakukan belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

Dari pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa langkah-langkah dalam pemberdayaan diawali dengan merencanakan program yang akan di jalankan dengan tujuan yang sudah di tetapkan melalui strategi yang dipilih kemudian diterapkan sehingga dapat mengetahui hasil akhirnya.

Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Keiffer dalam Suharto (2009:63), Pemberdayaan mencakup tiga (3) dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Sedangkan Parsons juga mengajukan tiga (3) dimensi pemberdayaan yang menunjuk pada:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pemberdayaan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Indikator Pemberdayaan menurut Suharto dalam Anwas (2014: 50) paling tidak memiliki empat hal yaitu: (1) merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif. (2) memperbaiki kehidupan masyarakat, (3) prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan (4) serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Menurut Schuler,dkk dalam Suharto (2009: 63), mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* (indeks pemberdayaan), antara lain: (a) Keberhasilan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadan dan kerumah tetangga. (b) kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan dirinya. (c) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier. (d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga. (e) Kebebasan relative dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang yang mengambil uang, melarang mempunyai anak, melarang bekerja diluar rumah dan lain-lain. (f) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan. (g) Keterlibatan kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes. (h) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, tabungan dan lain-lain.

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui: penguatan untuk memberdayakan dan kegiatan pemberdayaan. Menyadari sangat kompleksnya masalah dan faktor penyebab kemiskinan, maka pengentasan kemiskinan tidak bisa dipecahkan dari aspek ekonomi saja. Menurut Suyono dalam Anwas (2014: 86), penuntasan kemiskinan menuju keluarga sejahtera perlu memasukan variable non ekonomi. Hal ini disebabkan karena penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia. Orang menjadi miskin bukan hanya karena dia tidak mempunyai modal usaha atau tidak punya aset produksi, akan tetapi ia berpotensi tetap miskin karena dia tidak mempunyai penyangga ekonomi.

Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah *mindset* individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat. Bentuk aktivitas pemberdayaan tersebut diantaranya: kegiatan pendidikan dan latihan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, kegiatan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, menumbuhkan lembaga-lembaga non formal dalam masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan lokal sebagai modal sosial, dan bentuk aktivitas lainnya.

Kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan pembangunan sosial yang menjadi gerakan masyarakat yang didukung oleh semua unsur mulai: pemerintah, anggota legislatif, Perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat dan juga media massa. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Melalui kegiatan pemberdayaan, masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya mereka didorong untuk dapat melakukan perubahan dimulai dari dalam dirinya. Perubahan dari hal-hal kecil yang mudah dan dapat dilakukan individu dan lingkungannya. Tahap selanjutnya adalah penguatan dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga perubahan itu akan meningkat. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan. Selanjutnya memberikan *reward* kepada individu atau masyarakat yang memiliki prestasi perubahan. Pada akhirnya keberhasilan tahap ini

ditandai dengan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Tahap ini penting sebagai motivasi bagi diri dan lingkungan di sekitarnya, dan semua tahap ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Konsep Masyarakat

Masyarakat atau *society* merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah Sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi terjadi antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Menurut Hunter yang dikutip oleh Notoatmodjo (2005:256) mengatakan bahwa “masyarakat dapat dipahami sebagai: unit fungsional dalam wilayah tertentu yang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya guna mempertahankan kehidupannya, unit interaksi sosial yang berpola, dan unit simbolik yang memberikan identitas kolektif”.

Menurut Ralph Linton dalam Ngadijono (1984:15), dikatakan bahwa “masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu”. Dari pengertian menurut para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan individu yang berkumpul di suatu wilayah atau daerah tertentu yang saling berinteraksi.

Menurut Ralph Linton dalam Ngadijono (1984:17), “masyarakat itu timbul dari setiap kumpulan individu yang telah lama hidup dan bekerjasama.” Dalam waktu yang lama, kelompok manusia yang belum terorganisir itu mengalami proses, seperti:

1. Proses adaptasi di antara sesama anggota kelompoknya.
2. Proses organisasi ke dalam.
3. Proses terbentuknya perasaan kelompok atau semangat kelompok (hal ini tumbuh secara bertahap).

Sebelum proses di atas terjadi, ada relasi sosial yang merupakan hubungan satu sama lain. Dari relasi sosial itu, lalu timbullah interaksi sosial. Dalam berinteraksi, maka telah terjadi saling pengaruh antara mereka yang berinteraksi. Lalu dari proses interaksi tersebut, lahirlah proses adaptasi sosial, di mana mereka saling menyesuaikan diri. Adaptasi atau penyesuaian itu meliputi aspek tingkah laku dan sikap individu menjadi semangat kelompok. Dari pengertian menurut para ahli di atas,

maka penulis menyimpulkan bahwa aspek masyarakat merupakan proses penyesuaian individu atas tingkahlaku dengan sikap individu-individu lainnya yang membuat terbentuknya rasa kebersamaan atau semangat kelompok.

Rangkuman

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

PENUTUP

Tugas/Tes formatif.

Mahasiswa diharapkan dapat menjawab beberapa soal latihan berikut:

1. Jelaskan kembali mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat?
2. Sebutkan tiga syarat dalam proses pemberdayaan masyarakat?
3. Sebutkan cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat?
4. Jelaskan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* (indeks pemberdayaan)?

RUJUKAN

1. Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
2. Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*.
3. Sumodiningrat, G. (2007). *Pemberdayaan sosial: kajian ringkas tentang pembangunan manusia Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
4. Nugroho, D., & Wrihatnolo, R. R. (2007). *Manajemen pemberdayaan*. Jakarta, PT Alex Media Komputido.

BAB IV

Tinjauan Tentang Pembangunan Masyarakat

PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat

Bab ini menjelaskan pengertian dan konsep pembangunan masyarakat serta pendekatan dan tujuan pembangunan masyarakat.

Relevansi Isi Bab

Bab ini memiliki relevansi dengan penjelasan tentang partisipasi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan perencanaan komunitas. Dari bab ini mahasiswa dapat memahami keterkaitan beberapa konsep tersebut dan implementasinya dalam penyelenggaraan program partisipasi.

Indikator.

Setelah mempelajari bab ini maka dapat diketahui:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, pendekatan dan tujuan pembangunan masyarakat,
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang urgensi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan desa.

PENYAJIAN

Pengertian Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja

diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005). Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995 : 13).

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, *pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu

pendidikan penyuluhan (extention education) dan pembangunan masyarakat (community development). Di tahun 1966 Joseph Di Franco membandingkan kedua macam pendekatan tersebut secara menyeluruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk (organisasi) dan prinsip – prinsipnya. Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua pendekatan menginginkan perubahan perilaku dalam perilaku individu, pengembangan masyarakat secara langsung berkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal (daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat.

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. *Bryant* dan *White* (1987 : 132), mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.
4. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

Perencanaan Pembangunan Pespektif dan Tahunan

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pembedanya dari segi jangka waktu rencana, yaitu : (Tjokroamidjojo, 1990)

1. Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
2. Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
3. Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun.

Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Namun pada kenyataannya, tujuan dan sasaran luas tersebut harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu kedalam beberapa rencana jangka pendek atau tahunan (Arsyad, 1999 :50). Pemecahan rencana perspektif menjadi rencana tahunan dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat lebih mudah untuk dievaluasi dan dapat diukur kinerjanya. Tujuan pokok rencana perspektif dan tahunan ini adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah – masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka pendek.

Tinjauan Pembangunan Daerah

Menurut Lincoln Arsyad dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, pengertian daerah berbeda – beda tergantung aspek ditinjaunya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, 1999 : 107-108) :

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat – sifat yang sama. Kesamaan sifat – sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian

administrasi suatu Negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan bersama sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya – sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya – sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:

- meliputi seluruh aspek kehidupan,
- dilaksanakan secara terpadu,
- meningkatkan swadaya masyarakat

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek – proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbalan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia (Sudirwo, 1981 :64)

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya : jembatan,

gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain – lain. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain – lain.

Pembangunan Desa

Menurut Taliziduhu (1987 : 54) Pembangunan desa sebagai suatu proses dengan upaya masyarakatdesa yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah untukmeningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat dan kemungkinan mereka diberi sumbangan penuh kepada kemajuan nasional. Dari pengertian Taliziduhu di atas, pembangunan desa dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan masyarakat desa yang sejahtera dengan campur tangan pemerintah yang memiliki wewenang untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa agar lebih maju. Menurut Agusthoa Kaswata (1985 :24) pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan pada tugas dan kewajiban masyarakat desa. Dari pendapat Agusthoa di atas, pembangunan desa dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang diarahkan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan didasarkan pada tugas dan kewajiban masyarakat desa sendiri. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah suatu proses perubahan yang ditujukan kepada masyarakat desa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat desa sendiri.

Peranan Masyarakat dan Program Pembangunan

Menurut *Mubyarto* dalam *Ndraha* partisipasi adalah segala daya dan dapat disediakan atau dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi mayarakat desa terhadap proyek – proyek pemerintah. Sedangkan *Tjokroamidjoyo* (1990:206) memberikan pengertian partisipasi adalah keterlibatan dan keikut sertaan masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik suatu Negara. Dari uraian menurut ahli tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu tindakan atau perbuatan dan emosi seseorang atau kelompok untuk memberikan sumbangan terhadap kegiatan – kegiatan tertentu.

Secara koseptual, Daniell Selener (1997) membedakan empat macam kategori partisipatif :

- Domestikasi : Kekuasaan dan kontrol terhadap kegiatan tertentu ada di tangan perencana, kepala desa, camat, atau pemerintah yang diraih dengan menggunakan teknik partisipasi semu untuk melakukan manipulasi kegiatan yang menurut anggapan pihak luar penting dan bukannya memberdayakan partisipannya atau masyarakatnya sendiri
- Bantuan : Kekuasaan dan kontrol tetap ada di tangan pihak luar (elit). Para anggota kelompok yang berpartisipasi menerima informasi, nasihat, dan bantuan. Para partisipan diperlakukan sebagai objek pasif yang tidak mampu mengambil peranannya dalam proses kegiatan. Mereka sekedar diberi informasi kegiatan, tetapi tidak mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan dan kontrol.
- Kooperasi : Melibatkan masyarakat dalam bekerjasama dengan pihak luar untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat atau partisipan. Keputusan diambil melalui dialog antara partisipan dan pemimpin. Partisipan juga aktif dalam pelaksanaan. Kekuasaan dan kontrol dipegang bersama selama berlangsungnya kegiatan, yang secara ideal berlangsung dari “bawah ke atas”.
- Pemberdayaan : Pendekatan agar masyarakat memegang kekuasaan dan kontrol terhadap program, atau kelembagaan berikut pengambilan keputusan dan kegiatan administrasi. Partisipasi diraih melalui hati nurani, demokratisasi, solidaritas dan kepemimpinan. Partisipasi untuk pemberdayaan biasanya bercirikan terjadinya proses mandiri dalam perubahan tatanan sosial dan politik.

Menurut Madrie (1988), partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan warga atau keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan, ikut memanfaatkan hasil pembangunan, ikut mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan oleh komunitas, organisasi atau pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Pengertian Masyarakat Desa

Menurut Soekanto (2006:26) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan- batasan yang dirumuskan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup

bersama yang memiliki tata cara hidup dengan aturan- aturan yang sudah disepakati bersama.

Menurut Koentjaraningrat (2005) berpendapat bahwa masyarakat desa adalah “masyarakat desa merupakan sebuah komunitas kecil yang memiliki ciri- ciri yang khusus dalam pola tata kehidupan, ikatan pergaulan dan seluk beluk masyarakat pedesaan, yaitu:

1. para warganya saling mengenal dan bergaul secara intensif,
2. karena kecil, maka setiap bagian dan kelompok khusus yang ada di dalamnya tidak terlalu berbeda antara satu dan lainnya,
3. para warganya dapat menghayati lapangan kehidupan mereka dengan baik. Selain itu masyarakat pedesaan memiliki sifat solidaritas yang tinggi, kebersamaan dan gotong royong yang muncul dari prinsip timbal balik. Artinya sikap tolong menolong yang muncul pada masyarakat desa lebih dikarenakan hutang jasa atau kebaikan.”

Jadi dapat diartikan bahwa masyarakat desa menurut Koentjaraningrat adalah kelompok masyarakat yang hidup saling mengenal satu sama lain dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan gotong royong. Menurut Shahab (2007), secara umum ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat homogen dalam mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta dalam sikap dan tingkah laku
2. Kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi yang berarti semua anggota keluarga turut bersama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
3. Faktor geografi sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. Misalnya, keterikatan anggota keluarga dengan tanah atau desa kelahirannya, 4). Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada kota.

Jadi masyarakat desa menurut Shahab dapat diartikan sekelompok orang yang tinggal dalam suatu wilayah yang memiliki berbagai kesamaan dan memiliki hubungan yang dekat satu sama lain. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa adalah sekelompok manusia yang hidup jadi satu yang memiliki persamaan baik kebiasaan atau tradisi yang sama maupun mata pencaharian dengan mengedepankan kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat dan dekat satu sama lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto (2007) menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam
2. Kehidupan petani sangat bergantung pada musim
3. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja
4. Struktur perekonomian bersifat agraris
5. Hubungan antar anggota masyarakat desa berdasar ikatan kekeluargaan
6. Perkembangan sosial relatif lambat
7. Kontrol sosial ditentukan oleh moral dan hukum informal
8. Norma agama dan adat masih kuat

Partisipasi Masyarakat Desa

Menurut Tjokroamidjojo (1996:207) mengemukakan bahwa ada 3 tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan hasil pembangunan. Menurut Uphoff *dalam* Endang (2003:37) mengatakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.. Sedangkan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan desa dapat terlihat dari kehadiran masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang desa). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa: "musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah)".

Secara umum ada 2 (dua) jenis definisi partisipasi di dalam masyarakat. Menurut Soetrisno (1995:221), yaitu:

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam defenisi ini pun diukur dengan kemauan

masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.

2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi menjadi 3 tahap yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini didukung oleh pendapat Cohen dan Uphoff bahwa partisipasi masyarakat dibedakan dalam :

1. perencanaan pembangunan diwujudkan dengan :
 - a. Keikutsertaan dalam rapat
 - b. Keaktifan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran
2. pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan bentuk partisipasi. Wujud nyata partisipasi dapat berupa tenaga, uang, dan harta benda.
3. Evaluasi pembangunan diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Pembangunan Partisipatif dan Non Partisipatif

Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan (Oakley, 1991: 14). Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1976 : 222-224) ciri-ciri pembangunan partisipatif adalah:

1. Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara, turut menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatnya kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu

3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana

Menurut Parwoto (1997: 103) ciri-ciri pembangunan yang partisipatif adalah :

1. proaktif atau sukarela (tanpa disuruh)
2. adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebut
3. adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut
4. adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

Menurut Kartasmita (1997) pembangunan non partisipatif dapat terjadi disebabkan:

1. pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak
2. pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat, tetapi banyak yang kurang memahami maksud itu
3. pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.
4. pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan

Menurut Conyers (1991 : 154) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaan, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

3. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat.
4. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan mereka pun mempunyai hak untuk turut (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan non partisipatif adalah pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan yang dimaksud adalah keputusan dalam menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Tidak adanya partisipasi atau peran serta dari masyarakat, maka program-program pembangunan yang akan dijalankan tidak dapat terealisasi dengan baik. Sehingga, dalam desa tersebut tidak memiliki perubahan yang lebih baik.

Rangkuman

Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/ perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Pembangunan desa adalah proses perubahan yang ditujukan kepada masyarakat desa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat desa sendiri. Pembangunan non partisipatif adalah pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan yang dimaksud adalah keputusan dalam menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.

PENUTUP

Tugas/Tes formatif

Mahasiswa diharapkan dapat menjawab soal latihan berikut ini:

1. Jelaskan kembali tentang pengertian pembangunan?
2. Jelaskan mengenai empat macam kategori partisipatif?
3. Jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan pembangunan partisipatif?
4. Jelaskan tiga alasan utama partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan?

RUJUKAN

1. Tjokroamidjojo, B. (1987). *manajemen Pembangunan*. Haji Masagung.
2. Gaventa, J., & Valderrama, C. (1999, June). Participation, citizenship and local governance. In *Background note for the workshop "Strengthening Participation in Local Governance," University of Sussex, Institute of Development Studies* (Vol. 21).
3. Conyers, D. (1984). Decentralization and development: A review of the literature. *Public Administration & Development (pre-1986)*, 4(2), 187.
4. Kartasmita, G. (1993). *Kebijaksanaan dan strategi pengentasan kemiskinan*. Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi.
5. Soetrisno, N. (2005). SME Clustering Strategy In Indonesia: An Integrated Development Support. *Improving the competitiveness of SMEs through enhancing productive capacity*, 131.
6. Soekanto, S. (1986). *Sosiologi: suatu pengantar*.

BAB V

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi

PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat

Bab ini menjelaskan variabel dan indikator yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap program pemberdayaan masyarakat.

Relevansi Isi Bab

Bab ini memiliki relevansi dengan penjelasan tentang partisipasi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan perencanaan komunitas. Dari bab ini mahasiswa dapat memahami keterkaitan beberapa konsep tersebut dan implementasinya dalam penyelenggaraan program partisipasi.

Indikator.

Setelah mempelajari bab ini maka dapat diketahui:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan variabel dan indikator dalam program pemberdayaan masyarakat,
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang proses dan kendala dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat.

PENYAJIAN

Implementasi Program PNPM Perkotaan: Studi Kasus 1

Partisipasi menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2011: 50) adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan

mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Cohen dan Uphoff juga menambahkan partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan selain masyarakat dapat merasakan manfaatnya, juga memahami program yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat sadar akan pembangunan melalui partisipasi karena suatu pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban masyarakat oleh karena itu pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat melalui program atau kegiatan yang bersifat partisipatif untuk dilaksanakan.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dan semua pihak *stakeholders*. Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat proses konversi, ikut memantau implementasi dan aktif melakukan evaluasi. Perlibatan masyarakat tersebut diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri atas kelompok politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan (Nurcholis, 2009:11). Dalam hal ini Pemerintah melalui PNPM Mandiri Perkotaan menginginkan masyarakat berpartisipasi aktif pada program ini. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari beberapa langkah yakni:

1. Partisipasi masyarakat dalam Tahap Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal hak pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan ataupun penolakan terhadap program yang di tawarkan (Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum, 2011:

61). Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam pengambilan keputusan dapat dilihat adanya keterlibatan masyarakat Kelurahan Kaliawi pada kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan untuk hadir dalam setiap pertemuan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan dari PNPM Mandiri yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu atau lebih, keterlibatan dalam tahap ini juga dilihat dari pemberian saran atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan baik di bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, yang dapat dilihat dari keaktifan masyarakat serta keterlibatan dalam penentuan anggaran kegiatan. Namun dalam hal ini, tidak semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi penuh karena beberapa alasan seperti tidak memiliki waktu luang, yang tidak diinformasikan sebelumnya dan alasan lainnya.

Pada tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat belum cukup baik dalam merencanakan setiap kegiatan yang akan dilakukan, padahal pada tahap ini cukup penting untuk memiliki banyak partisipasi dari masyarakat, karena masyarakat sekitar lah yang mengetahui kondisi wilayah, ada masalah apakah di wilayah terkait, serta kebutuhan apakah yang diperlukan di wilayahnya, sehingga pengambilan keputusan dapat diambil berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap dilihat dari prioritas kebutuhan di wilayahnya.

Partisipasi masyarakat pada tahap ini menurut peneliti berada pada tingkatan *Decision Making* (membuat keputusan), dimana keputusan yang diambil bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok. Sehingga meskipun banyak masukan atau aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan ataupun perubahan yang akan dilakukan, berdasarkan kesepakatan bersama dan dilihat berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat banyak.

2. Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program atau pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan

lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan ataupun tujuannya. Didalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dengan menggerakkan sumber daya dan dana. Pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri (Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum, 2011: 62).

Uphoff dalam Kaho (2010: 128), menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Slamet (2003) Menambahkan partisipasi dalam tahap ini adalah pelibatan seseorang pada pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material serta ide-ide dalam pekerjaan tersebut.

Keterlibatan masyarakat Kelurahan Kaliawi melaksanakan kegiatan bersama-sama dan bergotong royong murni tenaga kerja tersebut berasal dari warga asli wilayah tempat kegiatan dilaksanakan. Meskipun tidak ada bantuan berupa dana untuk pelaksanaan kegiatan, namun swadaya masyarakat terus berjalan memberikan dukungan agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan lancar.

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Kaliawi adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur (fisik), pembangunan ekonomi masyarakat kecil melalui ekonomi bergulir, kegiatan pemberdayaan meliputi pelatihan keterampilan yang sasaran utamanya yaitu masyarakat miskin, seperti yang diungkapkan Sen dalam Sumodiningrat (2007: 28) menyatakan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin. Konsep ini menjadi sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin karena orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan dan objek pasif penerima pelayanan belaka melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasikan untuk perbaikan hidupnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur (fisik), pembangunan ekonomi masyarakat kecil melalui ekonomi bergulir, kegiatan pemberdayaan meliputi pelatihan keterampilan. Pendanaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari anggaran APBN dan APBD. Dana yang telah diberikan tersebut masuk melalui rekening Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM) yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk melakukan pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Setiap kegiatan yang dilakukan dananya tidak boleh melebihi dana yang sudah ditentukan pada awalnya, sehingga pembangunan yang dilakukan hanya menggunakan dana dari pemerintah. Karena cukup sulit untuk mengharapkan bantuan berupa tambahan dana dari masyarakat mengingat 40% masyarakat di kelurahan Kaliawi berekonomi menengah kebawah. Namun, hal tersebut tidak menjadikan partisipasi masyarakat menjadi terbatas, masyarakat di kelurahan Kaliawi berpartisipasi dalam berbagai bentuk keikutsertaan agar kegiatan yang terlaksana berjalan lancar. Bentuk partisipasi masyarakat yang umum dilakukan berupa:

3. Tenaga

Partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi dalam bentuk tenaga untuk melaksanakan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan program. Masyarakat berpartisipasi secara aktif hal ini di karenakan masyarakat lebih memilih mengerjakan kegiatan sendiri dibandingkan harus memberikan pekerjaan kegiatan tersebut pada pihak luar. Masyarakat kelurahan Kaliawi memilih mengerjakan kegiatan ini dengan bersama-sama bergotong royong untuk kemajuan daerahnya sendiri.

4. Swadaya Masyarakat

Meskipun masyarakat tidak memberikan bantuan berupa dana, bukan hanya tenaga saja, tetapi juga yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu jalannya kegiatan adalah dengan menyiapkan makanan atau minuman, seperti kopi, the atau goreng-gorengan kepada masyarakat yang turut membantu pembangunan yang dilaksanakan.

5. Harta benda dan Barang Material

Partisipasi dalam bentuk harta benda yaitu dengan menyumbang harta benda, biasanya berupa alat kerja atau perkakas. Selain itu juga masyarakat yang tanahnya digunakan untuk untuk pembangunan sumur bor yang ada di kelurahan Kaliawi, mereka dengan ikhlas memberikan (hibah) tanah tersebut untuk digunakan untuk kepentingan bersama. Masyarakat di kelurahan Kaliawi juga yang memiliki ekonomi yang berkecukupan dan berkeinginan untuk membantu menyumbangkan bahan-bahan material seperti semen, pasir, atau batu-batuan sangat diterima dengan baik, karena hal tersebut dapat meminimalisir penggunaan dana PNPM Mandiri Perkotaan.

6. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:62), Partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil ini berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target. Uphoff dalam Kaho (2010:128) juga menambahkan partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya (*material benefits*), manfaat sosialnya (*social benefits*) dan manfaat pribadi.

Partisipasi pada tahap ini dilihat dari banyaknya masyarakat kelurahan Kaliawi memanfaatkan hasil dari program ini. Di bidang ekonomi melalui kegiatan ekonomi bergulir untuk masyarakat kecil masih berlangsung meskipun program ini sudah selesai sejak 2017. Pelibatan masyarakat dalam memanfaatkan hasil dari program ini juga terlihat pada bidang fisik yang dapat langsung di nikmati masyarakat kelurahan Kaliawi. Setelah pembangunan selesai dilaksanakan, masyarakat banyak yang menggunakan hasilnya dan merasakan dampak adanya program ini yang mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat. Mereka merasakan kemudahan melakukan aktifitas dengan adanya perbaikan talud, tidak lagi sulit mendapatkan air bersih karena telah dibangun sumur-sumur bor, puskesmas yang dibangun untuk memudahkan masyarakat sekitar

untuk berobat apabila sakit, serta pembangunan-pembangunan lain yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi bergulir yang membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dan juga pelatihan yang dilaksanakan mampu memberikan ketrampilan tambahan bagi masyarakat. Karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dan ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup lainnya (kesehatan, pendidikan, air bersih ataupun sanitasi) merupakan salah satu karakteristik yang menunjukkan kemiskinan (SMERU dalam Suharto, 2009: 132).

Partisipasi masyarakat dalam tahap ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya karena terlihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan hasil dari pembangunan yang dilakukan. Pembangunan dibidang fisik seringkali memberikan manfaat dan mampu dikatakan berhasil melihat banyaknya masyarakat yang mendapatkan manfaatnya serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Pembangunan dibidang fisik dalam program ini mampu dikatakan berhasil dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam dalam memanfaatkan hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

1. Manfaat Material (*material benefits*)

Manfaat material yang dapat dirasakan anggota kelompok dengan adanya program ini berupa sisa material. Pada saat pelaksanaan kegiatan, ada beberapa sisa material yang bisa dimanfaatkan atau digunakan seperti sisa semen, yang digunakan untuk memperbaiki pondasi didekat sumur bor yang agak berlubang.

2. Manfaat Sosial (*social benefits*)

Sesuai dengan prinsip program ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Manfaat sosial yang dapat dirasakan adalah terciptanya lapangan kerja baru bagi tetangga maupun masyarakat yang menerima bantuan dana melalui kegiatan ekonomi bergulir untuk masyarakat kecil. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain meskipun hanya mampu memperkerjakan satu atau dua orang saja. Selanjutnya juga dengan adanya program ini melalui pelatihan-pelatihan, masyarakat mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan keahlian yang pernah didapat selama pelatihan berlangsung.

3. Manfaat Pribadi

Dengan adanya program ini masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha merasa sangat terbantu dari segi pendanaan. Untuk usaha sendiri mereka menjadi mendapatkan uang tambahan untuk modal usaha, mendapatkan pengetahuan tambahan dari mengikuti pelatihan. Sehingga mereka dapat mengasah kemampuannya dan mendapatkan uang tambahan yang bisa digunakan untuk sehari-hari.

4. Partisipasi dalam tahap Evaluasi Kegiatan

Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 62), Partisipasi dalam tahap evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Ikut memelihara dan melestarikan hasil yang telah di capai, dapat dilihat sebagai indikasi adanya dukungan positif anggota masyarakat terhadap apa yang dihasilkan. Karenanya, mudah diperkirakan hal tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Kaho, 2010: 129).

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa pada tahap ini partisipasi masyarakat sudah ada namun tidak menyeluruh. Partisipasi pada tahap ini berupa rapat-rapat yang dilaksanakan oleh masyarakat pada akhir tahun untuk *me-review* kegiatan yang sudah terlaksana apakah kegiatan yang berlangsung sudah memberikan hasil yang cukup bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat pada tahap ini juga dengan cara merawat, menjaga, melestarikan serta memelihara hasil kegiatan yang selama ini berlangsung, agar mampu digunakan untuk jangka waktu yang lama. Karena tahap evaluasi merupakan tahap terakhir, maka masyarakat harus mampu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang selama ini berlangsung, namun pada pembuatan laporan, partisipasi masyarakat terbilang cukup rendah. Laporan tersebut sangat penting untuk dibuat dan harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah. Untuk itu masyarakat perlu bantuan pendampingan dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban.

Pada tahap evaluasi kegiatan, partisipasi masyarakat berada pada tingkatan *Self Management* menurut Peter dalam Dwiningrum, (2011:65), dimana tahap ini merupakan puncak dari partisipasi masyarakat. Mereka berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian. Serta mampu memelihara hasil kegiatan yang selama ini berlangsung agar terus dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama.

Jika dilihat dari tahapan-tahapan partisipasi sebelumnya, sudah menggambarkan bahwa hampir semua tahapan masyarakat berpartisipasi. Secara keseluruhan partisipasi masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan cukup baik dan partisipasi masyarakat menurut peneliti tergolong partisipasi dengan tipologi kemitraan. Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar yakni kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun *monitoring* atau evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan.

Faktor yang menjadi Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

Menurut Suharto (2009:8) keterlibatan masyarakat sangat penting karena menurutnya masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan mereka sendiri karena tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan mereka sendiri. Tingkat kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan pemberdayaan juga melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. Wrihatnolo dan Nugroho (2007: 68) untuk menciptakan program dengan konsep pembangunan masyarakat membutuhkan sumber daya manusia yang baik dan sumber daya yang cukup.

PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan suatu program yang menggunakan konsep pembangunan masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliawi juga menghadapi kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Keterbatasan Dana

Dwiningrum, (2011:57) menyebutkan salah satu faktor yang menjadi penghambat partisipasi karena ekonomi masyarakat atau keterbatasan dana. Masyarakat kelurahan Kaliawi bukan merupakan masyarakat yang berekonomi menengah keatas, sehingga mereka tidak berpartisipasi berupa dana, sehingga hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja.

Dana atau anggaran pembangunan merupakan satu hal yang penting dalam proses menstimulasi pemberian pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah dana yang diberikan melalui anggaran APBN dan APBD yang diberikan melalui rekening LKM dan baru dicairkan kepada KSM per RT di kelurahan Kaliawi. Karena anggaran tersebut dibagi-bagi per-RT dengan jumlah yang berbeda-beda sehingga jumlah anggaran yang diberikan untuk melakukan kegiatan belumlah tercukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena hanya mengandalkan dana dari pemerintah sehingga masyarakat hanya mengelola dana tersebut agar cukup memenuhi kebutuhan dengan memilih kegiatan ataupun pembangunan yang dianggap masyarakat kelurahan Kaliawi sangat dibutuhkan. Belum lagi pencairan dana yang dibagi menjadi tiga tahap pencairan, sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu pencairan dana selanjutnya dan hal ini berdampak pada sempat terhenti sementara pembangunan untuk menunggu pencairan dana selanjutnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa pencairan dana yang dibagi menjadi tiga tahap dan pelaksanaannya harus menunggu pencairan dana untuk selanjutnya hal tersebut berdampak pernah terjadi pembangunan yang sempat terhenti sementara karena menunggu dana pemerintah yang belum cair sehingga pembangunan harus menunggu pencairan dana selanjutnya.

2. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

Kondisi masyarakat yang menjadi pelaku kegiatan tidak dapat dilepaskan dari proses dan pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara, masih ada masyarakat kelurahan Kaliawi yang menganggap bahwa PNPM Mandiri Perkotaan

merupakan sebuah proyek bukanlah kebijakan dari pemerintah. Pemikiran demikian harus dihapus dan dihilangkan dengan melakukan sosialisasi yang cukup lama agar pemikiran seperti itu dapat dihilangkan dari masyarakat.

Karena pemikiran yang menganggap bahwa program ini merupakan proyek dari pemerintah, membuat mereka kurang berpartisipasi dalam sosialisasi kegiatan. Hal demikian yang menghambat pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan belum lagi hambatan berupa faktor alam yang tidak mendukung seperti musim hujan. Sehingga kegiatan yang sedang berlangsung dilaksanakan menjadi terhambat dan menunggu hujan reda atau dilanjutkan keesokan harinya. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dipicu karena masyarakat menganggap bahwa PNPM Mandiri Perkotaan sebagai proyek bukan merupakan kebijakan dan juga kurangnya partisipasi dalam sosialisasi kegiatan karena tingkat kesadaran masyarakat yang kurang. Penghambat lainnya yang terjadi pada saat pelaksanaan yaitu faktor alam yang kurang mendukung.

3. Lemahnya Pemahaman Masyarakat

Lemahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur maupun tahapan pelaksanaan kegiatan yang terjadi dikarenakan ketidakikutsertaan masyarakat pada saat sosialisasi berlangsung. Salah satunya dalam pembuatan pembukuan administrasi. Masyarakat tidak dapat dibiarkan sendiri menyusun pembukuan tanpa didampingi. Padahal membuat pembukuan administrasi merupakan salah satu agenda penting dalam suatu kegiatan untuk dilakukan.

Selain itu juga, yang menjadi penyebab lemahnya pemahaman masyarakat karena tidak semua masyarakat memiliki dan mendapatkan pendidikan yang cukup sehingga dalam pembuatan laporan keuangan kurang baik dan benar, perlu dibimbing pelan-pelan agar hal seperti ini tidak lagi terjadi yang menjadikan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat dalam pembuatan pembukuan administrasi dikarenakan ketidakikutsertaan masyarakat pada saat

sosialisasi berlangsung. Penyebab lemahnya pemahaman masyarakat karena tidak semua masyarakat memiliki dan mendapatkan pendidikan yang cukup.

4. Kesibukan Masyarakat

Menurut Dwiningrum, (2011:57), yang menjadi faktor penghambat dalam partisipasi adalah sifat malas, apatis, masa bodo dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat, sehingga mengakibatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan menjadi tidak menyeluruh.

Ketidakterlibatan masyarakat di kelurahan Kaliawi terhadap PNPM Mandiri Perkotaan dikarenakan kesibukan masyarakat untuk meluangkan waktu. Dengan banyaknya masyarakat di kelurahan Kaliawi yang berprofesi sebagai buruh, sehingga mereka sulit untuk meninggalkan pekerjaannya. Meskipun banyak yang berprofesi sebagai buruh, namun masih ada juga yang mau ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Di beberapa wilayah dikatakan cukup baik dan antusias partisipasi masyarakat dalam menyambut program ini, namun disebagian wilayahnya lagi juga sulit untuk membangun partisipasi masyarakat. Seperti di wilayah perumahan, yang memiliki kondisi ekonomi menengah atas.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa disemua wilayah pasti ditemui masyarakat yang sulit untuk diajak berpartisipasi, karena memiliki kesibukan yang tidak dapat meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Hal tersebut menjadikan pelaksanaan program ini menjadi terhambat dan dibutuhkan kembali sosialisasi untuk menyadarkan mereka bahwa bagaimanapun partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kemajuan wilayahnya untuk itu perlu melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan ditengah-tengah kesibukan yang padat.

Kesibukan masyarakat untuk meluangkan waktu untuk ikut serta berpartisipasi karena mereka sulit untuk meninggalkan pekerjaannya. Meskipun ada juga yang mau meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Bagaimanapun partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kemajuan wilayahnya untuk itu perlu melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan ditengah-tengah kesibukan yang padat.

Implementasi Program Gema Sewu Bersenyum Manis: Studi Kasus 2

1. Partisipasi Dalam Tahap Perencanaan

Partisipasi dalam tahap perencanaan maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan. Hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam tahap ini adalah memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan yang diadakan (Ericson dalam Slamet, 2003). Adapun yang dilakukan oleh Desa Parerejo ketika mendapatkan dana dari Program Gemma Sewu Bersenyum Manis adalah mengadakan pertemuan untuk musyawarah tingkat desa. Dalam musyawarah tersebut banyak masyarakat yang memberikan usulan terkait penggunaan dana. Selain itu musyawarah juga bertujuan untuk mencari dan menentukan orang-orang yang akan menjadi pengurus Pokmas. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertera dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program bahwasannya untuk dapat menerima bantuan dana, suatu desa harus membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) terlebih dahulu. Namun dalam kenyataannya di Desa Parerejo masih ada aparatur desa yang ditunjuk sebagai Ketua Pokmas. Ia adalah Bapak A. Marbulen, selaku Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan. Pemilihan Bapak A. Marbulen sebagai Ketua Pokmas dikarenakan tidak ada yang mau mengajukan diri sebagai ketua dan masyarakat sudah percaya dengan kinerja Bapak A. Marbulen sehingga masyarakat memilih beliau sebagai ketuanya.

Berdasarkan hasil musyawarah, untuk kegiatan ekonomi kerakyatan bantuan dana ditujukan untuk mengembangkan usaha yang telah ada maupun membuat usaha baru sesuai potensi yang dimiliki individu maupun sumber daya alamnya. kegiatan ekonomi kerakyatan, usaha yang dipilih adalah usaha batu bata dan budidaya ikan gurame. Pemilihan dua usaha ini dikarenakan usaha batu bata dipandang memiliki prospek yang bagus dan banyak juga masyarakat yang berprofesi sebagai pembuat batubata, sedangkan budidaya ikan dipilih karena banyak kolam-kolam besar yang dimiliki masyarakat dan tidak dipergunakan.

Adapun orang-orang yang menjadi anggota dari kelompok usaha ini adalah mereka-mereka yang telah lama berprofesi sebagai

pembuat batu bata dan memiliki kolam ikan. Artinya mereka benar-benar telah siap untuk menjalankan kegiatan ekonomi kerakyatan. Namun, meskipun mereka tergabung dalam suatu kelompok, pada pelaksanaannya dilakukan secara individu. Misalnya untuk usaha batu bata, anggota dari kelompok ini memproduksi batu bata di rumah mereka masing-masing, bukan secara berkelompok pada tempat yang sama. Begitu pula dengan budidaya ikan gurame, tidak ditempatkan pada satu areal melainkan di kolam masing-masing anggota. Keseriusan untuk menjalankan kegiatan ini merupakan modal penting karena usaha batu bata dan budidaya ikan gurame ini disebut juga sebagai usaha mikro atau usaha kecil yang merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan.

Setelah musyawarah desa dilakukan, adalagi musyawarah lanjutan yang diadakan untuk tingkat dusun. Musyawarah ini sudah fokus untuk membicarakan ekonomi kerakyatan. Musyawarah ini dilakukan oleh pengurus Pokmas serta kelompok yang telah terpilih. Musyawarah ini idealnya diikuti oleh seluruh anggota dari kelompok usaha mengingat kehadiran mereka juga dibutuhkan untuk memberikan usulan, saran maupun kritikan. Namun dalam pelaksanaannya justru anggota kelompok usaha tidak diikutsertakan dalam musyawarah tersebut bahkan ada anggota yang sama sekali tidak tahu mengenai program Gemma Sewu Bersenyum Manis namun ia mendapatkan dana bantuan usaha. Anggota ini hanya mendapatkan informasi dari Ketua RT setempat bahwa ada bantuan dana dari pemerintah untuk usaha tanpa dilibatkan dalam musyawarah. Hal ini tidak menjadi masalah bagi anggota karena bagi mereka kegiatan musyawarah hanya Akan menyita waktunya untuk bekerja. Bagi mereka yang terpenting adalah mendapat bantuan usaha.

Namun tentu saja hal ini akan tidak sesuai dengan tujuan program yang menitikberatkan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, menurut Conyers (1991: 154-155) partisipasi masyarakat penting untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat. Jadi seharusnya anggota diundang dalam musyawarah tersebut agar nantinya anggota mengetahui tujuan dari pemberian bantuan dana usaha, kegiatan yang akan dilakukan dalam program tersebut dan supaya melatih masyarakat untuk bersikap kritis serta terciptanya transparansi. Partisipasi masyarakat Desa Parerejo

dalam tahap perencanaan khususnya di bidang ekonomi kerakyatan jika dalam tangga patisipasi menurut Arstein dalam Dwiningrum (2011: 64) dapat dikatakan sebagai *non participation*. Pada tahap *non participation* masyarakat (yang tergabung dalam kelompok usaha) hanya dijadikan sebagai objek. Mereka tidak dilibatkan dalam musyawarah perencanaan kegiatan. Sementara untuk tingkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan menurut Prety dalam Syahyuti (2006) adalah partisipasi pasif atau manipulatif di mana ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah.

Adapun karakteristik dari bentuk partisipasi ini adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana kegiatan tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai kalangan profesional adalah pengurus Pokmas dan ketua dari masing-masing kelompok usaha. Hal ini dibuktikan dengan adanya musyawarah yang hanya dilakukan oleh orang-orang tersebut tanpa mengikutsertakan anggota kelompoknya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha tidak dapat berpartisipasi penuh dalam tahap perencanaan karena mereka (terutama anggota kelompok usaha) tidak dilibatkan dalam musyawarah. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan program yakni menekankan partisipasi masyarakat desa. Meskipun kegiatan ekonomi kerakyatan tidak melibatkan masyarakat banyak seperti layaknya bidang fisik namun dalam perencanaannya bukan berarti tidak melibatkan masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha karena hal ini akan menyalahi prinsip pelaksanaan program Gemma Sewu Bersenyum Manis poin ketiga yakni kegiatan yang akan dilakukan kelompok masyarakat merupakan kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan secara swadaya. Dalam prinsip tersebut telah jelas disebutkan bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan yang direncanakan, artinya perlu ada kegiatan perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah dan melibatkan orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut (kelompok usaha).

Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah maka salah satu prinsip dari program tersebut tidak tercapai. Prinsip tersebut adalah kreatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program atau kegiatan yang direncanakan mengedepankan pemikiran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah maka kreatifitas akan sulit dicapai mengingat pada prinsip ini mengedepankan pemikiran yang dimulai dari perencanaan.

Kreatifitas yang muncul dari kegiatan perencanaan ini akan mempengaruhi partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan seharusnya juga membahas mengenai alternatif-alternatif yang dapat dilakukan ketika dalam pelaksanaan kegiatan mengalami permasalahan. Misalnya untuk usaha budidaya ikan gurame, ketika musim kemarau tiba maka mereka harus memanen lebih awal ikan tersebut dan tentu saja dengan harga jual yang lebih murah. Hal ini tentu akan merugikan anggota. Oleh karena itu, dalam tahap perencanaan perlu melibatkan anggota dalam musyawarah karena anggota mungkin saja dapat memberikan saran-saran terkait penanggulangan masalah tersebut yang nantinya dapat meminimalisir kerugian anggota. Selain itu menurut Soleh (2014: 113), partisipasi masyarakat dalam perencanaan berpengaruh besar terhadap kesuksesan suatu program pembangunan. Hal ini dikarenakan pada tahap perencanaan, masyarakat diberikan diskresi untuk ikut mengambil keputusan dalam merencanakan apa yang ingin mereka bangun sehingga menjadikan mereka sebagai subjek bukan sekedar objek dari pembangunan.

2. Partisipasi Dalam Tahap Pelaksanaan

Partisipasi dalam tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material serta ide-ide dalam pekerjaan tersebut (Slamet, 2003). Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok usaha adalah membelanjakan dana bantuan yang ada untuk kegiatan produksi. Namun dana yang ada tentu saja tidak cukup untuk membeli bahan baku karena memang dana tersebut sifatnya sebagai stimulan.

Oleh karena itu, anggota dari kelompok ini melakukan swadaya untuk memenuhi ataupun menutupi kekurangan dari biaya produksi

tersebut. Selain swadaya, anggota juga melakukan peminjaman uang kepada tengkulak batu bata. Selain meminjam uang kepada tengkulak, terkadang ada pihak penyuplai bahan baku yang menawarkan kepada pembuat batu bata untuk menggunakan dahulu bahan baku yang mereka punya dan nantinya dikembalikan dengan batu bata. Menurut Holil dalam Rukminto (2007: 21), bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa:

a. Tenaga

Partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan program. Partisipasi tenaga dalam usaha batu bata dapat dilihat bahwa anggota dari kelompok ini tidak mendapatkan bayaran ataupun upah selama proses pembuatan batu bata. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya produksi. Begitu pula dengan usaha budidaya ikan gurame.

b. Uang

Merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini berupa pemberian sejumlah uang untuk menambah modal yang telah ada yang akan digunakan untuk biaya produksi. Untuk usaha batu bata, anggota melakukan swadaya sebesar Rp. 500.000; per orangnya.

c. Harta benda

Merupakan bentuk partisipasi dengan menyumbang harta benda, biasanya berupa alat kerja atau perkakas. Untuk usaha batu bata, partisipasi harta bendanya berupa alat mencetak batu bata, lantai jemur, serta tempat pembakaran. Sementara untuk budidaya ikan gurame berupa kolam ikan.

Untuk usaha budidaya ikan gurame, adapun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan adalah melakukan budidaya ikan itu sendiri. Jika pada usaha batu bata, dana bantuan pengembangan usaha diberikan kepada ketua kelompok usaha kemudian disalurkan ke anggota kelompok. Namun lain halnya dengan usaha budidaya ikan gurame, anggota kelompok tidak menerima dana bantuan melainkan bibit ikan yang telah dibeli oleh Bendahara Pokmas. Anggota kelompok usaha ini tugasnya hanya

memberi makan dan merawat ikan yang ada. Adapun pakan yang digunakan adalah pakan alami (dedaunan).

Ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program menurut Cohen dan Hoff dalam Dwiningrum (2011: 62) antara lain:

a. Mengerakkan sumber daya dan dana

Sumber daya yang dimaksud dalam tahap pelaksanaan ini terdiri dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Untuk sumber daya alam, cara menggerakkannya adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berupa tanah dan juga air yang digunakan dalam proses pembuatan batu bata maupun budidaya ikan gurame. Daerah pinggiran desa yang berupa perbukitan membuat masyarakat setempat memanfaatkannya untuk bahan baku pembuatan batu bata. Eksplorasi tanah ini tidak hanya untuk lingkungan Desa Parerejo melainkan untuk dijual di desa-desa lain. Namun, tanah pegunungan yang dijadikan bahan baku pembuatan batu bata ini merupakan milik warga Blitarrejo. Warga Parerejo yang juga memiliki gunung justru tidak tertarik untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Selain tanah, areal persawahan yang memiliki banyak sumber air membuat masyarakat memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya untuk dibuat kolam ikan. Hal ini tentunya dapat menambah penghasilan serta meningkatkan gizi keluarga. Selain untuk budidaya ikan, kolam-kolam yang dibuat dapat digunakan untuk menampung air untuk proses pembuatan bahan batu bata yang dalam istilah bahasa Jawa disebut *ngluluh*.

Dengan adanya Program Gemma Sewu Bersenyum Manis ini membuat masyarakat yang tergabung dalam anggota kelompok usaha merasa sangat diuntungkan dan terbantu dari segi pendanaan untuk menjalankan usaha mereka. Dana bantuan ekonomi kerakyatan ini dapat menambah modal para pelaku usaha sehingga produksi mereka menjadi meningkat. Peningkatan produksi ini tentu saja akan menambah pemasukan atau penghasilan bagi anggotanya. Bantuan dana yang diberikan ini juga sangat membantu anggota mengurangi beban hutang kepada tengkulak batu bata ataupun penyedia bahan baku. Untuk usaha budidaya ikan gurame, bantuan ini sangat

membantu mereka untuk dapat mengisi lagi kolamnya dengan bibit ikan di mana sebelumnya kolam mereka tidak digunakan akibat tidak ada modal untuk membeli bibit ikan.

Selain sumber daya alam, sumber daya manusia merupakan komponen utama yang harus digerakkan demi keberhasilan pelaksanaan program ini. Penggerakkan sumber daya manusia dilakukan sejak perencanaan program yakni dengan mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk mengajak masyarakat memberikan pendapatnya dalam forum serta ikut aktif dalam kegiatan yang diadakan desa. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi kerakyatan, masyarakat banyak yang tergerak untuk ikut serta dengan mendaftarkan kelompok usahanya kepada Bendahara Pokmas. Namun, dana bantuan yang diberikan tidak cukup untuk semua kelompok usaha yang ada sehingga dilakukanlah seleksi.

Selain sumber daya alam dan sumber daya manusia, penggerakkan juga dilakukan pada dana. Dana bantuan yang diberikan kepada kelompok usaha harus digunakan sebagai mana mestinya yang dibuktikan dengan laporan yang dibuat pada akhir tahun. Adapun dana yang diberikan kepada kelompok usaha harus dikembalikan lagi kepada Bendahara Pokmas dengan jumlah yang sama sesuai dengan yang diberikan pada awalnya. Untuk menggerakkan dana bantuan ini, maka Pokmas berinisiatif untuk melakukan perguliran penggunaan dana. Misalnya tahun 2017 kelompok usaha “Mandiri Muda” dan “Tirta Wening”, namun untuk tahun berikutnya dibuka kesempatan bagi kelompok usaha lain untuk mendaftarkan kelompoknya. Jika memang tidak ada kelompok yang mendaftarkan diri maka kelompok awal boleh menggunakan dana tersebut kembali. Perguliran dana yang dicanangkan oleh Pokmas merupakan rencana yang bagus untuk memberdayakan dana yang ada. Selain itu, adanya perguliran dana ini sesuai dengan prinsip kebijakan Program Gemma Sewu Bersenyum Manis yakni prinsip berkelanjutan.

Menciptakan lapangan kerja baru tidak harus dengan menambah usaha yang telah dibangun oleh kelompok usaha yang sudah ada. Pengembangan usaha yang telah ada juga dapat

menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terekrut di dalamnya. Misalnya, usaha batu bata yang awalnya dilakukan secara perseorangan setelah dilakukan pengembangan maka usahanya akan menjadi lebih besar dan tentunya membutuhkan karyawan tambahan. Penambahan karyawan ini dapat menjadi lapangan kerja baru bagi orang yang sebelumnya tidak bekerja sebagai pembuat batu bata.

b. Kegiatan administrasi dan koordinasi

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi kerakyatan, ada perubahan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya yakni terkait laporan. Berdasarkan rencana sebelumnya, mekanisme laporan dilakukan setiap empat bulan sekali namun dalam pelaksanaannya berubah menjadi setahun sekali yang dilakukan pada akhir tahun. Padahal sudah jelas tertera dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program bahwasannya untuk kegiatan ekonomi kerakyatan Pokmas dan kepala desa harus memonitor perkembangan usaha tiap bulannya dan melaporkannya kepada pihak kecamatan dan kabupaten secara periodik.

Namun dalam pelaksanaannya tidak ada koordinasi lebih lanjut antara Pokmas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mengenai laporan kegiatan sehingga Pokmas melakukan pembukuan atas inisiatif sendiri agar bisa mengetahui perkembangan usaha dan bukti penggunaan dana. Pada dasarnya laporan kegiatan ini sangatlah penting guna mengetahui perkembangan usaha dari sebelum ada bantuan dana dan setelah adanya bantuan. Laporan ini dapat memberikan informasi adanya bantuan usaha menjadi meningkat atau justru sama saja. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terjadi silang pendapat antara pihak BPMPP dengan desa. Hal ini dapat terjadi lantaran lemahnya koordinasi akibat tidak menjalankan apa yang sudah menjadi aturan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program.

c. Penjabaran program

Program Gemma Sewu Bersenyum Manis merupakan program untuk masyarakat Pringsewu dalam upaya mempercepat pembangunan baik fisik maupun ekonomi. Untuk bidang ekonomi bertujuan untuk mendukung terbentuknya usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada. Untuk Desa Parerejo, dana bantuan ekonomi kerakyatan digunakan untuk pengembangan usaha yang telah ada. Usaha yang dilakukan di Desa Parerejo dilakukan dengan membentuk suatu kelompok.

Dengan berkelompok harapannya adalah usaha semakin berkembang dan pada akhirnya dapat merekrut tenaga kerja yang lebih banyak lagi sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Tapi dalam pelaksanaannya dilakukan secara individu jadi peluang untuk dapat mempekerjakan orang lain sangat sempit. Meskipun masih disebut sebagai usaha mikro, jika kelompok usaha ini mampu melibatkan banyak orang dalam usahanya maka hal ini akan selaras dengan apa yang disebut dengan ekonomi kerakyatan itu sendiri karena menurut Sumodiningrat dalam Anwas (2014: 124), ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan membangun usaha kecil ini berarti membangun ekonomi masyarakat banyak atau membangun ekonomi kerakyatan.

Selain pelaksanaannya yang dilakukan secara perorangan, hal lain yang membuat usaha ini akan sulit berkembang adalah usaha yang dilakukan masyarakat masih bersifat tradisional, berskala kecil dan sekedar *survive* untuk mempertahankan hidup (Kartasasmita dalam Anwas, 2014: 124). Artinya usaha yang dilakukan sebatas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja belum sampai pada tahap meningkatkan produksi yang lebih banyak untuk dijual secara luas dan pada akhirnya dapat melibatkan banyak tenaga kerja untuk bekerja di dalamnya. Jika pelaksanaannya seperti ini maka program belum dapat dijabarkan lebih luas lagi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Gemma Sewu Bersenyum Manis berada pada tingkat partisipasi

fungsional. Menurut Prety dalam Syahyuti (2006), dalam tingkat partisipasi fungsional masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek setelah ada keputusan-keputusan yang disepakati. Demikian halnya dengan masyarakat Desa Parerejo yang membentuk kelompok-kelompok usaha sebagai bagian dari program Gemma Sewu Bersenyum Manis terutama untuk bidang ekonomi kerakyatan berdasarkan keputusan-keputusan yang telah disepakati sebelumnya. Pada tingkat partisipasi fungsional, pada tahap awal tergantung pada pihak luar namun secara bertahap akan dapat menunjukkan kemandiriannya. Ketergantungan ini dapat dilihat dari segi pendanaan yang mana pada awalnya dibantu oleh pemerintah melalui Program Gemma Sewu Bersenyum manis untuk selanjutnya diharapkan bisa tetap berkembang dengan dana sendiri.

Tingkat partisipasi fungsional ini menunjukkan bahwa Desa Parerejo telah mampu melaksanakan program Gemma Sewu Bersenyum Manis, namun yang diharapkan dari program ini tentu saja bukan hanya kemampuan untuk melaksanakan tetapi juga menjadikan program ini sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Artinya kegiatan yang dilakukan dapat berkembang dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika suatu desa baru dapat melaksanakan program (dengan membentuk kelompok) tanpa ada kegiatan yang berkelanjutan maka prinsip berkelanjutan dalam prinsip-prinsip kebijakan program Gemma Sewu Bersenyum Manis belum dapat terealisasi.

Untuk dapat mencapai prinsip berkelanjutan, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dari fungsional menjadi mandiri. Partisipasi masyarakat yang mandiri terjadi ketika masyarakat mengambil inisiatif dan mengembangkan kontak untuk mendapatkan bantuan (dana). Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menurut Suyono dalam Anwas (2014: 96) dapat ditempuh dalam empat tahap, yakni:

a. Tahap awal

Pada tahap ini para pemimpin formal (kepala desa) juga pemimpin informal harus berperilaku yang dapat menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi karena perilaku ini akan menjadi contoh bagi pengikutnya atau masyarakat. Perilaku ini dapat

ditunjukkan dengan keaktifan kepala desa dalam menghadiri setiap acara yang diadakan masyarakat dan juga melibatkan masyarakat dalam musyawarah apapun yang berkaitan dengan kegiatan desa serta mengaktifkan kegiatan gotong royong untuk melatih masyarakat terlibat dalam kegiatan desa.

b. Tahap pembinaan

Pada tahap ini pembagian sasaran dilakukan secara jelas. Pembagian sasaran di sini berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan potensi masyarakat. Pada tahap pembinaan ini, masyarakat mendapat pembinaan berdasarkan potensi dan juga kebutuhannya dengan cara memberikan wadah ataupun tempat untuk menuangkan dan mengembangkan potensinya. Wadah tersebut dapat berupa kelompok masyarakat. Untuk kegiatan ekonomi kerakyatan, kelompok usaha yang telah terbentuk adalah kelompok usaha batu bata dan budidaya ikan. Kelompok ini perlu mendapatkan pembinaan agar dapat meningkatkan usahanya. Adapun pembinaannya dapat dilakukan melalui forum diskusi yang menghadirkan orang-orang yang telah berpengalaman dan berhasil dalam usaha tersebut.

c. Tahap pelembagaan atau pembudayaan

Pada tahap ini kelompok masyarakat beragam mulai dari yang tinggi, sedang maupun rendah. Pada tahap ini kegiatan kelompok mulai berjalan. Kelompok mulai menerapkan informasi yang telah mereka dapatkan dari tahap pembinaan.

d. Tahap umpan balik atau *reward*

Reward ini ditunjukkan untuk merangsang dan memberikan apresiasi kepada masyarakat. *Reward* ini penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat karena masyarakat merasa dihargai karya maupun usahanya.

Ketika tahap-tahap peningkatan partisipasi tersebut mampu dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parerejo maka tingkatan partisipasi masyarakat dapat meningkat dari fungsional menjadi mandiri. Ketika partisipasi masyarakat sudah mencapai tingkat mandiri maka apa yang menjadi prinsip dan tujuan dari program Gemma Sewu Bersenyum Manis akan tercapai. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi

dalam program ini. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan hanya dapat dilaksanakan oleh kelompok- kelompok tertentu. Jadi program ini belum dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat sehingga upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan ekonomi belum dapat terealisasi.

3. Partisipasi Dalam Tahap Pemanfaatan

Menurut Ericson dalam Slamet (2003), partisipasi dalam tahap pemanfaatan adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan dan berupa tenaga, uang untuk mengoperasikan serta memelihara proyek yang telah dibangun. Program Gemma Sewu Bersenyum Manis bukan merupakan suatu proyek. Program ini merupakan program unggulan Bupati Pringsewu untuk membangun daerahnya baik dari segi fisik maupun ekonomi. Untuk bidang ekonomi kerakyatan sendiri pelaksanaannya belum berakhir meskipun Program Gemma Sewu Bersenyum Manis sudah berakhir pada tahun 2017. Jadi pelibatan masyarakat dalam memanfaatkan hasil program belum dapat dilakukan baik berupa tenaga maupun uang. Lain halnya dengan bidang fisik yang bisa dinikmati hasilnya setelah pembangunan selesai dilaksanakan. Meskipun demikian, manfaat dari adanya program Gemma Sewu dalam bidang ekonomi kerakyatan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat.

Partisipasi dalam pemanfaatan menurut Cohen dan Hoff dalam Dwiningrum (2011: 62) tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, keberhasilan program ditandai dengan adanya peningkatan *output*. Meskipun kegiatan ekonomi kerakyatan belum berakhir, namun dalam pelaksanaannya dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah penjualan batu bata yang selalu meningkat dari pembakaran pertama hingga ketiga dalam kurun waktu satu tahun. Begitu juga dengan usaha budidaya ikan gurame yang juga mengalami peningkatan penjualan.

Untuk segi kuantitas, dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk prosentase keberhasilan belum dapat dihitung karena program ini belum selesai jadi belum dapat

dihitung secara keseluruhan. Seperti kelompok usaha budidaya ikan gurame misalnya masih harus menunggu pemanenan ikan untuk dapat mengetahui berhasil atau tidaknya program ini dalam tahap pertama. Dikatakan tahap pertama karena untuk tahun yang akan datang dana dari program ini akan bergulir untuk kelompok usaha selanjutnya. Dalam perencanaan, tidak dibahas mengenai target yang harus dicapai dalam melaksanakan program ini. Misalnya target harus menjual sekian ribu batu bata dan sekian kwintal untuk budidaya ikan gurame tiap tahunnya sehingga ketika program ini berjalan dan tahap pertama sudah selesai tidak dapat dikatakan sesuai target atau tidak karena memang dari awal tidak ada target yang harus dicapai. Hanya ada kesepakatan mengenai pengembalian dana bantuan saja.

Sementara menurut Uphof dalam Kaho (2010: 129), partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dapat dilihat dalam tiga segi, yaitu:

a. Manfaat material (*material benefit*)

Manfaat material yang dapat dirasakan anggota kelompok usaha dengan adanya program ini berupa peralatan. Pada saat pelaksanaan program, ada beberapa peralatan yang dibeli dan masih bisa dimanfaatkan atau digunakan misalnya seperti plastik yang digunakan sebagai penutup batu bata dan juga pagar kolam.

b. Manfaat sosial (*social benefit*)

Sesuai dengan prinsip program yakni prinsip produktif bahwa kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Manfaat sosial yang dapat dirasakan adalah terciptanya lapangan kerja baru bagi tetangga ataupun saudara dari anggota kelompok usaha yang menerima bantuan dana karena mereka akan menjadi tenaga kerja yang tentunya akan menambah penghasilan mereka walaupun jumlah tenaga kerja yang direkrut hanya satu atau dua orang saja. Selain itu, manfaat yang dirasakan masyarakat di luar anggota kelompok usaha adalah dengan adanya kelompok usaha batu bata maka masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai buruh pengangkut tanah bahan baku pembuatan batu bata merasa diuntungkan karena mereka dapat menjadi pemasok bahan baku yang tentu saja akan menambah penghasilan mereka.

c. Manfaat pribadi (*personal benefit*)

Dengan adanya program ini masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha merasa sangat terbantu dari segi pendanaan. Untuk usaha batu bata, anggota merasa diuntungkan karena dengan adanya bantuan ini modal mereka menjadi bertambah sehingga cukup untuk membeli bahan baku di mana sebelum adanya bantuan ini mereka seringkali berhutang kepada tengkulak karena modal yang tidak mencukupi. Konsekuensi dari berhutang ini mereka harus menjual batu bata kepada tengkulak tersebut yang terkadang harganya lebih murah dari harga pasaran. Dengan adanya penambahan modal ini tentu saja akan menambah jumlah produksi batu bata yang pada akhirnya akan menambah penghasilan.

Manfaat-manfaat yang telah dirasakan oleh anggota kelompok usaha maupun masyarakat dengan adanya program ini diharapkan kedepannya masyarakat lebih partisipatif lagi dalam menjalankan kegiatan di desa. Menurut Yadav dalam Totok dan Soebianto (2012: 82-84), pemerataan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan yang akan datang. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan adalah partisipasi vertikal. Partisipasi vertical menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011: 58) adalah partisipasi masyarakat yang terjadi dalam bentuk kondisi tertentu dimana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program atau dalam hal ini adalah program Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta masyarakat berada pada status pengikut ataupun pelaksana program tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Dalam Program Gema Sewu

Pada bidang ekonomi kerakyatan belum dapat dikatakan berhasil karena kegiatan ini masih berlangsung atau berjalan. Meskipun belum dapat dikatakan berhasil, namun dalam pelaksanaannya dapat dikatakan baik karena kegiatan ini dapat berjalan lancar hingga Program Gemma Sewu Bersenyum Manis selesai.

Kegiatan ekonomi kerakyatan ini dapat berjalan dengan baik tentunya karena ada faktor-faktor yang mendukung. Faktor tersebut berasal dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

1. Sumber daya manusia

a. Aparatur pemerintah desa

Menurut Najib dalam Huraerah (2011: 121-122), faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi salah satunya adalah faktor kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut dapat dari kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini kepemimpinan yang dimaksud berasal dari pemerintah desa atau aparatur desa.

Aparatur pemerintah desa terutama kepala desa merupakan gerbang pertama masuknya informasi mengenai program Gemma Sewu Bersenyum Manis. Melalui kepala desalah masyarakat akan dapat mengetahui program tersebut. Aparatur yang responsif akan mempengaruhi pelaksanaan program tersebut mengingat sebelum program dilaksanakan kepala desa harus berkoordinasi secara aktif dengan BPMPP sebagai badan yang mengurus program ini.

b. Pokmas

Peranan masyarakat yang tergabung dalam pengurus kelompok masyarakat (Pokmas) dapat dikatakan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesanggupan mereka ketika dipilih untuk menjadi pengurus Pokmas yang tentu saja memiliki tugas yang banyak. Mereka harus membagi waktu untuk bekerja, untuk keluarga dan juga untuk Pokmas.

Pengurus Pokmas khususnya ketua dan bendahara harus pulang pergi menghadiri rapat baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Selain itu, meskipun jabatannya sebagai Bendahara Pokmas namun dalam pelaksanaannya juga sebagai sekretaris karena orang yang ditunjuk sebagai Sekretaris tidak menyanggupi untuk urusan pembukuan. Jadi semua urusan pembukuan dilakukan oleh Bendahara Pokmas. Pembukuan bukan merupakan hal yang mudah mengingat anggota dari kelompok usaha tidak pernah mencatat pengeluaran yang telah dilakukan

sehingga ketika akan melakukan pencatatan harus mengingat-ingat lagi apa untuk apa saja dana tersebut digunakan. Meskipun itu semua memang merupakan kewajiban Pokmas untuk membantu kelompok usaha namun jika tidak didasari dengan rasa tanggung jawab maka akan sulit bagi kelompok usaha untuk menjalankan program ini dengan baik.

Semua dilakukan Pokmas dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan nantinya masyarakat mau berpartisipasi dalam pembangunan di desa. Ketika masyarakat merasa terbantu, maka harapannya ketika ada pembangunan di desa masyarakatpun akan ikut membantu (berpartisipasi). Pengurus Pokmas berusaha keras demi keberhasilan pelaksanaan program mengingat program ini sangat baik untuk melatih masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan desa.

Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan program ini maka Pokmas harus dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun menurut Najib dalam Huraerah (2011: 121-122), ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat yakni:

- a. Untuk kepentingan siapa partisipasi tersebut dilaksanakan, apakah untuk kepentingan masyarakat atau pemerintah. Tujuan dari adanya Program Gemma Sewu Bersenyum Manis adalah meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Semangat gotong royong ini akan tercipta apabila masyarakatnya mau berpartisipasi. Jadi jelas bahwa partisipasi disini untuk kepentingan masyarakat.
- b. Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, daerah atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah yang memegang kendali cenderung lebih berhasil karena cenderung mengetahui permasalahan, kondisi dan kebutuhan masyarakat
- c. Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan.
- d. Regulasi yang dibuat dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan di Desa Parerejo adalah aturan mengenai waktu pengembalian

dana bantuan serta adanya surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana bantuan sebagaimana mestinya dari kelompok usaha.

- e. Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat setelah berpartisipasi.

Banyaknya kelompok usaha yang mendaftarkan dirinya untuk menerima dana bantuan membuat Pokmas harus melakukan seleksi guna menemukan kelompok usaha yang benar-benar membutuhkan dana bantuan tersebut. Adapun yang menjadi penilaian adalah telah memiliki lokasi atau tempat usaha dan juga perekonomian dari anggotanya. Mereka yang memiliki perekonomian yang rendah akan menjadi prioritas untuk menerima dana bantuan tersebut.

- a. Sumber daya alam

Selain sumber daya manusia, faktor lain yang mendukung pelaksanaan program ini adalah faktor sumber daya alam. Desa yang subur dengan bukit-bukit di sekitaran desa membuat masyarakat desa banyak yang memanfaatkan tanah bukit untuk bahan baku pembuatan batu bata. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mencari bahan baku sehingga dapat mengurangi ongkos untuk mencari bahan baku. Meskipun bukit-bukit dekat dengan pemukiman warga namun bukan berarti untuk mendapatkan tanah sebagai bahan baku batu bata adalah secara cuma-cuma. Masyarakat harus membeli namun tidak semahal jika membeli di tempat yang jauh. Oleh karena itu, usaha batu bata ini penting untuk dikembangkan. Dengan adanya bantuan dana dari Program Gemma Sewu Bersenyum Manis membuat Pokmas tertarik untuk menyalurkan bantuan ini kepada kelompok usaha batu bata. Kelompok ini dipandang akan berhasil melaksanakan program mengingat kelompok ini akan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki desa.

Selain dekat dengan bukit yang tanahnya dapat digunakan sebagai bahan baku batu bata, faktor lain yang mendukung program ini adalah wilayah desa yang sebagian besar areal persawahan. Areal ini tentu saja memiliki sumber mata air yang banyak. Oleh karena itu masyarakat memanfaatkannya

dengan membuat kolam-kolam besar untuk budidaya ikan. Namun, ketika perekonomian sedang sulit, masyarakat kesulitan untuk membeli bibit ikan. Dampaknya kolam ikan tidak difungsikan. Hal ini menjadi perhatian bagi Pokmas untuk dapat memanfaatkan kembali kolam yang tidak digunakan untuk budidaya ikan gurame. Pemilihan ikan ini karena ikan tersebut tidak terlalu rumit untuk merawatnya dan harganya yang cukup tinggi pada saat itu (Hutagalung, 2015).

Kondisi demikian membuat Pokmas ingin membagikan dana yang pada awalnya hanya untuk kelompok usaha batu bata. Dana bantuan sebesar Rp.10.000.000; diberikan untuk dua kelompok masyarakat, yakni Rp.6.000.000; untuk kelompok usaha batu bata dan Rp.4.000.000; untuk kelompok usaha budidaya ikan gurame. Dengan adanya dana bantuan ini membuat anggota kelompok usaha budidaya ikan gurame dapat memfungsikan lagi kolamnya karena mereka mendapatkan bantuan bibit ikan. Dengan difungsikannya kolam ikan maka akan ada penghasilan tambahan bagi anggota kelompok usaha. Kondisi ini tentu saja akan sangat membantu perekonomian.

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Program Gemma Sewu Bersenyum Manis. Faktor tersebut antara lain pemahaman masyarakat, dana, air dan juga mekanisme laporan kegiatan.

b. Pemahaman masyarakat

Meskipun sudah diadakan musyawarah tingkat desa untuk mensosialisasikan Program Gemma Sewu Bersenyum Manis namun ternyata tidak semua masyarakat paham akan program ini. Ada masyarakat yang menganggap bahwa Program Gemma Sewu Bersenyum Manis merupakan suatu proyek jadi mereka berasumsi bahwa yang melaksanakan program tersebut adalah orang-orang tertentu, bukan mereka. Kondisi ini membuat masyarakat merasa bahwa program tersebut bukan untuk kepentingan mereka. Padahal program ini adalah program yang mengedepankan partisipasi masyarakat setempat. Adapula masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui Program Gemma Sewu Bersenyum Manis padahal Ia merupakan anggota dari kelompok usaha yang mendapatkan bantuan dana dari

kegiatan ekonomi kerakyatan. Menurut Solekhan (2012) kondisi ketidaktahuan tersebut akibat terbatasnya ruang partisipasi masyarakat.

Ruang partisipasi merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan (program). Meskipun telah dibuat forum untuk musyawarah antara Pokmas dengan kelompok usaha namun dalam kenyataannya anggota kelompok usaha tidak diikutsertakan dalam forum tersebut. Akibatnya mereka tidak tahu apa itu Program Gemma Sewu bersenyum Manis. Mereka hanya mengetahui akan ada bantuan dana dari pemerintah untuk usaha mereka.

c. Dana

Dana bantuan ekonomi kerakyatan sebesar Rp.10.000.000; dirasa masih kurang bagi kelompok usaha. Bagi mereka, jika dana lebih banyak lagi maka produksi mereka bisa lebih banyak dan penghasilan mereka akan bertambah. Kurangnya dana ini karena dana sebesar Rp.10.000.000 dibagi untuk dua kelompok usaha. Untuk usaha batu bata, dana sebesar Rp.6.000.000 masih dibagi lagi untuk anggota sehingga dana ini hanya cukup untuk membantu pembelian bahan baku.

Ketika batu bata belum terjual maka pembuat batu bata akan kesulitan lagi untuk membeli bata untuk produksi berikutnya dan pada akhirnya harus berhutang kepada tengkulak ataupun penyedia bahan baku (tanah). Oleh karena itu penambahan modal untuk ekonomi kerakyatan sangat diperlukan untuk mengembangkan lagi usaha yang telah ada. Penambahan modal dapat berasal dari dana desa ataupun dari pihak kabupaten Pringsewu untuk segera merealisasikan dana bantuan sebagai penghargaan yang pernah dijanjikan sebelumnya.

d. Air

Air merupakan komponen penting untuk usaha budidaya ikan gurame. Tanpa adanya air usaha ini akan terhenti. Ketika musim kemarau tiba, air di kolam akan mengalami penyusutan bahkan mengering. Hal ini tentu saja akan merugikan usaha budidaya ikan gurame karena anggota kelompok usaha ini harus

memanen lebih awal ikan mereka. Padahal usia ikan belum siap untuk dipanen. Dampaknya adalah bobot yang kurang dan juga harganya yang murah. Bantuan yang diterima kelompok usaha ini adalah berupa bibit ikan, jadi ketika terjadi kekeringan anggota harus mengeluarkan dana sendiri untuk pengecoran air. Namun ketika anggota tidak ada biaya untuk menambah air maka pilihannya adalah menghentikan sementara budidaya ikan dan menitipkan ikan pada kolam yang masih ada airnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan kolam yang mengakibatkan penghentian budidaya, maka sebaiknya kelompok usaha menyiapkan terpal untuk kemudian dibuat kolam. Kolam dari terpal ini akan lebih tahan lama untuk menyimpan air daripada kolam galian tanah. Meskipun harus mengeluarkan dana lebih untuk pembelian terpal namun usaha budidaya ini akan dapat berlanjut dan tentunya akan tetap memberikan penghasilan bagi kelompok usaha dibandingkan dengan menghentikan budidaya yang tentunya tidak akan memberikan penghasilan.

e. Lemahnya koordinasi laporan kegiatan

Tahap akhir dari suatu kegiatan adalah melaporkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini akan dapat diketahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan yang telah dilaksanakan atau tercapai tidaknya tujuan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut laporan kegiatan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Namun, untuk kegiatan atau program sebesar Program Gemma Sewu Bersenyum Manis, koordinasi untuk laporan kegiatannya sangatlah lemah terutama untuk bidang ekonomi kerakyatan. Padahal laporan ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dari sebelum diadakan program hingga program tersebut selesai. Laporan ini akan dapat menggambarkan berhasil atau tidaknya pemberian bantuan langsung kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka.

Rangkuman

Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa(1). Tenaga, Partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan program. (2). Uang, merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan, (3). Harta benda, merupakan bentuk partisipasi dengan menyumbang harta benda, biasanya berupa alat kerja atau perkakas. Kegiatan pemberdayaan ini dapat berjalan dengan baik tentunya karena ada faktor-faktor yang mendukung. Faktor tersebut bisa berasal dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

PENUTUP

Tugas/Tes formatif

Mahasiswa diharapkan dapat menjawab soal latihan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat pada beberapa program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa langkah, jelaskan hal tersebut?
2. Sebutkan dan jelaskan tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat?

RUJUKAN

1. Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar.
2. Nurcholis, H. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Grasindo.
3. Anwas, M. (2014). *Oos. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

BAB VI

Partisipasi Berbasis Perilaku Bagi Program Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat

Bab ini menjelaskan variabel dan elemen yang membangun model partisipasi masyarakat berbasis perilaku, khususnya dalam program-program partisipatif.

Relevansi Isi Bab

Bab ini memiliki relevansi dengan penjelasan tentang partisipasi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan perencanaan komunitas. Dari bab ini mahasiswa dapat memahami keterkaitan beberapa konsep tersebut dan implementasinya dalam penyelenggaraan program partisipasi.

Indikator

Setelah mempelajari bab ini maka dapat diketahui:

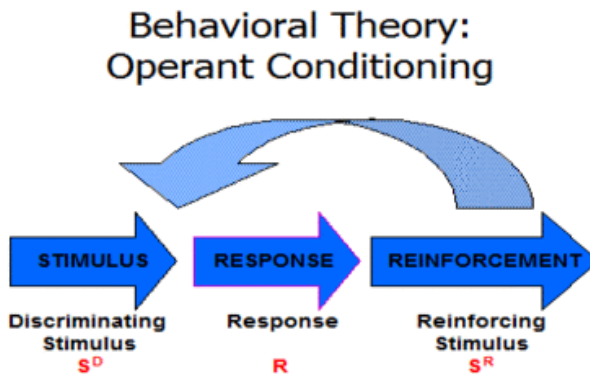
1. Mahasiswa dapat menjelaskan variabel dan elemen dalam membangun model partisipasi masyarakat berbasis perilaku masyarakat,
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang proses dan kendala dalam implementasi program pemberdayaan berbasis community engagement.

PENYAJIAN

Pengertian Perilaku menurut beberapa ahli

Menurut Geller (2001), perilaku mengacu pada tingkah laku atau tindakan individu yang dapat diamati oleh orang lain. Dengan kata lain, perilaku adalah apa yang seseorang katakan atau lakukan yang merupakan hasil dari pikirannya, perasaannya, atau diyakininya. Perilaku manusia menurut Dolores dan Johnson (2005 *dalam* Anggraini, 2011) adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Perilaku seseorang dapat dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang.

Notoatmodjo (2007) mengatakan bahwa dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Dengan demikian, perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Skinner, merumuskan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsang (stimulus) dan tanggapan dan respon. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut dengan teori “S-O-R” atau “*Stimulus-Organisme-Respons*”.



Gambar 1. Teori Perilaku (Skinner, 1990)

1. Faktor Penentu Perilaku Seseorang

Meskipun perilaku adalah bentuk respons atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar organisme (orang), namun dalam memberikan respon sangat tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa meskipun stimulusnya sama bagi beberapa orang, namun respons tiap-tiap orang berbeda (Notoatmodjo, 2007). Faktor penentu perilaku terbagi atas 2 bagian:

- a. Faktor internal, yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat bawaan dan berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar, misalnya tingkat pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi, jenis kelamin, dan sebagainya.
- b. Faktor eksternal, meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non-fisik, seperti iklim, manusia, sosial, budaya, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering merupakan faktor yang dominan mewarnai perilaku seseorang.

Jadi, pada dasarnya perilaku manusia dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Perilaku berbeda dengan tindakan atau aksi. Tindakan atau aksi merupakan tindakan mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif.

2. Teori Perubahan Perilaku

Geller (2001) menyatakan bahwa untuk merubah perilaku-perilaku kritikal, maka fokus yang diperlukan adalah pada perilaku terbuka (*extrovert behavior*). Perubahan perilaku terjadi melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut terjadi dengan baik bila proses pembelajaran tersebut menghasilkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Pembelajaran tersebut mencakup tiga komponen, yaitu:

- a. Pembelajaran melibatkan perubahan
- b. Perubahan harus relatif permanen
- c. Perubahan menyangkut perilaku

Terdapat beberapa model dasar perubahan perilaku, yaitu:

a. *Classical Conditioning*

Maksudnya adalah merubah perilaku dengan memberikan *conditioned stimulus*, perubahan tersebut menghasilkan *conditioned response*. Penerapannya dalam perubahan perilaku adalah perilaku seseorang dapat berubah bila diberikan stimulus secara terus-menerus. Bila stimulus tersebut diberikan tidak terus-menerus, maka perubahan perilaku (*conditioned response*) tidak akan terjadi. Dalam penerapan program *Behavior Based Safety* (BBS), stimulus yang diberikan terus-menerus adalah melakukan observasi perilaku secara terus-menerus dan memberikan stimulus positif, pada akhirnya akan menghasilkan perubahan perilaku kerja aman (*conditioned response of safe behavior*).

b. *Operant Conditioning*

Maksudnya adalah merubah perilaku dengan menghubungkan akibat yang didapatkannya. Teori ini diperkenalkan oleh B.F. Skinner, seorang ahli psikologi dari Harvard, yang menyatakan bahwa orang berperilaku sedemikian rupa untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan atau untuk menghindari sesuatu yang tidak ia inginkan. Kecenderungan untuk mengulangi perilaku tertentu dipengaruhi oleh lemah-kuatnya *reinforcement* terhadap akibat yang didapatkan dari perilaku tertentu tersebut, oleh sebab itu, dikatakan *reinforcement* memperkuat perilaku dan akan menambah kecenderungan perilaku tertentu itu diulangi lagi.

Penerapannya dalam program BBS adalah bila dalam melakukan observasi perilaku kerja didapatkan pekerja telah melakukan pekerjaannya dengan benar dan aman, maka pekerja tersebut harus diberi *reinforcement* agar pekerja tersebut mengerti bahwa yang ia lakukan sudah benar dan aman sehingga perilaku kerja aman (*safe behavior*) akan diulangi terus. Bila perilaku kerja aman (*safe behavior*) ini terus diulang, maka kecelakaan kerja dan lingkungan dapat dicegah.

c. *Social Learning*

Maksudnya adalah merubah perilaku melalui pengaruh model. Orang dapat belajar dari mengamati apa yang terjadi pada

orang lain dan diajari sesuatu sedemikian rupa dari pengalaman langsung. Penerapannya dalam program BBS adalah komitmen dan partisipasi manajemen beserta para pimpinannya secara aktif dan nyata dalam implementasi program BBS untuk menjadi model yang akan diikuti oleh seluruh jajaran dibawahnya secara aktif. Hal ini dapat mengurangi *unsafe behavior* menjadi *safe behavior* dalam bekerja.

d. *Developing Job Pride Through Behavior Reinforcement*

Menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh efek yang didapatkannya. Efek yang negatif mengarah kepada kecilnya kemungkinan pengulangan perilaku. Sedangkan efek positif akan mengarah kepada pengulangan perilaku bertambah besar. Dalam prakteknya bila perilaku tertentu menghasilkan pengalaman yang negatif, misal mendapatkan hukuman, denda, menyakitkan, perasaan tidak menyenangkan dan lainnya yang negatif, maka perilaku tertentu itu cenderung untuk tidak diulangi lagi.

Bila perilaku itu mendatangkan pengalaman yang positif seperti penghargaan, kesenangan, hadiah, kepuasan, dan lainnya yang positif, maka perilaku tersebut cenderung untuk diulangi. *Behavior reinforcement* berbeda dengan penghargaan kepada pribadi pada umumnya. *Behavior reinforcement* secara jelas berhubungan dengan sesuatu yang spesifik yang telah dilakukan oleh orang itu (Bird and Gemain, 1990, dalam Geller, 2001).

Penerapannya dalam program BBS adalah penghargaan atau perhatian positif lainnya perlu diberikan terhadap orang yang melakukan kerja aman (*safe behavior*). Penghargaan ataupun perhatian positif tersebut diberikan terhadap sesuatu yang spesifik yang telah dilakukan oleh pekerja tersebut dengan aman. Pemberian hukuman akibat dari perilakunya tidak akan merubah perilaku secara permanen sebab perilaku tersebut berubah karena takut mendapat hukuman.

e. *Giving Feedback*

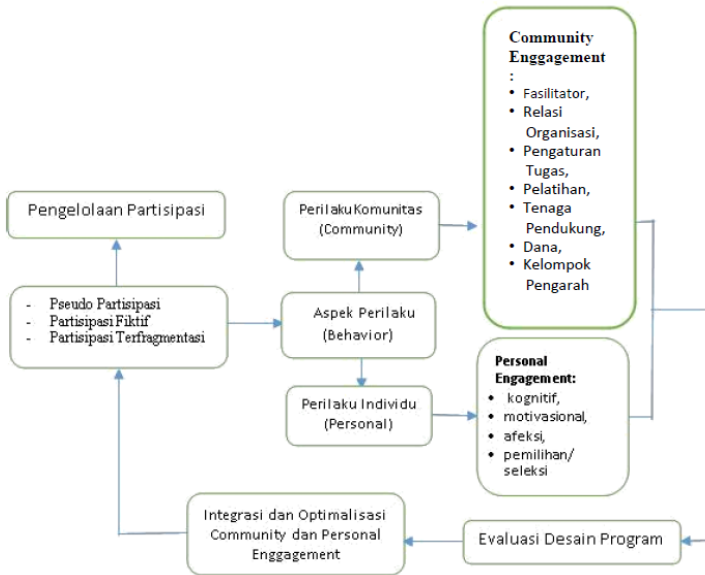
Proses perubahan perilaku memerlukan *feedback* sebagai mekanisme untuk meningkatkan kepekaan terhadap *error generating work habits*, terutama kekeliruan yang potensial

menimbulkan kecelakaan. Ada lima karakteristik *feedback*, yaitu:

- 1) *Speed*, lebih cepat *feedback* diberikan setelah terjadinya kekeliruan, lebih cepat pula tindakan perbaikan yang akan dilakukan. Selain itu, pekerja juga dapat belajar langsung dari kekeliruan tersebut.
- 2) *Specificity*, lebih tajam *feedback* difokuskan pada kekeliruan secara spesifik, maka akan lebih efektif hasilnya.
- 3) *Accuracy*, *feedback* harus teliti, kekeliruan pada *feedback* menimbulkan tindakan yang keliru.
- 4) *Content*, isi dari informasi yang akan disampaikan harus sesuai dengan perilaku yang diinginkan. Perilaku yang kompleks memerlukan elaborasi informasi lebih rinci.
- 5) *Amplitude*, *feedback* harus cukup menimbulkan perhatian terhadap pekerja, namun demikian *feedback* yang berlebihan dapat mengacaukan *performance* yang diinginkan.

Desain Model Partisipasi Masyarakat Berbasis Perilaku

Dari uraian tersebut maka dapat digambarkan model pengelolaan partisipasi berbasis perilaku sebagai berikut:



Gambar 2. Model Pengelolaan Program Berbasis Perilaku Masyarakat

Model ini bertujuan untuk mengintervensi desain program yang kurang berhasil menciptakan partisipasi masyarakat yang optimal dengan lebih memaksimalkan aspek perilaku individu dan kelompok masyarakat. Perilaku individu dan kelompok yang terpahami dengan baik oleh desain program akan mendorong daya terima dan arah penciptaan partisipasi menjadi lebih maksimal. Oleh karena itu, model ini perlu diuji melalui suatu eksperimen social yang mensimulasikan program dengan penguatan dimensi *engagement*.

Tipologi partisipasi yang muncul dalam pengelolaan program partisipasi masyarakat berada pada area non participation, risk taking dan kemitraan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh variasi implementasi program yang memiliki desain pelaksanaan berbeda. Pada program yang telah terancang baik, seperti PNPM Perkotaan telah mencapai tingkat kemitraan meskipun belum optimal menggerakkan partisipasi masyarakat. Sementara pada program yang tidak terdesain dengan baik, seperti program gema sewu bersenyum manis menunjukkan tingkat non participation disebabkan desain program yang lebih berorientasi proyek, sehingga aspek partisipasi tidak terbangun.

Kondisi partisipasi yang terjadi didorong juga oleh factor perilaku masyarakat yang terdiri dari tiga wujud factor, yaitu; (1). Kepercayaan atau kesempatan untuk berpartisipasi. Faktor pertama ini bisa dicermati dalam program gema bersewu manis yang berada pada tahap *non participation*, kondisi tersebut didorong oleh kurangnya kepercayaan atau kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi, (2). Kemampuan untuk berpartisipasi. Faktor kedua ini bisa dicermati dalam pelaksanaan program PNPM perkotaan, dimana masyarakat masih memiliki pemahaman yang lemah terhadap partisipasi dalam program tersebut sehingga pada akhirnya meskipun telah terjadi partisipasi dengan tipe kemitraan namun belum optimal, dan (3). Kemauan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang bersangkutan. Faktor ketiga ini bisa diamati terjadi dalam pelaksanaan program promosi kesehatan dimana masyarakat tertarik untuk berpartisipasi karena diyakinkan kepentingan mereka akan kondisi kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu dapat dipahami jika tingkatan partisipasi yang dicapai adalah pada tahap *risk taking*.

Model pengelolaan partisipasi berbasis perilaku dibangun dengan mengadopsi konsep *community engagement* dan *personal engagement*.

Pada dimensi individu, bangunan model partisipasi berbasis perilaku masyarakat terkait dengan konsepsi *personal resources* yang merupakan prediktor *work engagement*. Kata kunci dalam uraian tersebut adalah perlunya penguatan *self efficacy* dalam desain program partisipasi. Proses perilaku dalam *self-efficacy* yang turut berperan dalam diri manusia ada empat, yakni proses kognitif, motivasional, afeksi, dan proses pemilihan/seleksi. Keempat proses inilah yang kemudian perlu diakomodasi dalam desain program yang berbasis partisipasi masyarakat. Pada dimensi komunitas, pendekatan *community engagement* adalah serangkaian langkah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam menangani masalah, seperti membentuk koalisi, atau memfasilitasi lokakarya masyarakat. Dalam aspek *community engagement* pada desain program partisipasi, terdapat beberapa poin utama untuk memastikan keberhasilan penerapan model, yaitu; fasilitator, relasi organisasi, pengaturan tugas, pelatihan, tenaga pendukung, dana, dan kelompok pengarah.

Rangkuman

Faktor penentu perilaku terbagi atas 2 bagian, yaitu (a). Faktor internal, yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat bawaan dan berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar, misalnya tingkat pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi, jenis kelamin, dan sebagainya, dan (b). Faktor eksternal, meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non-fisik, seperti iklim, manusia, sosial, budaya, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering merupakan faktor yang dominan mewarnai perilaku seseorang.

Work engagement dapat disimpulkan sebagai cara pandang seseorang untuk termotivasi dan berhubungan dengan keadaan pemenuhan karyawan yang ditandai dengan energi dan resiliensi mental yang tinggi selama bekerja, rasa antusiasme, merasa penting serta bangga terhadap pekerjaan, dan fokus menikmati pekerjaan.

PENUTUP

Tugas/Tes Formatif

Diharapkan mahasiswa dapat menjawab soal latihan berikut:

1. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam *community engagement*?
2. Sebutkan dan jelaskan beberapa hasil mengenai manfaat *work engagement*?

3. Sebutkan dan jelaskan beberapa fungsi dari *self-efficacy*?

RUJUKAN

1. Anggraini, R. D. (2001). Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Sumber*, 21(23), 21-77.
2. Geller, E. S. (2001). Sustaining participation in a safety improvement process: 10 relevant principles from behavioral science. *Professional Safety*, 46(9), 24.
3. Notoatmodjo, S. (2007). Promosi kesehatan & ilmu perilaku.
4. Skinner, B. F. (1990). Can psychology be a science of mind?. *American psychologist*, 45(11), 1206.

BAB VII

Tinjauan Community Dan Self Engagement

PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat

Bab ini menjelaskan definisi, pengertian dan konsep community engagement serta self engagement yang bermanfaat dalam memahami pengelolaan program partisipatif.

Relevansi Isi Bab

Bab ini memiliki relevansi dengan penjelasan tentang motivasi diri dan kelompok, pengorganisasian masyarakat dan perencanaan komunitas. Dari bab ini mahasiswa dapat memahami keterkaitan beberapa konsep tersebut dan implementasinya dalam penyelenggaraan program partisipasi.

Indikator

Setelah mempelajari bab ini maka dapat dipahami:

1. Karakteristik penting dalam penelitian partisipatif berbasis masyarakat (CBPR)
2. Pengertian, lingkup dan karakteristik dari work engagement,
3. Pengertian, lingkup dan karakteristik self efficacy dan fungsinya

PENYAJIAN

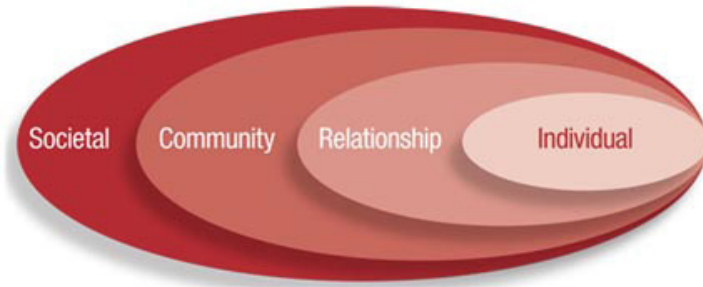
Tinjauan Konsep Community Engagement Dalam Program Partisipasi

Model ekologi sosial mengkonseptualisasikan kesehatan secara luas dan berfokus pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. Pendekatan luas untuk memikirkan kesehatan, yang maju dalam

Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia 1947, mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial (World Health Organization, 1947). Model sosial ekologi memahami kesehatan dipengaruhi oleh interaksi antara individu, kelompok / masyarakat, dan lingkungan fisik, sosial, dan politik (Israel et al., 2003; Sallis et al., 2008; Wallerstein et al., 2008; Wallerstein et al. 2003). Baik pendekatan keterlibatan masyarakat dan model ekologi sosial mengenali peran kompleks yang dimainkan oleh konteks dalam pengembangan masalah kesehatan serta keberhasilan atau kegagalan upaya untuk mengatasi masalah ini. Profesional kesehatan, peneliti, dan pemimpin masyarakat dapat menggunakan model ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor pada tingkat yang berbeda (individu, tingkat interpersonal, masyarakat, masyarakat; lihat Gambar 1.2) yang berkontribusi pada kesehatan yang buruk dan untuk mengembangkan pendekatan terhadap pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Itu termasuk tindakan di tingkat tersebut. Pendekatan ini berfokus pada pengintegrasian pendekatan untuk mengubah lingkungan fisik dan sosial daripada hanya memodifikasi perilaku kesehatan individu.

Stokols (1996) mengusulkan empat prinsip utama yang mendasari cara model ekologis sosial dapat berkontribusi terhadap upaya untuk melibatkan masyarakat: Status kesehatan, kesejahteraan emosional, dan kohesi sosial dipengaruhi oleh dimensi fisik, sosial, dan budaya lingkungan individu dan komunitas dan atribut pribadi (misalnya, pola perilaku, psikologi, genetika). Lingkungan yang sama mungkin memiliki dampak yang berbeda terhadap kesehatan seseorang tergantung pada berbagai faktor, termasuk persepsi kemampuan untuk mengendalikan lingkungan dan sumber keuangan. Individu dan kelompok beroperasi di berbagai lingkungan (mis., Tempat kerja, lingkungan sekitar, komunitas geografis yang lebih besar) yang “terbuang” dan saling mempengaruhi. Ada “titik leverage” pribadi dan lingkungan, seperti lingkungan fisik, sumber daya yang tersedia, dan norma sosial, yang memberi pengaruh penting pada kesehatan dan kesejahteraan.

Untuk menginformasikan program promosi kesehatannya, CDC (2007) menciptakan model empat level mengenai faktor-faktor yang didasarkan pada teori ekologi sosial, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 3. Model Ekologi Sosial (CDC, 2007)

Tingkat pertama model (paling kanan) mencakup biologi individu dan karakteristik pribadi lainnya, seperti usia, pendidikan, pendapatan, dan riwayat kesehatan. Tingkat kedua, hubungan, mencakup lingkaran sosial terdekat seseorang, seperti teman, pasangan, dan anggota keluarga, yang semuanya mempengaruhi perilaku seseorang dan berkontribusi pada pengalamannya. Tingkat ketiga, masyarakat, mengeksplorasi pengaturan di mana orang memiliki hubungan sosial, seperti sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar, dan berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik dari pengaturan ini yang mempengaruhi kesehatan. Akhirnya, tingkat keempat melihat faktor masyarakat luas yang mendukung atau mengganggu kesehatan. Contoh di sini mencakup norma budaya dan sosial dan kebijakan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial yang membantu menciptakan, memelihara, atau mengurangi ketidaksetaraan sosioekonomi antar kelompok (CDC, 2007; Krug et al., 2002).

Model CDC memungkinkan kemitraan yang melibatkan masyarakat untuk mengidentifikasi daftar faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan yang buruk dan mengembangkan pendekatan yang luas terhadap masalah kesehatan yang melibatkan tindakan di banyak tingkat untuk menghasilkan dan memperkuat perubahan. Misalnya, upaya untuk mengurangi obesitas pada anak dapat mencakup aktivitas berikut pada empat tingkat kepentingan:

Individu: Melakukan program pendidikan untuk membantu orang membuat pilihan bijak untuk meningkatkan asupan gizi, meningkatkan aktivitas fisik mereka, dan mengendalikan berat badan mereka. **Hubungan interpersonal:** Membuat klub berjalan dan bekerja dengan kelompok masyarakat untuk mengenalkan menu dan metode memasak yang sehat. **Promosikan kelompok berkebudayaan masyarakat.**

Komunitas: Bekerjasama dengan toko kelontong lokal dan toko serba ada untuk membantu meningkatkan jumlah buah dan sayuran segar yang mereka bawa. Menetapkan pasar petani yang menerima kupon makanan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat berbelanja di sana. Bekerjalah dengan kota atau daerah untuk mengidentifikasi jalan setapak, taman, dan lokasi di dalam rumah tempat orang bisa pergi berjalan, dan mempublikasikan situs-situs ini. Jika daerah membutuhkan tempat tambahan untuk berolahraga, bangun permintaan masyarakat dan lobi untuk area baru yang akan dibangun atau yang ditunjuk. Bekerja sama dengan pengusaha lokal untuk mengembangkan pilihan makanan yang lebih sehat di lokasi dan untuk menciptakan program kesehatan di tempat kerja lainnya.

Masyarakat: Advokat untuk berlalunya peraturan untuk (1) menghilangkan minuman ringan dan makanan ringan berkalori tinggi dari semua sekolah, (2) melarang penggunaan asam lemak trans dalam makanan restoran, atau (3) mengamankan bahwa persentase anggaran Untuk pemeliharaan jalan dan konstruksi dihabiskan untuk menciptakan jalur jalan kaki dan jalur sepeda. Perhatian jangka panjang terhadap semua tingkat model ekologi sosial menciptakan perubahan dan sinergi yang diperlukan untuk mendukung perbaikan kesehatan yang berkelanjutan.

Kontinum Active Community Engagement (ACE) memberikan kerangka kerja untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dan peran yang dimainkan masyarakat dalam mempengaruhi perubahan perilaku yang langgeng. ACE dikembangkan oleh tim proyek Akses, Mutu dan Penggunaan dalam Kesehatan Reproduksi (ACQUIRE), yang didukung oleh Badan Pembangunan Internasional AS dan dikelola oleh EngenderHealth dalam kemitraan dengan Adventist Development and Relief Agency International, CARE, IntraHealth International, Inc, Meridian Group International, Inc., dan Society for Women and AIDS di Afrika (Russell et al., 2008). Kontinum ACE didasarkan pada review dokumen, praktik terbaik, dan pelajaran yang dipetik selama proyek ACQUIRE; Dalam sebuah makalah oleh Russell dkk. (2008) kontinum digambarkan sebagai berikut:

Kontinum terdiri dari tiga tingkat keterlibatan di lima karakteristik keterlibatan. Tingkat keterlibatan, yang berpindah dari konsultatif ke koperasi menjadi kolaboratif, mencerminkan realitas program dan program kemitraan. Ketiga tingkat keterlibatan masyarakat ini dapat

disesuaikan, dengan aktivitas spesifik berdasarkan kategori tindakan ini. Lima karakteristik keterlibatan adalah keterlibatan masyarakat dalam penilaian; akses ke informasi; Inklusi dalam pengambilan keputusan; Kapasitas lokal untuk mengadvokasi institusi dan struktur pemerintahan; serta akuntabilitas institusi kepada publik.

Pengalaman tim ACQUIRE menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat bukanlah acara satu kali melainkan proses evolusioner. Pada setiap tingkat keterlibatan berturut-turut, anggota masyarakat bergerak lebih dekat untuk menjadi agen perubahan daripada target perubahan, dan kolaborasi meningkat, seperti juga pemberdayaan masyarakat. Pada tingkat akhir (kolaboratif), masyarakat dan pemangku kepentingan diwakili sama dalam kemitraan, dan semua pihak saling bertanggung jawab atas semua aspek proyek (Russell et al., 2008).

Everett Rogers (1995) mendefinisikan difusi sebagai “proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial”. Komunikasi, pada gilirannya, menurut Rogers, adalah “proses di mana peserta membuat dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai saling pengertian”. Dalam kasus difusi inovasi, komunikasi adalah tentang sebuah gagasan atau pendekatan baru. Memahami proses difusi sangat penting bagi usaha yang melibatkan masyarakat untuk menyebarkan praktik inovatif dalam perbaikan kesehatan. Rogers menawarkan rumusan awal gagasan bahwa ada tahapan yang berbeda dalam proses inovasi dan bahwa individu bergerak melalui tahap ini pada tingkat yang berbeda dan dengan perhatian yang berbeda. Dengan demikian, difusi inovasi memberi landasan untuk memahami variasi bagaimana masyarakat merespons upaya keterlibatan masyarakat.

Pada tahap pertama Rogers, pengetahuan, individu atau kelompok terpapar pada inovasi namun tidak memiliki informasi tentang hal itu. Pada tahap kedua, persuasi, individu atau kelompok tertarik pada inovasi dan secara aktif mencari informasi. Dalam keputusan, tahap ketiga, individu atau kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolaknya. Jika adopsi terjadi, individu atau kelompok bergerak ke tahap keempat, menerapkan, dan menggunakan inovasi sampai tingkat tertentu. Selama tahap ini, kegunaan inovasi ditentukan, dan informasi tambahan dapat dicari. Pada tahap kelima, konfirmasi, individu atau kelompok memutuskan apakah akan terus menggunakan inovasi dan

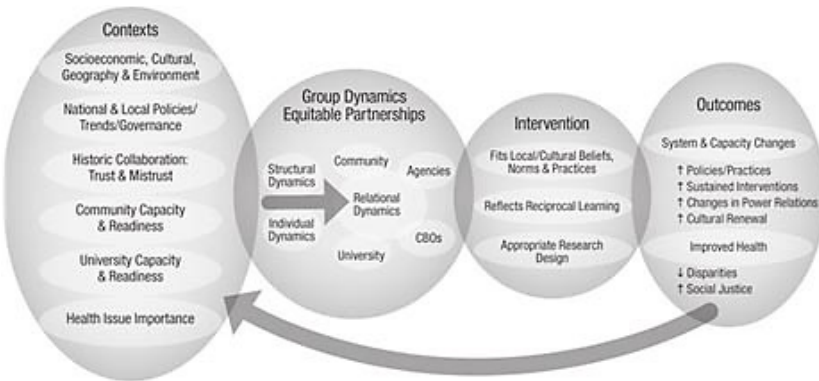
sejauh mana. Rogers mencatat bahwa proses inovasi dipengaruhi baik oleh individu yang terlibat dalam proses maupun inovasi itu sendiri. Individu termasuk inovator, pengadopsi awal inovasi, mayoritas awal (yang lebih lama memikirkan pengadopsi awal dan kemudian mengambil tindakan), pengadopsi terlambat, dan “lamban” yang menolak perubahan dan sering kali mengkritik orang lain yang bersedia menerima inovasi tersebut.

Menurut Rogers, karakteristik yang mempengaruhi kemungkinan bahwa inovasi akan diadopsi meliputi (1) keuntungan relatif yang dirasakan dibandingkan strategi lainnya, (2) kompatibilitasnya dengan norma dan kepercayaan yang ada, (3) tingkat kompleksitas yang terlibat dalam mengadopsi Inovasi, (4) “percobaan” inovasi (yaitu, sejauh mana dapat diuji coba berdasarkan percobaan), dan (5) hasil pengamatan. Greenhalgh dkk. (2004) memperluas karakteristik inovasi ini, menambahkan (1) potensi reinvention, (2) seberapa fleksibel inovasi dapat digunakan, (3) risiko adopsi yang dirasakan, (4) adanya potensi yang jelas untuk Peningkatan kinerja, (5) pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengadopsi inovasi, dan (6) dukungan teknis yang dibutuhkan.

Kesadaran akan tahap difusi, respon yang berbeda terhadap inovasi, dan karakteristik yang mendorong adopsi dapat membantu pemimpin keterlibatan menyesuaikan strategi dengan kesiapan para pemangku kepentingan. Misalnya, kampanye promosi kesehatan yang melibatkan masyarakat dapat mencakup peningkatan kesadaran tentang tingkat keparahan masalah kesehatan (pengetahuan, tahap pertama dalam skema Rogers), mengubah kesadaran menjadi perhatian terhadap masalah (persuasi), membangun sebuah intervensi di seluruh masyarakat Inisiatif (adopsi), pengembangan infrastruktur yang diperlukan agar penyediaan layanan tetap luas dan konstan dalam mencapai penghuni (implementasi), dan evaluasi proyek (konfirmasi).

Penelitian partisipatif berbasis masyarakat (CBPR) adalah kerangka kerja paling terkenal untuk CEnR. Sebagai pendekatan kolaboratif yang sangat berkembang, CBPR akan ditunjukkan di sisi kanan kontinum yang ditunjukkan pada gambar dibawah, dimana semua kolaborator menghargai kekuatan yang masing-masing ada dalam kemitraan tersebut, dan masyarakat berpartisipasi sepenuhnya dalam semua aspek proses penelitian. Meskipun CBPR dimulai dengan topik penelitian yang penting, tujuannya adalah mencapai perubahan sosial untuk memperbaiki hasil kesehatan dan menghilangkan perbedaan kesehatan (Israel et al., 2003).

Wallerstein dkk. (2008) melakukan studi percontohan dua tahun yang melihat bagaimana proses CBPR mempengaruhi atau memprediksi hasil. Dengan menggunakan metode survei Internet dan literatur yang ada, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan: Apa nilai tambah CBPR terhadap penelitian itu sendiri dan untuk menghasilkan hasil? Apa jalur potensial menuju hasil antara sistem dan perubahan kapasitas dan hasil kesehatan yang lebih distal? Melalui proses konsensus dengan menggunakan komite penasihat nasional, para penulis membentuk model logika konseptual proses CBPR yang mengarah pada hasil.



Contexts	Group Dynamics		Intervention	Outcomes
<ul style="list-style-type: none"> • Social-economic, cultural, geographic, political-historical, environmental factors • Policies/Trends: National/local governance & political climate • Historic degree of collaboration and trust between university & community • Community: capacity, readiness & experience • University: capacity, readiness & reputation • Perceived severity of health issues 	Structural Dynamics <ul style="list-style-type: none"> • Diversity • Complexity • Formal agreements • Real power/resource sharing • Alignment with CBPR principles • Length of time in partnership Individual Dynamics <ul style="list-style-type: none"> • Core values • Motivations for participating • Personal relationships • Cultural identities/humility • Bridge people on research team • Individual beliefs, spirituality & meaning • Community reputation of PI 	Relational Dynamics <ul style="list-style-type: none"> • Safety • Dialogue, listening & mutual learning • Leadership & stewardship • Influence & power dynamics • Flexibility • Self & collective reflection • Participatory decision-making & negotiation • Integration of local beliefs to group process • Flexibility • Task roles & communication 	<ul style="list-style-type: none"> • Intervention adapted or created within local culture • Intervention informed by local settings and organizations • Shared learning between academic and community knowledge • Research and evaluation design reflects partnership input • Bidirectional translation, implementation & dissemination 	CBPR System & Capacity Changes <ul style="list-style-type: none"> • Changes in policies/practices: <ul style="list-style-type: none"> - In universities and communities • Culturally based & sustainable interventions • Changes in power relations • Empowerment: <ul style="list-style-type: none"> - Community voices heard - Capacities of advisory councils - Critical thinking • Cultural revitalization & renewal Health Outcomes <ul style="list-style-type: none"> • Transformed social/economic conditions • Reduced health disparities

Used with permission from Minkler et al., 2008.

Gambar 4. Model Konseptual CBPR (Wallerstein, 2010)

Model ini membahas empat dimensi CBPR dan menguraikan hubungan potensial antara masing-masing. Penulis mengidentifikasi: “Faktor kontekstual” yang membentuk sifat penelitian dan kemitraan, dan

dapat menentukan apakah dan bagaimana kemitraan dimulai. Selanjutnya, dinamika kelompok akan berinteraksi dengan faktor kontekstual untuk menghasilkan intervensi dan rancangan penelitiannya. Akhirnya, sistem intermediate dan perubahan kapasitas, dan akhirnya, hasil kesehatan, dihasilkan langsung dari penelitian intervensi. Model seperti ini sangat penting untuk upaya untuk menilai atau mengevaluasi praktik keterlibatan masyarakat secara empiris dan menyebarluaskan pendekatan yang efektif.

Prinsip-Prinsip Dalam Community Engagement

1. Perjelas tujuan atau sasaran.

Mereka yang ingin melibatkan masyarakat perlu berkomunikasi dengan masyarakat itu mengapa keikutsertaannya bermanfaat. Tentu saja, seperti yang terlihat dalam diskusi tentang pembentukan koalisi dan pengorganisasian masyarakat, hanya bisa mengartikulasikan bahwa keterlibatan itu bermanfaat, tidak menjamin partisipasi. Mereka yang menerapkan upaya tersebut harus dipersiapkan untuk berbagai tanggapan masyarakat. Mungkin ada banyak rintangan untuk keterlibatan dan, seperti yang dibahas di bagian mengenai partisipasi masyarakat, kompensasi yang sesuai harus diberikan kepada peserta. Proses untuk keterlibatan dan partisipasi harus sesuai untuk memenuhi keseluruhan tujuan dan sasaran pertunangan.

Dorongan untuk usaha *engagement* tertentu mungkin berbeda. Misalnya, undang-undang atau kebijakan dapat membuat masyarakat terlibat dalam kondisi pendanaan. Pemimpin keterlibatan mungkin melihat pengorganisasian dan pengobilisasi masyarakat sebagai bagian dari misi atau profesi mereka, atau mereka mungkin mengenali kekuatan keterlibatan masyarakat: potensinya untuk meningkatkan dasar tindakan etis, identifikasi masalah, perancangan dan penyampaian program, dan translasi. penelitian. Sebagai alternatif, tekanan dari luar mungkin menuntut agar entitas lebih responsif terhadap masalah masyarakat.

Fokus pada peningkatan masyarakat secara keseluruhan, termasuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur, yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi pada perbaikan kesehatan dan pencegahan penyakit. Mintalah anggota masyarakat untuk menentukan masalah kesehatan mereka, identifikasi area yang

memerlukan tindakan, dan terlibat dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang sesuai.

Tingkat di mana tujuan terfokus memiliki implikasi untuk mengelola dan mempertahankan pertunangan. Tujuan yang lebih luas memungkinkan pemimpin masyarakat untuk melibatkan segmen masyarakat yang lebih luas, sedangkan fokus yang lebih sempit dapat menjaga aktivitas lebih diarahkan dan mudah dikelola.

Demikian pula, partisipasi masyarakat bisa memiliki beberapa dimensi yang mungkin. Secara umum, para pemimpin melibatkan masyarakat perlu jelas tentang apakah mereka (1) mencari data, informasi, saran, dan umpan balik untuk membantu mereka merancang program, atau (2) tertarik untuk bermitra dan berbagi kontrol dengan masyarakat. Yang terakhir mencakup bersedia untuk menangani isu-isu yang diidentifikasi masyarakat sebagai hal yang penting, bahkan jika itu bukan yang awalnya diantisipasi.

Sama pentingnya untuk menjadi jelas tentang siapa yang harus dilibatkan, setidaknya pada awalnya. Apakah semua orang yang berada dalam batas-batas geografis tertentu? Atau apakah itu kelompok ras / etnis tertentu, populasi dengan pendapatan tertentu, atau kelompok usia, seperti kaum muda? Apakah itu kumpulan institusi dan kelompok tertentu, seperti komunitas iman, sekolah, atau sistem peradilan? Atau apakah itu kombinasi? Apakah itu komunitas “virtual” yang memiliki kepentingan bersama? Bagaimana kolaborasi atau kemitraan lain dalam komunitas yang diminati meningkatkan upaya pertunangan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan mulai memberikan parameter untuk usaha pertunangan.

2. Menggali pengetahuan tentang persepsi masyarakat.

Penting untuk belajar sebanyak mungkin tentang masyarakat, melalui metode kualitatif dan kuantitatif, dan dari sebanyak mungkin sumber. Banyak konsep, model, dan kerangka pengorganisasian yang mendukung prinsip ini. Teori ekologi sosial, misalnya, menekankan perlunya memahami lingkungan fisik dan sosial/ budaya yang lebih besar dan interaksinya dengan perilaku kesehatan individu. Pemahaman tentang bagaimana masyarakat merasakan manfaat dan biaya partisipasi akan memudahkan pengambilan keputusan dan pembangunan

konsensus dan akan diterjemahkan ke dalam perencanaan, perancangan, pengembangan kebijakan, organisasi, dan advokasi yang lebih baik. Konsep tahap difusi inovasi menyoroti kebutuhan untuk menilai kesiapan masyarakat untuk mengadopsi strategi baru. Memahami masyarakat akan membantu pemimpin dalam upaya keterlibatan untuk memetakan aset masyarakat, mengembangkan gambaran tentang bagaimana bisnis dilakukan, dan mengidentifikasi individu dan kelompok yang memerlukan dukungan, termasuk individu atau kelompok mana yang harus didekati dan terlibat dalam tahap awal pertunangan.

Banyak masyarakat sudah terlibat dalam koalisi dan kemitraan yang dikembangkan seputar isu-isu spesifik seperti HIV / AIDS, pencegahan penyalahgunaan zat, dan pembangunan masyarakat dan ekonomi. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana upaya untuk melibatkan atau memobilisasi masyarakat seputar isu-isu baru dapat mempengaruhi usaha yang sudah ada sebelumnya. Hal ini juga membantu bagi mereka yang memulai proses keterlibatan masyarakat untuk mempertimbangkan bagaimana masyarakat memandangnya (atau afiliasi mereka). Memahami persepsi ini akan membantu mereka mengidentifikasi kekuatan yang dapat mereka bangun dan rintangan yang harus mereka atasi. Ada banyak teknik keterlibatan masyarakat yang dapat digunakan untuk (1) belajar tentang persepsi masyarakat terhadap kredibilitas mereka yang memulai proses dan (2) sekaligus meletakkan dasar bagi kemitraan yang berarti dan tulus.

3. Membangun hubungan, kepercayaan, dan komitmen dari organisasi masyarakat dan pemimpin.

Keterlibatan didasarkan pada dukungan masyarakat. Literatur tentang partisipasi masyarakat dan organisasi menunjukkan bahwa perubahan positif lebih mungkin terjadi bila anggota masyarakat merupakan bagian integral dari pengembangan dan implementasi program. Semua mitra harus dihormati secara aktif sejak awal. Misalnya, bertemu dengan tokoh masyarakat utama dan kelompok di sekitar mereka membantu membangun kepercayaan untuk kemitraan sejati. Pertemuan tersebut memberikan penyelenggara kegiatan pertunangan dengan lebih banyak informasi tentang masyarakat, keprihatinannya, dan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau membatasi partisipasi. Selain itu, anggota

masyarakat perlu melihat dan merasakan manfaat “nyata” untuk perpanjangan waktu, usaha, dan keterlibatan yang diminta untuk diberikan. Begitu hubungan yang berhasil terjalin, pertemuan dan pertukaran dengan anggota masyarakat dapat membangun kemitraan yang terus berlanjut dan substantif.

Saat menghubungi komunitas, beberapa pemimpin keterlibatan merasa paling efektif untuk menjangkau segelintir pemimpin formal dan informal yang selaras. Mereka mencoba bekerja dengan semua faksi, memperluas engagement, dan menghindari diidentifikasi dengan satu kelompok. Sebagai alternatif, pelaksana upaya pertunangan mungkin menemukan bahwa mengidentifikasi dan bekerja terutama dengan pemangku kepentingan utama adalah pendekatan yang paling berhasil. Oleh karena itu, mereka terlibat dengan jumlah anggota masyarakat yang lebih kecil, mungkin lebih mudah dikelola, untuk mencapai misinya. Rentang individu dan kelompok yang dihubungi untuk usaha pertunangan sebagian bergantung pada masalah yang dihadapi, strategi keterlibatan yang dipilih, dan apakah usaha tersebut dimandatkan atau sukarela.

Penting bagi mereka yang melibatkan komunitas untuk mematuhi standar etika tertinggi. Memang, dalam situasi tertentu, keterlibatan masyarakat mungkin dianggap sebagai tuntutan etis. Hak, kepentingan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat harus diprioritaskan. Kegagalan etika masa lalu seperti studi sifilis Tuskegee telah menciptakan ketidakpercayaan di antara beberapa komunitas dan telah menghasilkan tantangan besar bagi penyelenggara komunitas. Masyarakat harus dididik tentang potensi bahaya melalui keterlibatan atau pengesahan sebuah prakarsa sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat. Kegagalan untuk bertindak etis bukanlah pilihan.

4. Komitmen Pencapaian Tujuan Bersama.

Hanya karena sebuah institusi atau organisasi mengenalkan dirinya ke dalam masyarakat tidak berarti secara otomatis menjadi komunitas. Organisasi adalah komunitas bila dikendalikan oleh individu atau kelompok yang merupakan anggota masyarakat. Konsep penentuan nasib sendiri ini sangat penting bagi konsep pemberdayaan masyarakat. Dinamiknya bisa sangat kompleks,

bagaimanapun, karena masyarakat sendiri mungkin memiliki faksi yang menentang kekuasaan dan pengaruhnya. Secara lebih luas, harus diakui bahwa kekuatan internal dan eksternal mungkin ada dalam upaya keterlibatan. Sebagaimana dibahas dalam Prinsip 6, keragaman gagasan dapat ditemukan dan dinegosiasikan selama proses pertunangan.

Literatur tentang pemberdayaan masyarakat sangat mendukung gagasan bahwa masalah dan solusi potensial harus didefinisikan oleh masyarakat. Masyarakat dan individu perlu “memiliki” masalah, memberi nama masalahnya, mengidentifikasi area tindakan, merencanakan dan menerapkan strategi, dan mengevaluasi hasil. Selain itu, orang-orang di sebuah komunitas lebih cenderung terlibat jika mereka mengidentifikasi masalah yang ditangani, menganggapnya penting, dan memiliki pengaruh dan dapat memberikan kontribusi. Partisipasi juga akan lebih mudah didapat jika orang-orang menghadapi beberapa rintangan untuk berpartisipasi, pertimbangkan manfaat untuk berpartisipasi lebih besar daripada biaya, dan percaya bahwa proses partisipasi dan iklim organisasi terkait terbuka dan mendukung.

5. Bermitra dengan masyarakat untuk menciptakan perubahan.

The American Heritage Dictionary mendefinisikan kemitraan sebagai “hubungan antara individu atau kelompok yang dicirikan oleh kerja sama dan tanggung jawab, seperti untuk pencapaian tujuan yang ditentukan. Penelitian partisipatif berbasis masyarakat dan pendekatan terkini terhadap penelitian translasi secara eksplisit mengakui bahwa keterlibatan masyarakat secara signifikan meningkatkan potensi penelitian untuk menghasilkan kesehatan yang lebih baik dengan meningkatkan partisipasi dalam penelitian, pelaksanaannya, dan penyebaran temuannya. Keterlibatan masyarakat berdasarkan peningkatan kesehatan terjadi dalam konteks dan harus menanggapi tren ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi disparitas kesehatan dan kesehatan. Lebih jauh lagi, karena literatur mengenai pemberdayaan masyarakat berpendapat, kemitraan masyarakat yang adil dan diskusi yang transparan akan lebih mengarah pada hasil yang diinginkan (lihat Prinsip 4). Individu dan kelompok yang terlibat dalam kemitraan harus mengidentifikasi kesempatan

untuk belajar bersama dan merasa bahwa mereka masing-masing memiliki sesuatu yang bermakna untuk berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesehatan, sementara pada saat yang sama melihat sesuatu untuk dicapai. Setiap pihak dalam hubungan semacam itu juga memegang tanggung jawab penting untuk hasil akhir dari sebuah usaha.

6. Kesadaran akan berbagai budaya dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keragaman harus sangat penting.

Keragaman mungkin terkait dengan status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau kesehatan serta perbedaan budaya, bahasa, ras, etnisitas, usia, jenis kelamin, mobilitas, keaksaraan, atau kepentingan pribadi. Unsur-unsur keanekaragaman ini dapat mempengaruhi akses individu dan masyarakat terhadap pemberian layanan kesehatan, status kesehatan mereka, dan tanggapan mereka terhadap upaya keterlibatan masyarakat. Perspektif sistem menunjukkan perhatian pada unsur keanekaragaman masyarakat lainnya: keragaman peran yang dimainkan oleh orang dan organisasi yang berbeda dalam berfungsinya sebuah komunitas. Melibatkan populasi yang beragam ini akan memerlukan penggunaan beberapa strategi keterlibatan.

7. Keterlibatan masyarakat hanya dapat dipertahankan dengan mengidentifikasi dan memobilisasi aset dan kekuatan masyarakat.

Aset masyarakat mencakup kepentingan, keterampilan, dan pengalaman individu dan organisasi lokal serta jaringan hubungan yang menghubungkan mereka. Sumber daya individu dan kelembagaan seperti fasilitas, bahan, keterampilan, dan kekuatan ekonomi semuanya dapat dimobilisasi untuk pengambilan keputusan tindakan kesehatan masyarakat. Singkatnya, anggota masyarakat dan institusi harus dipandang sebagai sumber daya untuk mewujudkan perubahan dan tindakan. Meskipun penting untuk memulai dengan menggunakan sumber daya yang ada, literatur tentang pengembangan kapasitas dan koalisi menekankan bahwa keterlibatan lebih mungkin dipertahankan saat sumber daya dan kapasitas baru dikembangkan. Melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan tentang kesehatan dan mengambil tindakan di arena tersebut dapat melibatkan penyediaan tenaga ahli dan

sumber daya untuk membantu masyarakat mengembangkan kapasitas yang diperlukan (mis., Melalui pelatihan kepemimpinan) dan infrastruktur untuk menganalisis situasi, membuat keputusan, dan mengambil tindakan.

8. Organisasi dan individu harus siap melepaskan kontrol atas tindakan atau intervensinya.

Melibatkan masyarakat pada akhirnya adalah memfasilitasi tindakan berbasis masyarakat. Tindakan masyarakat harus mencakup banyak elemen masyarakat yang dibutuhkan agar tindakan dapat dipertahankan sambil tetap menciptakan proses yang dapat dikelola. Keterlibatan masyarakat akan menciptakan perubahan dalam hubungan dan cara institusi dan individu menunjukkan kapasitas dan kekuatan mereka untuk bertindak dalam isu-isu spesifik. Di lingkungan yang ditandai dengan dinamisme dan perubahan konstan, koalisi, jaringan, dan aliansi baru cenderung muncul. Upaya yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat akan mempengaruhi sifat program dan kebijakan publik dan swasta, kebijakan, dan alokasi sumber daya. Mereka yang menerapkan upaya untuk melibatkan masyarakat harus siap untuk mengantisipasi dan merespons perubahan ini.

9. Kolaborasi masyarakat membutuhkan komitmen jangka panjang.

Kerjasama masyarakat dan masyarakat berbeda dalam tahap perkembangan mereka. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keterlibatan masyarakat terkadang terjadi di seputar inisiatif spesifik yang terbatas waktu. Namun, yang lebih umum, partisipasi masyarakat dan mobilisasi perlu dipelihara dalam jangka panjang. Selain itu, kemitraan jangka panjang memiliki kapasitas terbesar untuk membuat perbedaan dalam kesehatan penduduk. Tidak mengherankan, membangun kepercayaan dan membantu masyarakat mengembangkan kapasitas dan infrastruktur agar aksi masyarakat sukses membutuhkan waktu. Sebelum individu dan organisasi dapat memperoleh pengaruh dan menjadi pemain dan mitra dalam pengambilan keputusan dan langkah-langkah tindakan yang diambil oleh masyarakat relatif terhadap kesehatan mereka, mereka mungkin memerlukan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan tambahan. Misalnya,

mitra mungkin memerlukan bantuan teknis dan pelatihan jangka panjang yang terkait dengan pengembangan organisasi, pengamanan sumber daya, pengorganisasian konstituen untuk bekerja demi perubahan, berpartisipasi dalam kemitraan dan koalisi, menyelesaikan konflik, dan pengetahuan teknis lainnya yang diperlukan untuk menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian. Selanjutnya, strategi harus dikembangkan untuk mempertahankan usaha. Probabilitas keterlibatan berkelanjutan dan peningkatan efektifitas pemrograman saat peserta masyarakat menjadi mitra aktif dalam prosesnya.

Tinjauan Konsep Self Engagement

Istilah *engagement* dalam konteks peran kerja karyawan mulai dibicarakan sejak lima belas tahun yang lalu dalam berbagai literatur bisnis dan psikologi organisasi. Penelitian mengenai *engagement* dalam pekerjaan yang berkembang membuahkan empat konstruk definisi dan cara pengukuran yang berbeda. Empat konstruk tersebut antara lain, *personal engagement*, *employee engagement*, *burnout/engagement*, dan *work engagement* (Herbert, 2011).

Kahn merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep *engagement* berkaitan dengan kerja. Kahn mengenalkan konsep *personal engagement* yang didasarkan pada koseptualisasi *job involvement*, komitmen organisasi, dan motivasi intrinsik. Kahn mendefinisikan *personal engagement* dan *personal disengagement* sebagai perilaku yang orang bawa atau tinggalkan dalam diri mereka selama bekerja. *Personal engagement* adalah ekspresi diri secara fisik, kognitif, dan emosional selama bekerja. Karyawan yang *engaged* memahami penuh baik secara fisik, kognitif dan emosional dalam peran kerjanya (Herbert, 2011).

Pendapat lainnya, Macey & Schneider (2008) mendefinisikan *engagement* sebagai: “*an individual’s sense of purpose and focused energy, evident to others in the display of personal initiative, adaptability, effort, and persistence directed toward organizational goals*”. Atau bila diartikan, *engagement* menurut Macey dan Schneider (2008) adalah rasa seseorang terhadap tujuan dan energi yang terfokus, memperlihatkan inisiatif pribadi, dapat beradaptasi, berusaha, dan tekun terhadap tujuan organisasi.

Model *engagement* lain terdapat dalam literatur *burnout* yang mendeskripsikan *engagement* sebagai antitesis positif (Saks, 2006).

Maslach dan Leiter mendefinisikan *engagement* sebagai lawan kutub dari *burnout*. Menurut mereka, *engagement* merupakan skor rendah dari dimensi-dimensi *burnout*. *Engagement* merupakan suatu pengalaman enerjik dari keterlibatan dengan aktifitas pemenuhan secara personal yang dikarakteristikan melalui *energy*, *involvement*, dan *professional efficacy* yang merupakan lawan dari tiga karaktersitik *burnout* (Demerouti & Bakker, 2007).

Schaufeli, Salanova, Roma, & Bakker (2000) sepakat dengan deskripsi Maslach dan Leiter bahwa *engagement* merupakan lawan dari *burnout*. Tetapi, mereka mengambil perspektif yang berbeda dan mendefinisikan serta mengoperasiona-lisasikan *engagement* itu sendiri. Mereka yakin bahwa *burnout* dan *engagement* merupakan dua konsep yang terpisah dan seharusnya diukur secara independen. Schaufeli dkk. (2000), mengemukakan bahwa apabila seorang karyawan memiliki level *burnout* yang rendah ini tidak berarti karyawan tersebut memiliki level *engagement* yang tinggi. Oleh karena itu Schaufeli dkk. (2000), mendefinisikan operasionalisasi *work engagement* terpisah dari operasionalisasi *burnout*. Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova, & Bakker (2002) mendefinisikan *work engagement* sebagai : “*a motivational, positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption*”

Bila diartikan, *work engagement* menurut Schaufeli dkk. (2002), adalah suatu motivasi, hal yang positif, pemenuhan, cara pandang bekerja yang dikarakteristikan melalui *vigor*, *dedication*, dan *absorption*. *Work engagement* mengacu lebih kepada *state* afektif-kognitif yang lebih gigih dan meresap dan tidak fokus pada objek, kejadian, individu, atau perilaku tertentu. Dalam definisi ini, *work engagement* mengandung tiga dimensi yang disebut *vigour*, *dedication*, dan *absorption*. Dengan demikian, Schaufeli dkk. (2002) menampilkan *work engagement* sebagai *state* yang independen dengan struktur yang berbeda sehingga harus diukur dengan instrumen yang berbeda dari *burnout* (Schaufeli dkk., 2002).

Banyak peneliti dan praktisi mengemukakan ide *engagement* merupakan *state*-psikologis positif yang berhubungan dengan pekerjaan yang dicerminkan dengan kata-kata (antusias, enerjik, *passion*, *vigor*) dan *engagement* juga merupakan suatu *state* motivasional yang dicerminkan dalam keinginan yang murni untuk memberikan usaha yang fokus terhadap tujuan dan kesuksesan organisasi. Bakker & Leiter (2010) setuju bahwa *engagement* merupakan konseptualisasi terbaik dan

dikarakteristikan melalui suatu level yang tinggi dari energi dan suatu identifikasi yang kuat dengan pekerjaan seseorang.

Albrecht (2010) berpendapat bahwa definisi *engagement* mencerminkan dua kualitas, (1) suatu *state* motivasi positif dan berenergi yang berhubungan dengan pekerjaan & (2) keinginan murni untuk berkontribusi peran kerja dan kesuksesan organisasi. Definisi *engagement* membutuhkan perbedaan yang jelas dari konstruk yang dikonseptualisasikan lebih baik sebagai anteseden atau “*driver*”/pendorong *engagement*. Walaupun definisi konstruk berbeda-beda namun kesemua definisi tersebut sepakat bahwa *engagement* adalah: “*desirable, has an organizational purpose, and has both psychological and behavioural facets in that it involves energy, enthusiasm, and focused effort.*” Atau bila diartikan, *engagement* adalah sesuatu yang diinginkan, memiliki tujuan organisasi serta memiliki aspek psikologis dan perilaku yang melibatkan energi, antusiasme, dan usaha yang terfokus (Herbert, 2011).

Berdasarkan definisi-definisi di atas *work engagement* dapat disimpulkan sebagai cara pandang seseorang untuk termotivasi dan berhubungan dengan keadaan pemenuhan karyawan yang ditandai dengan energi dan resiliensi mental yang tinggi selama bekerja, rasa antusiasme, merasa penting serta bangga terhadap pekerjaan, dan fokus menikmati pekerjaan.

1. Dimensi Work Engagement

Schaufeli dkk., (2002) mengembangkan operasionalisasi *engagement* dan mendefinisikan *work engagement* sebagai “*a motivational, positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption*” yang bila diartikan *engagement* adalah suatu motivasi, hal yang positif, pemenuhan, *state* bekerja terkait pikiran yang dikarakteristikan melalui *vigor, dedication, dan absorption*.

a. Vigor

Vigor dikarakteristikan melalui level tinggi dari energi dan resiliensi mental selama bekerja, ketulusan untuk memberikan usaha dalam suatu pekerjaan, dan ketekunan walaupun berhadapan dengan berbagai kesulitan (Schaufeli dkk., 2000).

b. Dedication

Dedication dikarakteristikan lewat rasa signifikan dari antusiasme, inspirasi, kebanggaan, dan tantangan. Istilah *dedication* mirip dengan istilah *involvement* yang biasanya didefinisikan dalam istilah identifikasi psikologis pekerjaan seseorang. Namun, setelah dilakukan pengumpulan data secara kualitatif, *dedication* lebih mengacu pada suatu *involvement* yang kuat atau selangkah lebih di depan daripada level identifikasi. *Dedication* memiliki cakupan yang lebih luas tidak hanya mengacu pada *state* keyakinan atau kognitif saja tetapi termasuk juga terhadap *affective* (Schaufeli dkk., 2000).

c. Absorption

Absorption dikarakteristikan dengan konsentrasi yang penuh dan mendalam dalam pekerjaan, ditandai dengan terasa cepatnya waktu berlalu. Terabsorpsi penuh pada suatu pekerjaan mirip dengan apa yang sering disebut „*flow*“, suatu *state* pengalaman optimal yang dikarakteristikan dengan perhatian, *clear mind*, *mind and body unison*, *effortless concentration*, *complete control*, kurangnya kesadaran diri, distorsi waktu dan kesenangan intrinsik. Bagaimanapun secara khusus „*flow*“ merupakan konsep yang lebih kompleks yang termasuk dalam banyak aspek dan mengacu pada bagian khusus, pengalaman singkat berbeda dengan *engagement* yang lebih pervasif dan persisten (Schaufeli dkk., 2000).

Selanjutnya, ketiga dimensi di atas digunakan dalam pembuatan alat ukur skala *work engagement* dalam penelitian ini. Harter, dkk. (2002) mengemukakan bahwa *engagement* dapat berdampak pada hasil bisnis. Ini disebabkan adanya kepuasan kerja dari karyawan yang bahagia sehingga dapat meningkatkan performanya yang akhirnya juga berdampak pada hasil bisnis. Robinson, dkk. (2004) juga menyatakan bahwa dampak *engagement* adalah dapat meningkatkan kesadaran karyawan terhadap bisnis dan bekerja dengan koleganya untuk meningkatkan performa. Hal ini juga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Gallup. Organisasi Gallup menemukan bahwa *engagement* berhubungan dengan loyalitas pelanggan, pertumbuhan bisnis, dan keuntungan. Selain itu, Gallup juga menemukan bahwa *work engagement* mempengaruhi performa yakni, rendahnya tingkat

absensi, rendahnya *turnover*, rendahnya insiden keselamatan, meningkatnya produktivitas dan keuntungan. Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & Schaufeli (2009) juga telah membuktikan bahwa *work engagement* dapat berdampak pada performa dalam bentuk pemasukan finansial setiap harinya.

Robinson dkk. (2004) menjelaskan bahwa anggota organisasi yang *engaged* menampilkan perilaku diantaranya :

- a. Percaya kepada organisasi
- b. Tertarik bekerja lebih baik
- c. Memahami konteks bisnis dan „*bigger picture*’ organisasi
- d. Kerelaan untuk bertindak „lebih“
- e. Selalu mengikuti perkembangan yang ada di lapangan

Saks (2006) mengemukakan beberapa hasil mengenai manfaat *work engagement*, diantaranya:

- a. Kepuasan Kerja

Pengujian membuktikan bahwa *work engagement* berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Karyawan yang *engaged* sudah pasti memiliki rasa cinta kepada perusahaan mereka. Kepuasan kerja merupakan cerminan perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. Karyawan yang *engaged* memiliki rasa cinta kepada perusahaan dan sudah pasti puas atas segala sesuatu yang melekat pada pekerjaannya.

- b. Komitmen Organisasi

Pengujian membuktikan bahwa *work engagement* berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Karyawan yang sudah *engaged* dengan perusahaan tentu memiliki komitmen dengan perusahaannya karena elemen-elemen komitmen juga terkandung dalam *work engagement*.

- c. Intention to quit

Pengujian membuktikan bahwa *work engagement* berpengaruh negatif terhadap *intention to quit*. Keinginan keluar dari organisasi disebabkan rasa tidak nyaman lagi dalam organisasi. Karyawan yang sudah *engaged* memiliki kecenderungan bertahan karena mereka sudah merasa menjadi bagian organisasi yang tidak terpisahkan. Bakker & Demerouti (2008) mengemukakan bahwa

engagement berhubungan dengan performa yang lebih baik. Hal ini dikarenakan :

- 1) Karyawan sering mengalami emosi yang positif termasuk kebahagiaan, kesenangan, dan antusiasme
- 2) Karyawan mengalami kesehatan psikologis dan fisik
- 3) Karyawan membuat *job resources* dan *personal resources* mereka sendiri
- 4) Menularkan *engagement* mereka kepada orang lain

Beberapa studi telah fokus pada *personal resources* sebagai prediktor *work engagement*. *Personal resources* merupakan evaluasi diri positif yang berhubungan dengan resiliensi dan mengacu pada rasa kemampuan individu untuk mengontrol serta berdampak sukses dalam lingkungannya (Hobfoll, 2002 ; Herbert, 2011). *Personal resources* menunjukkan bahwa beberapa evaluasi diri positif memprediksi *goal-setting*, motivasi, kinerja, kepuasan kerja, kepuasan hidup, dan hasil menarik lainnya. Alasannya adalah bahwa semakin besar sumber daya pribadi individu, semakin positif pula diri individu dan tujuan keharmonisan diri diharapkan muncul (Judge, 2005 ; Herbert, 2011). Individu dengan tujuan keharmonisan diri secara intrinsik termotivasi untuk mengikuti tujuannya dan hasilnya memicu kinerja yang lebih tinggi dan kepuasan. Empat konstruk seperti *hope*, *optimism*, *self-efficacy*, dan resiliensi merupakan bagian dari kekuatan psikologis dan *personal resources* (Herbert, 2011).

Anteseden lain ditampilkan melalui model *job demands-resources* (JD-R). Model *job demands-resources* (JD-R) membagi lingkungan kerja ke dalam *job demands* dan *job resources* (Bakker & Demerouti, 2007). *Job demands* mengacu pada fitur fisik, psikologis, sosial ataupun organisasi dari suatu pekerjaan yang menuntut keberlangsungan usaha baik secara fisik maupun psikologis dari seorang karyawan dan dapat berdampak dalam pengeluaran fisiologis serta psikologis. Sedangkan *job resources* mengacu pada fitur fisik, psikologis, sosial ataupun organisasi dari suatu pekerjaan yang fungsional dimana pekerjaan tersebut menolong pencapaian tujuan bekerja, mengurangi *job demands* serta hal yang berhubungan dengan pengeluaran fisiologis-psikologis, dan menstimulasi pertumbuhan personal, pembelajaran, dan pengembangan (Bakker & Demerouti, 2008).

Secara keseluruhan, model JD-R menarik dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa *job resources* seperti *feedback* kinerja (Nusatria & Suharnomo, 2011), dukungan sosial dari rekan kerja dan supervisor, *rewards*, variasi keterampilan, dan otonomi (Saks, 2006) memunculkan proses motivasi yang mengarah terhadap *work engagement* dan akibatnya kinerja menjadi lebih tinggi. Asumsi kedua adalah bahwa *job resources* menjadi lebih menonjol dan mendapatkan potensi motivasi mereka ketika karyawan dihadapkan dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi misalnya beban kerja dan tuntutan emosional dan mental. Selanjutnya, Xanthopoulou dkk. (2007;2008;2009) memperluas model JD-R dengan menunjukkan bahwa *job resources* dan *personal resources* saling terkait dan bahwa *personal resources* dapat menjadi prediktor yang independen dari *work engagement*. Dengan demikian, karyawan yang memiliki skor tinggi pada *optimism*, *self-efficacy*, *resilience*, dan *self-esteem* juga mampu memobilisasi *job resources* serta umumnya *engaged* terhadap pekerjaan mereka (Bakker & Demerouti, 2008).

Model JD-R diasumsikan bahwa *job resources* secara independen atau secara bersamaan dengan *personal resources* dapat memprediksi *work engagement*. *Job resources* dan *personal resources* khususnya memiliki dampak positif pada *work engagement* ketika tuntutan pekerjaan tinggi. *Work engagement* memiliki dampak positif pada kinerja. Karyawan yang *engaged* dan memiliki kinerja yang baik mampu membuat *resources* mereka sendiri yang kemudian mendorong *engagement* lagi dari waktu ke waktu dan menciptakan siklus yang menguntungkan (Bakker & Demerouti, 2008).

Herbert (2011) juga menambahkan hasil lain mengenai *resources* yang dapat mempengaruhi *engagement*. *Resources* tersebut antara lain, tantangan yang optimal, umpan balik (*feedback*), dan kebebasan dari evaluasi dapat memfasilitasi motivasi intrinsik. Umpan balik kinerja positif meningkatkan *engagement*, sedangkan umpan balik kinerja negatif menurunkan *engagement*. Tetapi hal ini juga tampaknya dimediasi oleh kompetensi yang dirasakan individu yakni komponen *self-efficacy* (Herbert, 2011). Selain itu, *self-efficacy* sebagai bagian dari kekuatan psikologis juga menciptakan kecenderungan yang dapat meningkatkan *engagement* (Herbert, 2011).

2. Konsepsi Self-efficacy

Self-efficacy adalah keyakinan kemampuan seseorang untuk mengorganisir dan mengeksekusi bagian-bagian dari tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian (Bandura, 1997). Selain itu, Schultz & Schultz (1994) mendefinisikan *self-efficacy* sebagai perasaan terhadap kecukupan, efisiensi, dan kemampuan diri dalam mengatasi kehidupan. Baron dan Byrne (1994) mengemukakan bahwa *self-efficacy* merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, dan menghasilkan sesuatu. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *self-efficacy* merupakan keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ia hadapi dan mampu mengambil tindakan ketika menghadapi rintangan serta mencapai tujuan yang diharapkannya. Bandura (1997) menyatakan ada tiga dimensi *self-efficacy*, yaitu:

a. *Level* (tingkatan)

Level berkaitan dengan sejauh mana individu dapat menentukan tingkat kesulitan dalam pekerjaan yang mampu dilaksanakannya. Tuntutan tugas merepresentasikan bermacam-macam tingkat kesulitan atau kesukaran untuk mencapai performa yang optimal. Penerimaan dan keyakinan seseorang terhadap suatu tugas berbeda-beda, mungkin orang hanya terbatas pada tugas yang sederhana, ada juga yang terbatas pada tugas yang menengah ataupun sulit. Ada yang menganggap suatu tugas itu sulit sedangkan orang lain mungkin merasa tidak demikian. Individu yang memiliki *level* yang tinggi berkeyakinan bahwa ia mampu mengerjakan tugas yang sukar sedangkan individu yang memiliki *level* yang rendah berkeyakinan bahwa ia hanya mampu mengerjakan tugas-tugas yang mudah saja.

b. *Generality* (Keadaan umum)

Generality mengacu pada sejauh mana individu yakin akan kemampuannya dalam berbagai situasi tugas, mulai dari dalam melakukan suatu aktifitas yang bisa dilakukan atau situasi tertentu yang tidak pernah dilakukan hingga dalam serangkaian tugas atau situasi sulit dan bervariasi. *Generality* merupakan

perasaan kemampuan yang ditunjukkan individu pada konteks tugas yang berbeda-beda, baik itu melalui tingkah laku, kognitif, dan afektifnya.

c. *Strength* (Kekuatan)

Strength merupakan kuatnya keyakinan individu mengenai kemampuan yang dimilikinya. Hal ini berkaitan dengan ketahanan dan keuletan individu dalam pemenuhan tugasnya. Individu yang memiliki keyakinan dan kemantapan yang kuat terhadap kemampuannya untuk mengerjakan suatu tugas akan terus bertahan dalam usahanya meskipun banyak mengalami kesulitan dan tantangan. Individu yang memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuannya teguh dalam berusaha untuk mengenyampingkan kesulitan yang dihadapi.

Secara garis besar, individu yang memiliki *self-efficacy* yang tinggi akan cenderung memilih terlibat langsung, sementara individu yang memiliki *self-efficacy* yang rendah cenderung menghindari tugas tersebut. Individu yang memiliki *self-efficacy* yang tinggi menganggap kegagalan sebagai akibat dari kurangnya usaha yang keras, pengetahuan, dan keterampilan. Individu yang memiliki *self-efficacy* rendah cenderung ragu akan kemampuannya dan menjauhi tugas-tugas yang sulit karena tugas tersebut dipandang sebagai ancaman baginya.

Bandura (1997) menyatakan bahwa *efficacy* individu dalam satu area aktifitas bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dibanding area aktifitas lainnya. Oleh karenanya, Bandura (1997) menambahkan *efficacy* seharusnya diukur dengan melihat konteks meliputi aktifitas, perbedaan level tuntutan tugas pada berbagai keadaan situasional yang berbeda.

Menurut Bandura (1997), proses psikologis dalam *self-efficacy* yang turut berperan dalam diri manusia ada empat, yakni proses kognitif, motivasional, afeksi, dan proses pemilihan/seleksi.

a. Proses Kognitif

Proses kognitif merupakan proses berfikir yang didalamnya terdapat pemerolehan, pengorganisasian, dan penggunaan informasi. Kebanyakan tindakan manusia bermula dari sesuatu yang difikirkan terlebih dahulu. Individu yang memiliki *self-*

efficacy yang tinggi lebih senang membayangkan tentang kesuksesan. Sebaliknya, individu yang *self-efficacy*-nya rendah lebih banyak membayangkan kegagalan dan hal-hal yang dapat menghambat tercapainya kesuksesan. Bentuk tujuan personal juga dipengaruhi oleh penilaian akan kemampuan diri. Semakin individu mempersepsikan dirinya mampu maka individu akan semakin membentuk usaha-usaha dalam mencapai tujuannya dan semakin kuat komitmen individu terhadap tujuannya.

b. Proses Motivasi

Kebanyakan motivasi manusia dibangkitkan melalui kognitif. Individu memberi motivasi/dorongan bagi diri mereka sendiri dan mengarahkan tindakan melalui tahap pemikiran-pemikiran sebelumnya. Keyakinan akan kemampuan diri dapat mempengaruhi motivasi dalam berbagai hal, yakni menentukan tujuan yang telah ditentukan individu, seberapa besar usaha yang dilakukan, seberapa tahan mereka dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan ketahanan mereka dalam menghadapi kegagalan.

c. Proses afektif

Proses afeksi merupakan proses pengaturan kondisi emosi dan reaksi emosional. Menurut Bandura (1997) keyakinan individu akan *coping* mereka turut mempengaruhi level stress dan depresi seseorang saat mereka menghadapi situasi yang sulit. Persepsi *self-efficacy* tentang kemampuannya mengontrol sumber stress memiliki peranan penting dalam timbulnya kecemasan. Individu yang percaya akan kemampuannya untuk mengontrol situasi cenderung tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Individu yang merasa tidak mampu mengontrol situasi cenderung mengalami level kecemasan yang tinggi, selalu memikirkan kekurangan mereka, memandang lingkungan sekitar penuh dengan ancaman, membesar-besarkan masalah kecil, dan terlalu cemas pada hal-hal kecil yang sebenarnya jarang terjadi (Bandura, 1997).

d. Proses Seleksi

Kemampuan individu untuk memilih aktifitas dan situasi tertentu turut mempengaruhi efek dari suatu kejadian. Individu cenderung menghindari aktifitas dan situasi yang di luar batas kemampuan mereka. Bila individu merasa yakin bahwa mereka

mampu menangani suatu situasi, maka mereka cenderung tidak menghindari situasi tersebut. Dengan adanya pilihan yang dibuat, individu kemudian dapat meningkatkan kemampuan, minat, dan hubungan sosialnya (Bandura, 1997).

Menurut Bandura (1997), informasi tentang kemampuan diri dapat diperoleh melalui empat sumber yang sekaligus menjadi sumber *self-efficacy*. Empat sumber itu yaitu:

- a. *Enactive Mastery Experience* (hasil yang dicapai secara nyata). Ini merupakan sumber efficacy yang paling berpengaruh. Dari pengalaman masa lalu terlihat bukti apakah seseorang mengarahkan seluruh kemampuannya untuk meraih keberhasilan. Umpan balik terhadap hasil kerja seseorang yang positif akan meningkatkan *efficacy* seseorang. Kegagalan di berbagai pengalaman hidup dapat diatasi dengan upaya tertentu dan dapat memicu persepsi *self-efficacy* menjadi lebih baik karena membuat individu tersebut mampu untuk mengatasi rintangan-rintangan yang lebih sulit nantinya.
- b. *Vicarious Experiences* (pengalaman orang lain). Ini merupakan cara meningkatkan *efficacy* dengan melihat pengalaman keberhasilan yang ditunjukkan oleh orang lain. Ketika melihat orang lain dengan kemampuan yang sama berhasil dalam suatu bidang/tugas melalui usaha yang tekun, individu juga akan merasa yakin bahwa dirinya juga dapat berhasil dalam bidang tersebut dengan usaha yang sama. Sebaliknya, *self-efficacy* dapat turun ketika orang yang diamati gagal walaupun telah berusaha dengan keras. Individu juga menjadi ragu untuk berhasil dalam bidang tersebut. Peran *vicarious experiences* terhadap *self-efficacy* seseorang sangat dipengaruhi oleh persepsi diri individu tersebut tentang dirinya memiliki kesamaan dengan model yang diamati. Semakin individu merasa dirinya mirip dengan model, maka kesuksesan dan kegagalan model akan semakin mempengaruhi *self-efficacy*. Sebaliknya, apabila individu merasa dirinya semakin berbeda dengan model, maka *self-efficacy* menjadi semakin tidak dipengaruhi oleh perilaku model. Seseorang akan berusaha mencari model yang memiliki kompetensi atau kemampuan yang sesuai dengan keinginannya. Dengan mengamati perilaku dan cara berfikir model tersebut akan dapat memberi pengetahuan

dan pelajaran tentang strategi dalam menghadapi berbagai tuntutan lingkungan.

- c. *Verbal Persuasion* (Persuasi Verbal). Verbal digunakan secara luas untuk membujuk seseorang bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk mencapai tujuan yang mereka cari. Orang yang mendapat persuasi secara verbal bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugasnya maka mereka memiliki kemauan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan akan mengerahkan usaha yang lebih besar daripada orang yang tidak dipersuasi bahwa dirinya mampu pada bidang tersebut.
- d. *Physiological and affective states* (kondisi dalam diri seseorang baik fisik maupun emosional). Individu yakin bahwa sebagian tanda-tanda psikologis menghasilkan informasi dalam menilai kemampuannya. Kondisi stress dan kecemasan diamati oleh individu sebagai tanda yang mengancam terhadap rasa ketidakmampuan diri. *Level of arousal* dapat memberikan informasi mengenai tingkat *self-efficacy* tergantung pada bagaimana *arousal* tersebut diinterpretasikan. Bagaimana seseorang menghadapi suatu tugas, apakah cemas atau khawatir atau tertarik dapat memberikan informasi mengenai *self-efficacy* orang tersebut tinggi atau rendah. Dalam menilai kemampuannya, individu dipengaruhi oleh informasi tentang keadaan fisiknya untuk menghadapi situasi tertentu dengan memperhatikan keadaan fisiologisnya.

Teori *self-efficacy* memandang bahwa persepsi mengenai kemampuan seseorang akan mempengaruhi pikiran, perasaan, motivasi, dan tindakannya. Keyakinan mengenai *self-efficacy* merupakan penentu yang kuat dari tingkah laku. Ada beberapa fungsi dari *self-efficacy* (Bandura, 2000), yaitu:

- a. Penentu tingkah laku. Seseorang akan cenderung melakukan tugas tertentu ketika ia merasa memiliki kemampuan yang baik untuk menyelesaikannya. Jika seseorang memiliki keyakinan diri yang besar bahwa ia mampu mengerjakan tugas tertentu, maka ia akan lebih memilih mengerjakan tugas tersebut daripada tugas yang lainnya

- b. Penentu besarnya usaha dan daya tahan dalam mengatasi rintangan. *Self-efficacy* menentukan berapa lama individu dapat bertahan dalam mengatasi rintangan dan situasi yang kurang menyenangkan. *Self-efficacy* yang tinggi akan menurunkan kecemasan yang menghambat penyelesaian tugas, sehingga mempengaruhi daya tahan individu. Dalam belajar, individu yang memiliki *self-efficacy* yang tinggi cenderung menunjukkan usaha yang lebih keras daripada orang-orang dengan tingkat *self-efficacy* yang rendah (Bandura, 1997).
- c. Mempengaruhi Pola Pikir dan Reaksi Emosional. *Self-efficacy* mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosional individu, baik dalam menghadapi situasi saat ini maupun dalam mengantisipasi situasi yang akan datang (Bandura, 1997). Orang-orang dengan *self-efficacy* rendah selalu menganggap dirinya kurang mampu menangani situasi yang dihadapinya. Dalam mengantisipasi keadaan, mereka juga cenderung mempersepsikan masalah-masalah yang akan timbul jauh lebih berat daripada yang sesungguhnya.
- d. Sebagai Peramal tingkah laku selanjutnya. Individu dengan *self-efficacy* tinggi memiliki keterlibatan yang lebih baik dengan lingkungannya. demikian pula dalam menghadapi tugas, keyakinan mereka cenderung tinggi. Mereka tidak mudah putus asa dan menyerah dalam mengatasi kesulitan dan mereka akan menampilkan usaha yang lebih keras lagi. Sebaliknya, individu dengan *self-efficacy* yang rendah cenderung lebih pemalu dan kurang terlibat dalam tugas yang dihadapi. Selain itu mereka lebih banyak pasrah dalam menerima hasil dan situasi yang dihadapi daripada berusaha merubah keadaan.

Dalam aspek *community engagement* pada desain program partisipasi, terdapat beberapa poin utama untuk memastikan keberhasilan penerapan model, yaitu:

- a. Seorang fasilitator yang akan mengiklankan, merekrut, dan memilih organisasi masyarakat untuk berpartisipasi; Menyediakan dan mendukung tim staf; dan mendorong partisipasi antar dan intra-masyarakat
- b. Organisasi masyarakat tuan rumah yang memiliki hubungan

baik dengan masyarakat sasaran

- c. Tugas yang berarti, terbatas waktu dan mudah dikelola. Ini bisa menjadi salah satu atau semua lingkaran dalam diagram model, yang menghubungkan komunitas dan lembaga dalam hubungan kerja yang adil
- d. Pelatihan anggota organisasi masyarakat sebagai koordinator proyek
- e. Project support worker yang memberikan dukungan kepada masyarakat, seperti yang diarahkan oleh fasilitator
- f. Dukungan dana untuk kegiatan proyek dan personil
- g. Kelompok pengarah yang harus menyertakan perencana dan penyedia layanan/program setempat

Dalam konteks pengelolaan program partisipasi masyarakat, model yang mencakup kedua dimensi; dimensi personal dan dimensi komunitas diarahkan kepada perubahan sikap individu dan kelompok dari internal mereka sendiri. Karena perubahan yang didorong dari internal diri dan organisasi akan memberikan efek yang berjangka panjang.

Rangkuman

Pada dasarnya perilaku manusia dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Perilaku berbeda dengan tindakan atau aksi. Tindakan atau aksi merupakan tindakan mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif. Dalam konteks pengelolaan program partisipasi masyarakat, model yang mencakup kedua dimensi; dimensi personal dan dimensi komunitas diarahkan kepada perubahan sikap individu dan kelompok dari internal mereka sendiri. Karena perubahan yang didorong dari internal diri dan organisasi akan memberikan efek yang berjangka panjang.

PENUTUP

Tugas/Soal Formatif

Diharapkan mahasiswa dapat menjawab soal latihan berikut:

1. Jelaskan apa saja point penting dalam penelitian partisipatif berbasis masyarakat (CBPR)?

2. Jelaskan apa yang dimaksud work engagement dan karakteristiknya?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan self efficacy dan fungsinya?

RUJUKAN

1. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. *Personnel psychology*, 50(3), 801.
2. Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. *Current directions in psychological science*, 9(3), 75-78.
3. Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. *Career development international*.
4. Nusatria, S., & SUHARNOMO, S. (2011). *Employee Engagement: Antecedent dan Konsekuensi Studi pada Unit CS PT. Telkom Indonesia Semarang* (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
5. Herbert, M. (2011). *An exploration of the relationships between psychological capital (hope, optimism, self-efficacy, resilience), occupational stress, burnout and employee engagement* (Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University).
6. Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. *Journal of managerial psychology*.

BAB VIII

PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS

PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat

Bab ini menjelaskan pengertian akuntabilitas dan keterkaitannya dengan partisipasi masyarakat, khususnya dalam program-program partisipatif.

Relevansi Isi Bab

Bab ini memiliki relevansi dengan penjelasan tentang akuntabilitas sosial, partisipasi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan perencanaan komunitas. Dari bab ini mahasiswa dapat memahami keterkaitan beberapa konsep tersebut dan implementasinya dalam penyelenggaraan program partisipasi.

Indikator.

Setelah mempelajari bab ini maka dapat diketahui:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, lingkup dan bentuk-bentuk akuntabilitas sosial,
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hubungan dan keterkaitan akuntabilitas dengan partisipasi masyarakat.

PENYAJIAN

Membangun Partisipasi dan Akuntabilitas Secara Bersamaan

Secara ringkas, akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban pemegang kekuasaan untuk memperhitungkan atau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pemegang kekuasaan merujuk kepada mereka yang memiliki kekuasaan politik, finansial atau bentuk kekuasaan lainnya, termasuk adalah pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan

internasional dan organisasi masyarakat sipil (Malena, 2004:2). Dalam format tersebut, akuntabilitas tidak hanya memiliki kaitan dengan struktur dan prosedur, namun juga mencakup dimensi psikologis yang signifikan dalam wujud mediasi antar orang-orang yang terlibat; persepsi mereka masing-masing, perilaku dan nilai-nilai yang mereka miliki. Secara khusus, hubungan kekuasaan dipengaruhi oleh pola kepercayaan (*trust*) dan dipertajam oleh proses interaksi, komunikasi dan pengaruh (Gilchrist: 2006).

Dalam dimensi struktur/ prosedural serta dimensi psikologis tersebut akuntabilitas dapat dilihat sebagai bentuk proses dan keluaran (*outcome*), transformasi yang dilakukan berupaya untuk mencapai kondisi optimal bagi kapasitas sebuah komunitas/kelompok. Namun pada saat ini tercipta jarak (*discrepancy*) antara prinsip-prinsip dan praktik yang berkaitan antara 'komunitas' dan kenyataan publik (*public realm*), serta juga didalam komunitas itu sendiri (Gilchrist: 2006). Munculnya jarak tersebut dikarenakan prinsip akuntabilitas nampak lebih terwujud dalam bentuk struktur dan prosedural yang mekanistik ketimbang berkembang dalam wujud implementatif pada ruang dimensi psikologis. Dalam wujudnya, akuntabilitas sebagai sebuah prinsip merupakan milik dari suatu kelompok/ komunitas dan bukan merupakan bentuk penetrasi struktural atau prosedural. Dalam konteks ini, akuntabilitas memiliki kaitan dengan partisipasi.

Keterkaitan tersebut diutarakan oleh Newman (2001) yang mencermati bentuk baru pengambilan keputusan dapat menghadirkan tantangan terhadap kekuasaan negara, baik dalam lingkup lokal ataupun pusat, dan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan publik, juga mempertajam akuntabilitas sektor publik yang diturunkan kepada warganegara dan pengguna jasa, mempererat tekanan agar dapat menjaga kendali standar, juga tentang cara baru memperkuat warganegara dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk dari pemerintahan kerjasama atau mandiri (*co or self-governance*) (Bochel: 2006). Menghubungkan partisipasi dan akuntabilitas merupakan tantangan, karena pada satu sisinya, partisipasi mensyaratkan fleksibilitas dan keterbukaan, sementara akuntabilitas mensyaratkan adanya standarisasi dan keteraturan.

Melibatkan masyarakat tersebut dalam proses pengambilan keputusan nampak lebih dipengaruhi oleh keluaran kebijakan sebagai

upaya meningkatkan kualitas proses pembuatan keputusan dan potensi keluaran kebijakan (Bochel dan Bochel: 2004). Partisipasi masyarakat yang dianggap akuntabel lebih sering dilihat dalam indikator kesesuaian pencapaian keluaran kebijakan bagi kelompok masyarakat yang dituju. Dalam perubahan selanjutnya, letak partisipasi berubah seiring berubahnya tujuan implisit terhadap peran representatif partisipan dalam mekanisme pembuatan keputusan (Bochel: 2006). Partisipasi yang akuntabel lebih dilihat dalam indikator keterwakilan dan keterlibatan dalam keputusan berlingkup luas. Perubahan posisi kelompok masyarakat dalam kebijakan yang awalnya sebagai *recipient* menjadi ke arah pelaku aktif yang dapat menghasilkan dilema, termasuk dilema dalam pilihan-pilihan tindakan (*action*) bagi proses struktural, seperti misalnya perencanaan komunitas (Sinclair, 2008: 377).

Partisipasi memiliki implikasi keikutsertaan atau berkontribusi terhadap sesuatu hal. Hal itu berwujud keterlibatan dalam aktivitas komunitas dan organisasi masyarakat sipil yang mendukung pertolongan diri (*self-help*), *philanthropy* atau independen dan terkadang berposisi dengan inisiatif pemerintah. Meningkatnya partisipasi, menjadi acuan bagi penguatan masyarakat yang didesain untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan penyampaian pelayanan publik (Gilchrist: 2006). Dalam perspektif ini, partisipasi menjadi gagasan yang diadopsi ke dalam beberapa program untuk memberdayakan masyarakat, meski kemudian muncul beberapa gejala dari implementasi program tersebut, seperti munculnya *pseudo participation*, *tokenism* dan partisipasi yang tidak selaras dengan nilai kepemerintahan yang positif lainnya, seperti akuntabilitas. Menjadi partisipatif belum tentu akuntabel.

Indikasi itu dikemukakan oleh Sahyuti (2005) dalam pengamatannya atas sisi positif dan negatif dari penerapan prinsip partisipasi di lapangan. Dikemukakan bahwa sisi positif dari partisipasi adalah program yang dijalankan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dasar sesungguhnya. Ini merupakan suatu cara penting untuk menjamin keberlanjutan program, akan lebih efisien karena membantu mengidentifikasi strategi dan teknik yang tepat. Namun sisi negatifnya, partisipasi akan melonggarkan kewenangan pihak atas sehingga akuntabilitas pihak atas sulit diukur, proses pembuatan keputusan menjadi lambat demikian pula pelaksanaan, serta bentuk program juga akan berbeda-beda karena masyarakat yang beragam. Di luar itu, program juga berpeluang untuk diselewengkan oleh

pihak tertentu untuk kepentingan kelompoknya.

Implikasi dari kondisi dilematis itu berupa pilihan untuk mengedepankan pemenuhan salah satu prinsip tersebut. Jika lebih mengedepankan pemenuhan prinsip partisipasi maka prinsip pertanggungjawaban menjadi prioritas pendukung dari aktivitas pemberdayaan tersebut, namun jika yang lebih diinginkan adalah pemenuhan terhadap aspek mekanisme dan sumber daya yang dikondisikan agar sesuai dengan standar program, maka akuntabilitas menjadi prioritas dan partisipasi digerakkan berdasarkan semangat akuntabilitas program tersebut.

Hubungan antara partisipasi dan akuntabilitas ini berkaitan dengan rentangan konsep partisipasi yang menggambarkan partisipasi dalam wujud yang lemah hingga yang paling kuat. Partisipasi yang lemah termasuk '*konsultasi atau penginformasian*', sementara partisipasi yang kuat antara lain '*kemitraan atau kendali bersama (ceding control)*'. Dalam praktiknya, agensi pengelola proyek yang kompleks menemukan kesulitan untuk bergerak dari titik yang lemah pada kontinum ini, dan cenderung mengasumsikan bahwa 'pada tingkat minimum, penerima manfaat (*intended beneficiaries*) akan berkonsultasi selama rancangan proyek sehingga dapat ikut serta dalam menyampaikan kebutuhan, aspirasi dan kapabilitas mereka' (Brett: 2003).

Dalam partisipasi yang lemah tersebut mekanisme dan standar yang dimiliki oleh aktivitas pemberdayaan itu memposisikan salah satu pihak secara dominan, termasuk adalah karena latarbelakang pertanggungjawaban formal yang belum memberi ruang reaktif sebagai bentuk inisiatif tindakan lanjutan yang belum dirumuskan dalam program. Sementara itu, bentuk partisipasi yang kuat tersebut berusaha memposisikan kedua pihak secara setara dan secara bersama-sama turut serta di dalam aktivitas program, sehingga latar pertanggungjawaban dalam aktivitas tersebut menjadi bentuk pendukung dari pelibatan masyarakat. Akuntabilitas menjadi bagian yang dikerjakan secara bersama-sama dan tidak menekan posisi salah satu pihak.

Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam praktek konvensional, partisipasi seringkali hanya melihat masyarakat sebagai donor atau sukarelawan (*voluntary*) dalam

pembangunan. Sehingga yang terjadi hanyalah fenomena “partisipasi yang dibayar”, dimana partisipasi hanya muncul jika ada proyek dengan kucuran dana dari atas. Partisipasi kemudian menjadi kegiatan temporer yang bias dalam penerapan prinsipnya. Partisipasi yang demikian tidak dikembangkan secara sinergis dalam suatu kesatuan *locus* yang spesifik, sehingga rentangan adopsi nilai-nilai yang selaras, tidak mewujud sebagai kesatuan. Karena itu, untuk mengembangkan partisipasi secara nyata, perlu diterapkan pada *locus* yang potensial spesifik untuk berkembang, yaitu pada basis komunitas.

Pada dasarnya, komunitas dibangun sebagai upaya deliberasi (*deliberate*) ketimbang orientasi yang mapan (*default orientation*), perkembangan komunitas membutuhkan interaksi dengan derajat komitmen antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penciptaan identitas kolektif merupakan proses dari partisipasi sebagai kondisi yang diperlukan bagi penguatan komunitas (Gilchrist: 2006). Semangat kolektivitas yang sudah ada dalam komunitas ini menjadi penggerak dalam pembangunan komunitas yang partisipatif dan juga berkaitan dengan prinsip-prinsip lainnya. Pembangunan komunitas (*community development*) adalah salah satu cara menuju bentuk perubahan yang menjamin proses akuntabilitas, pembuatan keputusan yang efektif, dan pencapaian hasil yang efektif. Hal itu berhubungan dengan upaya membangun kapasitas kolektif dari keseluruhan peserta untuk mendengarkan satu sama lain yang terlibat, memahami perspektif yang berbeda dan berkomunikasi secara jernih.

Selain memberikan jalan bagi proses akuntabilitas, efektivitas keputusan dan kinerja, pembangunan komunitas juga memberikan ruang untuk membantu masyarakat dan institusi publik memberikan respon secara positif terhadap perubahan yang diinginkan dengan cara menciptakan ruang tambahan bagi partisipasi dan melepaskan energi baru yang berasal dari bawah (masyarakat *grass root*). Dinamika yang dihasilkan dari pembangunan komunitas ini merupakan bentuk yang tidak hanya dihasilkan dari konteks struktur dan prosedur namun juga melibatkan dimensi psikologi sosial yang terwujud dalam nilai-nilai kebersamaan di dalam komunitas.

Aktivitas pembangunan komunitas tersebut, dilakukan guna menciptakan dan mempertahankan wadah modal sosial (*the pool of social capital*) dalam wujud keterikatan, penjembitan, dan keterkaitan

(*bonding, bridging and linking*), yang sangat penting dalam menjamin mekanisme akuntabilitas yang setara dan berkelanjutan. Ini mencakup hubungan formal dan informal, yang dipertajam (dan ditantang) oleh adanya bias personal dan politik. Melalui komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan inklusi, pembangunan komunitas memiliki peran yang dapat dijalankan untuk menghadapi rintangan terhadap partisipasi dan berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dari perbedaan kekuasaan (Gilchrist: 2006).

Dalam wujud yang seperti itu, partisipasi komunitas diperkuat melalui penumbuhan kesadaran dan pengorganisasian masyarakat secara kolektif serta menghindari terjadinya dominasi oleh elit lokal, sehingga melalui interaksi dengan inisiatif-inisiatif yang terbuka dan terjaga secara kolektif, prinsip akuntabilitas menjadi bagian dari kebutuhan aktivitas secara integratif.

Penguatan Gagasan Akuntabilitas Sosial

Dalam keterkaitannya dengan prinsip akuntabilitas, partisipasi yang berwujud kemitraan berjalan dengan melibatkan tekanan untuk mencapai kesepakatan, misalnya terhadap cara uang dibelanjakan, atau secara eksternal melalui penyusunan target capaian yang dimaksudkan agar tersedianya ruang untuk menegosiasikan prioritas atau tujuan-tujuan jangka panjang. Meskipun hal itu dapat diperburuk oleh munculnya waktu yang terbatas (atau kepercayaan diri) untuk mencapai kesepakatan, dengan menghindari kesalahpahaman dan konflik (Gilchrist: 2006).

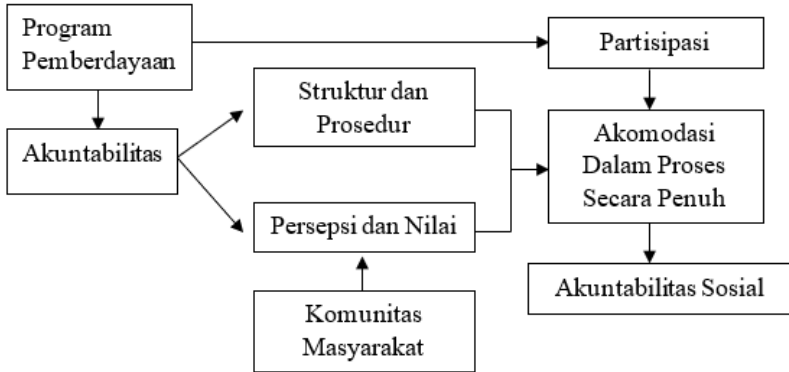
Lebih lanjut, Gilchrist (2006) mengemukakan bahwa kemitraan yang efektif membutuhkan proses akuntabilitas yang setransparan mungkin dan berusaha untuk mencegah perbedaan kekuasaan. Pekerjaan dapat berjalan dengan baik jika terdapat kejelasan tentang keseluruhan tujuan dari kemitraan, ketika struktur dan prosedur gabungan berada di dalam tempatnya, ketika forum komunitas yang independen hadir untuk bertindak sebagai arena penyampaian suara dan mekanisme seleksi, dan dimana keseluruhan sistem didukung oleh mekanisme umpan balik yang beragam. Dengan demikian dapat dicermati bahwa partisipasi dan akuntabilitas saling bersinggungan hingga membentuk suatu pola yang saling mengisi, partisipasi yang akuntabel.

Dalam konteks tersebut, akuntabilitas yang efektif akan muncul dari, dan untuk komunitas yang terhubung secara baik dalam setiap pengertian

(Gilchrist: 2004). Akuntabilitas dalam hal tersebut muncul sebagai bentuk kesepakatan bersama di dalam komunitas yang dirumuskan dan dilaksanakan secara bersama. Hanya saja kendala yang mungkin muncul dalam proses tersebut adalah dalam hal penciptaan pengertian dan kesepakatan bersama. Karenanya, dalam menjaga hubungan tersebut dibutuhkan ikatan yang kuat dalam suatu identitas kolektif, selain itu juga dibutuhkan penghubung yang baik dan kaitan terhadap organisasi dan penyelenggara kekuasaan dalam lingkup mereka sendiri (Gilchrist: 2006). Peran mereka dalam hubungan antara komunitas dan kewenangan publik dapat meningkatkan derajat akuntabilitas, terutama ketika status pekerja mereka tergantung kepada sumber daya yang tersedia dan mesti didistribusikan secara tepat. Beranjak dari prinsip yang bersinggungan dengan praktik pengembangan komunitas ini maka kemudian akuntabilitas sosial menjadi bentuk akuntabilitas yang paling relevan untuk lebih dikembangkan.

Akuntabilitas sosial dapat didefinisikan sebagai pendekatan dalam membangun akuntabilitas yang berdasarkan kepada penguatan masyarakat sipil, dimana masyarakat biasa dan/ atau organisasi masyarakat sipil berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam menepati (*exacting*) akuntabilitas pemerintah. Mekanisme akuntabilitas sosial mencakup banyak tindakan dan perangkat dimana warga negara, NGOs, dan media dapat berperan dalam menjaga agar pejabat publik tetap akuntabel. Mekanisme akuntabilitas sosial dapat digagas dan didukung oleh pemerintah, warga negara atau keduanya, meski lebih sering disesuaikan dengan permintaan (*demand-driven*) dan dikendalikan dari bawah (*bottom up*) (World Bank: 2004).

Dalam akuntabilitas sosial ini, hubungan antara substansi akuntabilitas dan partisipasi mengalami pertemuan yang erat. Dalam hubungan tersebut, substansi akuntabilitas disandingkan dengan substansi partisipasi melalui pengakomodasian aspek struktural dan prosedur dengan aspek persepsi dan nilai. Hubungan ini dapat diilustrasikan ke dalam gambar sebagai berikut”



Gambar 5. Kerangka Relasi Akuntabilitas dan Partisipasi (Akuntabilitas Sosial)

Selanjutnya, World Bank (2005) mengidentifikasi adanya enam jenis bentuk perbedaan dalam melihat variasi praktik-praktik yang menjangkau akuntabilitas sosial, diantaranya yaitu: mekanisme hukuman *versus* penghargaan (*punishment versus reward-based mechanisms*), mekanisme berdasar aturan *versus* mekanisme berdasar kinerja (*rule following versus performance-based mechanisms*), level kelembagaan (*level of institutionalization*), kedalaman pelibatan (*depth of involvement*), inklusifitas partisipasi (*inclusiveness of participation*), dan pembagian pemerintahan (*branches of government*). Perubahan praktik dalam elemen-elemen substantif akuntabilitas sosial merupakan pergerakan dari bentuk lama yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh penguatan sipil (*civic engagement*). Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Table 3. Bentuk-Bentuk Praktis Akuntabilitas Sosial

1	Struktur Insentif	Hukuman	←	→	Penghargaan
2	Pertanggungjawaban	Peraturan	←	→	Kinerja
3	Institusionalisasi	Rendah	←	→	Tinggi
4	Keterlibatan	Eksternal	←	→	Internal
5	Inklusifitas	Elitis	←	→	Inklusif
6	Pembagian Kepemerintahan	Eksekutif			Judikatif Legislatif

Sumber: World Bank (2005)

Tabel tersebut menunjukkan arah perubahan yang lebih mampu menciptakan motivasi bagi terjalinnnya pengertian dan penjalinan kesepakatan di dalam ataupun di antara komunitas. Akuntabilitas dalam

hal ini menempatkan struktur insentif dalam bentuk penghargaan, sehingga respon pada tingkat kelompok masyarakat lebih bersifat positif. Dalam hal pertanggungjawaban lebih mengedepankan kepada kinerja ketimbang peraturan, sehingga motivasi terhadap pencapaian tujuan lebih kuat. Dalam aspek institusionalisasi, diarahkan kepada penguatan yang lebih tinggi. Sementara itu dalam aspek keterlibatan, lebih mengedepankan kepada terwujudnya keterlibatan internal secara penuh dengan meminimalisir intervensi dari pihak luar. Dengan kuatnya keterlibatan internal tersebut, maka aspek inklusifitas dapat diupayakan untuk penciptaan kondisi inklusif yang lebih kuat. Bentuk pergerakan konteks keenam aspek tersebut dapat menjadi masukan bagi program pemberdayaan masyarakat yang memposisikan kelompok masyarakat untuk terstimulasi secara aktif tanpa merasa terotorisasi secara kaku. Melalui keterbukaan ruang inisiatif dan kreatif inilah, dapat menjadi pintu bagi penciptaan rasa saling pengertian dan pembangunan kesepakatan bersama.

Latar belakang penguatan masyarakat sipil dalam praktik tersebut menjadikan kesadaran sosial dan tindakan sebagai elemen penting dalam seluruh gagasan akuntabilitas sosial dan wujud riilnya dimulai dalam masyarakat sipil. Implementasi dari praktik ini terletak pada gagasan dan tindakan yang muncul dari dalam masyarakat sendiri dan dilaksanakan oleh mereka secara nyata. Meski demikian, ada beberapa faktor kendala yang berpotensi muncul dalam proses penerapan prinsip ini: pertama, adalah faktor dari dalam kelembagaan masing-masing pihak. Hal ini berkaitan dengan aspek kapasitas lembaga untuk membangun perspektif terhadap perubahan yang hendak dilakukan. Dalam pola akuntabilitas sosial tersebut disyaratkan kelembagaan yang memiliki kapasitas memadai untuk menciptakan aktivitas secara aktif dan mandiri, sehingga bentuk praktik yang tercakup dalam akuntabilitas sosial tersebut dapat terbentuk secara baik.

Faktor kendala yang kedua berkaitan dengan mekanisme transaksi yang menghubungkan secara konsisten dan selaras bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada hubungan kelembagaan pihak yang terlibat. Akuntabilitas sosial dalam konteks tersebut merupakan bentuk interaksi yang terjalin erat melalui mekanisme yang disepakati pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks tersebut pilihan terhadap mekanisme proses merupakan hasil akomodasi dan transaksi yang bersifat *win-win solution*,

pada satu sisi hal tersebut berimplikasi positif, meskipun dibutuhkan adanya kepercayaan (*trust*) yang kuat antar masing-masing pihak sehingga mekanisme tersebut bisa dijalankan secara bersama sama berdasarkan peran yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Satu hal yang juga perlu mendapat catatan bahwa kesuksesan dari implementasi prinsip ini adalah saat dimana mekanisme yang terpolakan tersebut sepenuhnya didukung oleh pemerintah (Fox dan Aranda: 1996). Kesadaran dan tindakan yang berasal dari kesepakatan sosial dalam masyarakat ketika diakui oleh pemerintah, bukan justru memperkenalkan prinsip adopsi yang lain, maka prinsip tersebut lebih memiliki keeratan dan daya ikat yang semakin kuat dengan komunitasnya. Dalam hal ini, pemerintah merupakan salah satu pihak dengan faktor kepercayaan (*trust*) yang memadai kepada komunitas masyarakat.

Oleh karena itu, strategi penerapan yang baik adalah menyeimbangkan kepemimpinan masyarakat sipil dan pemerintah. Jika gagasan itu dilihat sebagai proyek masyarakat sipil maka akan lebih menciptakan penentangan (*resistance*) pada pemerintah. Hal ini yang juga terjadi dalam beberapa kasus program pemberdayaan masyarakat di Indonesia, kekhawatiran kelompok elit pemerintahan desa menjadikan proses transformasi cara pandang dan nilai dalam masyarakat cenderung dikendalikan. Sehingga pelaku sosial yang terlibat mesti bekerja keras mencari cara untuk meraih kepercayaan diri tersebut. Sebagai proyek pemerintah, akan sulit untuk melakukan pemenuhan partisipasi masyarakat sipil sebagai komunitas jika selalu tumbuh rasa takut pemerintah/elit berkuasa akan dikooptasi atau dikendalikan. Aktor pemerintah semestinya membuka dirinya terhadap partisipasi sosial sebanyak dan secepat mungkin dalam proses pengembangan gagasan akuntabilitas sosial (World Bank: 2005).

Akuntabilitas sosial bermakna perubahan dan inovasi. Hal ini bermakna perubahan terhadap bentuk lama hubungan negara-masyarakat dan keduanya, baik aktor pemerintah dan sosial seringkali tidak memiliki kesiapan untuk memenuhi peran baru mereka. Sebagian pejabat pemerintah telah terbiasa dengan kultur birokrasi yang tertutup dan melihat partisipasi sosial sebagai ancaman terhadap jabatan mereka. Pada umumnya, warga tidak memiliki pengetahuan atau organisasi yang cukup untuk mengambil manfaat dari keterbukaan yang disediakan bagi mereka dalam persoalan yang produktif (World Bank: 2005). Dalam beberapa kasus program pemerintah, sikap pemerintah dan sikap masyarakat yang

belum menjangkau lingkup yang luas dan berkelanjutan dalam mengelola manfaat tersebut merupakan kecenderungan yang muncul secara variatif.

Rangkuman

Program pemberdayaan masyarakat perlu menempatkan prinsip akuntabilitas secara selaras dengan prinsip partisipasi sebagai bentuk paket penguatan masyarakat sipil yang mendasarkan kepada tumbuhnya nilai-nilai dari bawah. Perlu dibangun akuntabilitas yang muncul dari kesepakatan dalam komunitas ataupun antar komunitas yang terkait di dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas yang dibangun tersebut didasarkan atas pengertian bersama terhadap kondisi-kondisi prospektif yang dapat muncul dan berkembang selama aktivitas pemberdayaan berlangsung. Jika aktivitas pemberdayaan yang dilakukan merupakan program pemerintah, maka perlu dilakukan tahap pendahuluan untuk menciptakan pengertian dan kesepakatan bersama dengan komunitas masyarakat yang menjadi kelompok target dari program tersebut. Tidak hanya mencakup dalam proses perencanaan, namun juga masuk ke dalam pelaksanaan teknis dan evaluasi program tersebut. Dalam hal ini, akuntabilitas sosial dikembangkan sebagai prinsip yang menghubungkan secara menyeluruh antara partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas dari dalam komunitas/kelompok tersebut. Akuntabilitas yang tidak hanya berdimensi struktural dan prosedural namun juga menjadi bentuk hasil dari keterlibatan aktif komunitas tersebut.

Usaha untuk mewujudkan praktik akuntabilitas sosial tersebut ada dua faktor kendala yang berpotensi muncul; Pertama, faktor yang berkaitan dengan kapasitas lembaga untuk membangun perspektif terhadap perubahan yang hendak dilakukan. Kapasitas kelembagaan yang memadai diperlukan untuk menciptakan aktivitas secara aktif dan mandiri, sehingga praktik yang tercakup dalam akuntabilitas sosial tersebut dapat terbentuk secara baik. Faktor kendala yang kedua berkaitan dengan mekanisme transaksi yang menghubungkan secara konsisten dan selaras bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada hubungan kelembagaan pihak yang terlibat. Hal ini berkaitan dengan adanya kepercayaan (*trust*) yang kuat antar masing-masing pihak sehingga mekanisme tersebut bisa dijalankan secara bersama sama berdasarkan peran yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kedua hal ini yang sebelumnya harus mendapat

perhatian dalam rangka pengembangan akuntabilitas sosial yang dapat memberikan solusi bagi penyelarasan prinsip partisipasi dan akuntabilitas dalam program pemberdayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan jika pola yang hendak dikembangkan oleh akuntabilitas sosial tersebut lebih berwujud perubahan inovatif dalam pengelolaan program. Inovasi yang berwujud pergerakan aktif kelompok masyarakat secara penuh dan terstimulasi secara aktif tanpa merasa terotorisasi secara kaku. Jika partisipasi merupakan esensi pokok dalam pemberdayaan masyarakat maka akuntabilitas yang dipilih adalah yang tidak membelenggu partisipasi itu sendiri, namun mendorong munculnya akuntabilitas dari masyarakat target itu sendiri. Dalam konteks inilah prinsip yang dikandung oleh program pemberdayaan masyarakat berpotensi secara penuh terintegrasi ke dalam komunitas masyarakat.

PENUTUP

Tes Formatif/ Latihan

Mahasiswa diharapkan menjawab beberapa soal latihan sebagai berikut:

1. Jelaskan secara ringkas apa definisi dari akuntabilitas?
2. Jelaskan secara ringkas apa definisi dari akuntabilitas sosial?
3. Jelaskan enam jenis bentuk variasi praktik-praktik akuntabilitas sosial?

RUJUKAN

1. Gilchrist, Alison. 2006. *Partnership and Participation: Power in Process*. Public Policy and Administration Vol 21 No 3 Autumn 2006, SAGE Publications Ltd, Los Angeles, London, New Delhi and Singapore.
2. Bochel, C. (2006). New Labour, Participation and the Policy Process. *Public Policy and Administration*, 10-22.
3. Sinclair, Stephen. 2008. *Dilemmas of Community Planning: Lessons From Scotland*. Public Policy and Administration, SAGE Publications Ltd, Los Angeles, London, New Delhi and Singapore.
4. Brett, E.A. 2003. *Participation and Accountability in Development Management*. The Journal of Development Studies, Vol.40, No.2, December 2003, Frank Cass, London.

PELAYANAN PUBLIK

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, S., Kingi, T., & Ganesh, S. (2014). Incentives for community participation in the governance and management of common property resources: the case of community forest management in Nepal. *Forest Policy and Economics*, 1-9.
- Alfitri. (2005). Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Program Konservasi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). *Indonesian Journal For Sustainable Future*, 29-42.
- Apriyanti. (2011). *ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SEMARANG (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)*. Semarang: Undip.
- Arblaster, A. (1987). *Democracy (Concept in a Social Science)*. Bristol: Open University Press.
- Anggraini, R. D. (2001). Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Sumber*, 21(23), 21-77.
- Anwas, M. (2014). *Oos. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. *Personnel psychology*, 50(3), 801.
- Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. *Current directions in psychological science*, 9(3), 75-78.
- Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. *Career development international*.

- Bochel, C. (2006). New Labour, Participation and the Policy Process. *Public Policy and Administration*, 10-22.
- Brett, E.A. 2003. *Participation and Accountability in Development Management*. The Journal of Development Studies, Vol.40, No.2, December 2003, Frank Cass, London.
- Budiardjo, M. (2004). Dasar-dasar Ilmu Politik Hukum. *Gramedia, Jakarta*.
- Conole, G. G. (2015). MOOCs as disruptive technologies: strategies for enhancing the learner experience and quality of MOOCs. *Revista de Educación a Distancia*, 39.
- Considine, M. 1994. *Public Policies: A Critical Approach*. Melbourne: MacMillan Education Australia Pty Ltd.
- Conyers, D. (1984). Decentralization and development: A review of the literature. *Public Administration & Development (pre-1986)*, 4(2), 187.
- Dhokhikah, Y., Trihadiningrum, Y., & Sunaryo, S. (2015). Community participation in household solid waste reduction in Surabaya, Indonesia. *Resources, Conservation and Recycling*, 153-162.
- DiPaola, M., & Tschannen-Moran, M. (2014). Organizational citizenship behavior in schools and its relationship to school climate. *Journal of School Leadership*, 424-447.
- Durant, R.F, R. O'Leary and D. Fiorino. 2001. *A New Governance Paradigm (Topic: Natural Resources Management)*. The American Society for Public Administration, Vol. 4, No. 8.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Ernis, Tresiana, Novita dan Hutagalung, Simon. 2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Lampung Barat*, Skripsi, *Unpublished*.
- Ford, J. D., & King, D. (2015). A framework for examining adaptation readiness.. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 505-526.
- Franz, F. (1999). Five Arguments for Increasing Public Participation in Making Science Policy. *Buletin of Science, Technology and Society*,

117-127.

- Gaventa, J., & Valderrama, C. (1999, June). Participation, citizenship and local governance. In *Background note for the workshop "Strengthening Participation in Local Governance," University of Sussex, Institute of Development Studies* (Vol. 21).
- Gilchrist, Alison. 2006. *Partnership and Participation: Power in Process*. Public Policy and Administration Vol 21 No 3 Autumn 2006, SAGE Publications Ltd, Los Angeles, London, New Delhi and Singapore.
- Gustavsson, M., Lindström, L., Jiddawi, N. S., & De La Torre-Castro, M. (2016). Procedural and distributive justice in a community-based managed Marine Protected Area in Zanzibar, Tanzania. *Marine Policy*, 91-100.
- Grindle, M.S., and J.W. Thomas. 1991. *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. Maryland: John Hopkins University Press.
- Hill, M. 1997. *The Policy Process in the Modern State*. London: Prentice Hall/ Harvester Wheatsheaf.
- Hindmoor, A. 1997. *The Importance of Being Culture: Rediscovering Policy Network Theory*. Ulster: University of Exeter
- Herbert, M. (2011). *An exploration of the relationships between psychological capital (hope, optimism, self-efficacy, resilience), occupational stress, burnout and employee engagement* (Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University).
- Hutagalung, Simon S. 2006. *Dinamika Proses Kebijakan Dalam Otonomi Desa (Studi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)*, Laporan Penelitian, *Unpublished*.
- Jordan, G. 1990. *Sub-Governments, Policy Communities and Networks: Refilling the Old Bottles?*. *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 2, No. 3, Pp. 319-338.
- Kartasasmita, G. (1993). *Kebijaksanaan dan strategi pengentasan kemiskinan*. Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi.

- Kleden, I. (2004). *Masyarakat dan negara: sebuah persoalan*. Jakarta: Penerbit Agromedia Pustaka.
- Kooiman, J. (ed). 1993. *Modern Governance: New Government-Society Interactions*. London: Sage Publications.
- Lilleker, D. G., & Koc-Michalska, K. (2017). What drives political participation? Motivations and mobilization in a digital age. *Political Communication*, 21-43.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2012). *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington: World Bank Publications.
- Mas'ood, M. 1997. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Menno, P., Suryadarma, D., Beatty, A., Wong, M., Gaduh, A., Alisjahbana, A., & Artha, R. P. (2014). Improving Educational Quality through Enhancing Community Participation: Results from a Randomized Field Experiment in Indonesia. *American Economic Journal: Applied Economics*, 105-126.
- Muller, E. N. (2015). *Aggressive Political Participation*. Princeton: Princeton University Press.
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 79-87.
- Ndraha, T. (1990). Partisipasi Masyarakat. *Pembangunan Masyarakat*.
- Notoatmodjo, S. (2007). Promosi kesehatan & ilmu perilaku.
- Nurcholis, H. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Grasindo.
- Nugroho, D., & Wrihatnolo, R. R. (2007). Manajemen pemberdayaan. *Jakarta, PT Alex Media Komputido*.
- Nusatria, S., & SUHARNOMO, S. (2011). *Employee Engagement: Antecedents and Consequences Study on Unit CS PT. Telkom Indonesia Semarang* (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

- Panggabean, R. (2013). PENYULUHAN PERKOPERASIAN DAN UKM. *INFOKOP*, 120-129.
- Pelencia, J., Bassile, D., & Ceruti, C. (2015). Collective capability and collective agency for sustainability: A case study. *Ecological Economics*, 226-239.
- Rhodes, R.A.W, & David Marsh. 1992. *New Directions in the Study of Policy Networks*.
- European Journal of Political Research, Vol. 21, Pp. 181-205.
- Rodliyah, S. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di sekolah. Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. *Journal of managerial psychology*.
- Samosir, L. R. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi).
- Simmons, Richard and Birchall, Johnston. 2005. *A Joined-up Approach to User Participation in Public Services: Strengthening the "Participation Chain*. Social Policy & Administration, Vol 39, No. 3. Blackwell Publishing Ltd. Garsington Road, Oxford, UK.
- Sinclair, Stephen. 2008. *Dilemmas of Community Planning: Lessons From Scotland*. Public Policy and Administration, SAGE Publications Ltd, Los Angeles, London, New Delhi and Singapore.
- Soetrisno, N. (2005). SME Clustering Strategy In Indonesia: An Integrated Development Support. *Improving the competitiveness of SMEs through enhancing productive capacity*, 131.
- Soekanto, S. (1986). Sosiologi: suatu pengantar.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat.
- Sumodiningrat, G. (2007). *Pemberdayaan sosial: kajian ringkas tentang pembangunan manusia Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.

- Syahri, M. (2016). BENTUK – BENTUK PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KONSEP GREEN MORAL DI KABUPATEN BLITAR. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 109-136.
- Tjokroamidjojo, B. (1987). *manajemen Pembangunan*. Haji Masagung.
- The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2005, *Social Accountability in the Public Sector: A Conceptual Discussion and Learning Module*. The World Bank, Washington, D.C. U.S.A.
- Winardi, J. (2004). *Manajemen perilaku organisasi*. Jakarta: Prenada Media.

GLOSSARY

<i>Absorption</i> :	Daya Serap
<i>Behavior Based Safety</i> :	Pengamanan Berbasis Perilaku
<i>burnout</i> :	Pemanasan
<i>conditioned response</i> :	Respon yang terkondisikan
<i>conditioned stimulus</i> :	Stimulus yang terkondisikan
<i>Decision Making</i> :	Pengambilan Keputusan
<i>dedication</i> :	Dedikasi
<i>empowerment index</i> :	Indeks Pemberdayaan Masyarakat
<i>engagement</i> :	Penguatan
<i>extrovert behavior</i> :	Perilaku ekstrovert
<i>feedback</i> :	umpan balik
<i>goal-setting</i> :	penentuan tujuan
<i>Job demands</i> :	permintaan terhadap pekerjaan
<i>kondisi existing</i> :	kondisi yang senyatanya terjadi
<i>konversi</i> :	perubahan yang terjadi secara sengaja
<i>manpower</i> :	sumber daya manusia
<i>mindset</i> :	kerangka berpikir
<i>modal sosial</i> :	pembentuk relasi sosial yang terdiri dari <i>trust</i> (kepercayaan)
<i>non participation</i> :	bukan partisipasi
<i>output</i> :	keluaran dari suatu proses
<i>partnership</i> :	kemitraan di antara dua pihak atau lebih
<i>Personal engagement</i> :	penguatan terhadap kapasitas individu
<i>reinforcement</i> :	penguatan dukungan
<i>reward</i> :	hadiah atas suatu prestasi
<i>safe behavior</i> :	perilaku aman

Self Management:manajemen diri
self-efficacy: kemampuan seseorang untuk memotivasi dirinya
Stimulus-Organisme-Respons: stimulus terhadap respon dari aktor organisasi
sub-ordinasi:bawahan dalam suatu struktur organisasi
Swadaya Masyarakat: dilaksanakan oleh masyarakat sendiri
top down:dari atas ke bawah
turnover: perputaran kembali
vigor: kekuatan mental selama bekerja, ketulusan kerja
wellbeing: kebaikan bersama

INDEX

A

absorption 106, 107

B

Behavior Based Safety 84
burnout 105, 106, 119, 135

C

conditioned response 84
conditioned stimulus 84

D

Decision Making 15, 49
dedication 106, 107, 108

E

empowerment index 28, 31
engagement 87, 88, 91, 98, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 117,
119, 133, 135, 137
extrovert behavior 83

F

feedback 85, 86, 111

G

goal-setting 110

J

Job demands 110

K

kondisi existing

konversi 17, 48

M

manpower 10
mindset 29
modal sosial 5

N

non participation 61, 87

O

output 52, 70

P

partnership
Personal engagement 105

R

reinforcement 84, 85
reward 29, 69, 128

S

safe behavior 84, 85
self-efficacy 88, 89, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 119, 135, 140
Self Management 55, 140
Stimulus-Organisme-Respons 82, 140
sub-ordinasi 17, 140
Swadaya Masyarakat 51, 73, 140

T

top down 2
turnover 109, 140

V

vigor 106, 107, 140

W

wellbeing 12

PELAYANAN PUBLIK

PROFIL PENULIS



Simon Sumanjoyo Hutagalung dilahirkan di Bandar Lampung, tanggal 28 Juni 1981. Beliau menempuh pendidikan Sarjana di Jurusan Administrasi Negara FISIP Unila dari tahun 1999 hingga 2004. Pada tahun 2008 hingga 2010 beliau menempuh pendidikan pascasarjana di Jurusan Magister Administrasi Negara FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Beliau diangkat sebagai dosen tetap Jurusan Administrasi Negara FISIP Unila sejak tahun 2005 hingga saat ini masih sebagai pengajar pada almamaternya itu. Tercatat sudah menghasilkan berbagai penelitian pada level lokal, nasional dan internasional. Selain itu tulisannya pun terdapat pada beberapa Jurnal Lokal dan Nasional.

